

**PERGOLAKAN DARUL ISLAM/TENTARA ISLAM INDONESIA ACEH  
DALAM SOROTAN SURAT KABAR SINGAPURA *THE STRAITS TIMES*  
TAHUN 1953-1960**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Bahasa  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)



Oleh:

**HERMAN JANSEN SASONGKO**

**NIM. 173231022**

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM  
FAKULTAS ADAB DAN BAHASA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID  
SURAKARTA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herman Jansen Sasongko

NIM : 173231022

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Adab dan Bahasa

Menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "PERGOLAKAN DARUL ISLAM/TENTARA ISLAM INDONESIA ACEH DALAM SOROTAN SURAT KABAR SINGAPURA *THE STRAITS TIMES* TAHUN 1953-1960" adalah hasil penelitian sendiri dengan sungguh-sungguh dan bukan milik orang lain. Jika skripsi ini adalah plagiasi maka saya siap menerima sanksi akademik.

Surakarta, 10 November 2022

Yang menyatakan  
  
METERAI  
PEMPEL  
173231022  
Herman Jansen Sasongko

173231022



NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdr. Herman Jansen Sasongko  
NIM : 173231022

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Adab dan Bahasa  
Di UIN Raden Mas Said Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan, kami selaku pembimbing memutuskan bahwa skripsi sdr.:

Nama: Herman Jansen Sasongko

NIM: 173231022

Judul: "PERGOLAKAN DARUL ISLAM/TENTARA ISLAM INDONESIA ACEH  
DALAM SOROTAN SURAT KABAR SINGAPURA THE STRAITS TIMES  
TAHUN 1953-1960"

Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqosyah skripsi guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Sejarah Peradaban Islam. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 18 November 2022

Dosen Pembimbing



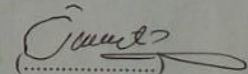
Martina Safitry, S.S., M.A.

NIP. 198603082018012001

## LEMBAR PENGESAHAN

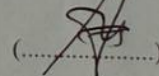
Skripsi dengan judul **Pergolakan DI/TII Aceh Dalam Sorotan Surat Kabar Singapura *The Straits Times* Tahun 1953-1960** yang disusun oleh **Herman Jansen Sasongko** telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Sejarah Peradaban Islam.

Penguji Utama : Dr. H. Moh. Mahbub, S.Ag., M.Si  
NIP 197004101997031004



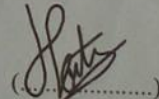
Penguji I,

Merangkap Ketua : Aan Ratmanto, M.A.  
NIP 198306252018101010

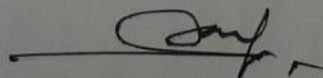


Penguji II,

Merangkap Sekretaris : Martina Safitry, S.S., M.A.  
(Pembimbing) NIP 198603082018012001



Sukoharjo, 22 Desember 2022  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Adab dan Bahasa



Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197104031998031005

MOTTO

*In war, there is no substitute for victory* (Jenderal Douglas MacArthur)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, penulis bisa menyelesaikan tulisan skripsi ini berjudul PERGOLAKAN DARUL ISLAM/TENTARA ISLAM INDONESIA ACEH DALAM SOROTAN SURAT KABAR SINGAPURA *THE STRAITS TIMES* TAHUN 1953-1960. Penulis persembahkan tulisan ini untuk kedua orang tua, dan sahabat main penulis saat masih duduk di Taman Kanak-Kanak yakni Mutia yang hilang ditelan ombak tsunami Aceh 2004.

## ABSTRAK

**Herman Jansen Sasongko, 173231022, 2022. Skripsi. “Pergolakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Aceh dalam Sorotan Surat Kabar Singapura *The Straits Times* Tahun 1953-1960”. Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Fakultas Adab dan Bahasa. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta**

Penelitian ini membahas tentang pemberitaan surat kabar *The Straits Times* dari Singapura yang menyoroti peristiwa pergolakan DI/TII di Aceh tahun 1953-1960. Permasalahan yang penulis bahas adalah mengenai pemberitaan surat kabar *The Straits Times* dari Singapura yang menggambarkan situasi kondisi Aceh sebelum dan saat terjadinya pergolakan DI/TII yang dipimpin oleh Daud Beureueh. Terdapat perbedaan pemberitaan *The Straits Times* dengan narasi sejarah DI/TII Aceh yang ditulis oleh media Indonesia. Hal ini menjadi menarik untuk melihat apa saja perbedaan narasi pemberitaan dalam surat kabar asing. Penelitian dengan menggunakan *framing* dalam media tersebut dalam memberitakan peristiwa DI/TII di Aceh.

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah dimulai dari pemilihan topik, pengumpulan data, verifikasi, Interpretasi, dan historiografi. Untuk dapat menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, digunakan ilmu bantu komunikasi dengan pendekatan *framing*/bingkai. Penulis mengambil metode analisis bingkai karena dapat membantu penulis dalam melihat sudut pandang surat kabar *The Straits Times* memberitakan peristiwa pergolakan DI/TII di Aceh.

Hasil dari penelitian ini menyampaikan bahwa surat kabar Singapura *The Straits Times* memberitakan situasi Aceh saat pergolakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia berlangsung. Mengingat jarak antara Aceh dengan Singapura hanya dibatasi oleh Selat Malaka dan aktivitas perdagangan Aceh dengan Singapura dan sebaliknya, *The Straits Times* media cetak Singapura memberitakan perkembangan kondisi Aceh saat pergolakan berlangsung. Berbagai pemberitaan seperti pengaruh pergolakan terhadap lalu-lintas perdagangan Aceh-Singapura, kondisi sosial politik di Aceh saat pergolakan berlangsung, dan tindakan pemerintah pusat menyikapi pergolakan di Aceh. *The Straits Times* memandang bahwa pergolakan yang dilakukan oleh DI/TII Aceh sebagai pemberontakan.

Kata kunci: *Analisis Framing, The Straits Time, DI/TII Aceh*



## ABSTRACT

**Herman Jansen Sasongko, 173231022, 2022. Skripsi. “Pergolakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Aceh dalam Sorotan Surat Kabar Singapura *The Straits Times* Tahun 1953-1960”. Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Fakultas Adab dan Bahasa. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta**

This research discusses the reporting of The Straits Times newspaper from Singapore which highlights the events of the DI/TII upheaval in Aceh in 1953-1960. The problem that the author discusses is about the reporting of The Straits Times newspaper from Singapore which describes the situation in Aceh before and during the DI/TII upheaval led by Daud Beureueh. There is a difference between The Straits Times reporting and the historical narrative of DI/TII Aceh written by Indonesian media. It becomes interesting to see what are the differences in the narrative of reporting in foreign newspapers. Research using framing in the media in reporting on DI/TII events in Aceh.

To conduct this research, the authors used historical research methods starting from topic selection, data collection, verification, interpretation, and historiography. To be able to analyze the problems in this study, communication science is used with a framing / frame approach. The author takes the frame analysis method because it can help the author in seeing the point of view of The Straits Times newspaper reporting on the DI/TII upheaval in Aceh.

The results of this study stated that the Singapore newspaper The Straits Times reported on the situation in Aceh during the upheaval of Darul Islam/Indonesian Islamic Army. Considering that the distance between Aceh and Singapore is only limited by the Strait of Malacca and Aceh's trade activities with Singapore and vice versa, The Straits Times singapore print media reported on the development of Aceh's condition during the upheaval. Various reports such as the influence of the upheaval on Aceh-Singapore trade traffic, socio-political conditions in Aceh during the upheaval, and the central government's actions in response to the upheaval in Aceh. The Straits Times views the upheaval by DI/TII Aceh as an insurgency.

Keywords: Framing Analysis, *The Straits Times*, DI/TII Aceh

## KATA PENGANTAR

Ucapan terima kasih tidak henti-hentinya penulis ucapkan karena berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “PERGOLAKAN DARUL ISLAM/TENTARA ISLAM INDONESIA ACEH DALAM SOROTAN SURAT KABAR SINGAPURA *THE STRAITS TIMES* TAHUN 1953-1960”. Tentunya penulis tidak sendiri dalam menulis skripsi ini. Berbagai dukungan, bantuan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi nikmat sehat dan kekuatan penulis yang telah menyelesaikan skripsi ini
2. Keluarga inti penulis Bapak, Ibuk, Mas Lilo, dan Gading yang telah mendorong mendukung penuh tanpa kenal lelah
3. Bapak Kombes Pol. Djoko Trisno W S.IK. yang telah memberi dukungan penulis dalam bentuk finansial
4. Keluarga besar Bapak Bandiyoko (Pakde Bandi, Budhe Indri Saryanti, Mas Andri, Mas Syarif, Mbak Syam Andry, Mbak Menik, Nendra, dan Syifa) yang telah memberi dukungan penulis dalam bentuk logistik dan tempat tinggalnya sebagai tempat singgah istirahat penulis saat menuntut ilmu di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta
5. Keluarga besar Bapak Heri Sanyoto (Pakde Heri, Budhe Evi, Mas Hervian, Mbak Novi yang telah memberi dukungan penulis dalam bentuk logistik dan tempat tinggalnya sebagai tempat singgah istirahat penulis saat menuntut ilmu di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta
6. Keluarga mas Ridwan Purwanto (Mas Wawan, Mbak Asih, Adit, Aliya) yang telah memberi dukungan penulis dalam bentuk finansial
7. Ibu Martina Safitry S.S., M.A., pembimbing skripsi penulis yang selalu memberi masukan, saran, motivasi, mendorong mendukung penuh penulis agar pantang menyerah saat menulis skripsi
8. Bapak Maimun Ramli Al Abrar yang telah berbagi kisah hidup bersama dengan Daud Beureueh saat masih anak-anak
9. Bapak Al Chaidar Abdurrahman Puteh S.IP., M.Si yang telah memberi arahan penulis dalam mencari sumber pergolakan DI/TII Aceh
10. Rektor UIN Raden Mas Said Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd, Dekan Fakultas Adab dan Bahasa Prof. H. Dr. Toto Suharto, S.Ag, M.Ag.yang telah memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu di kampus UIN Raden Mas Said serta seluruh dosen Prodi Sejarah Peradaban Islam Dr. Moh. Mahbub, M.Si., Latif Kusairi S. Hum., M.A., Eka Yudha Wibowo, M.A., Moh. Ashif Fuadi, M.Hum., Sucipto, S.Hum, M.Hum., Aan Ratmanto, M.A., Irma Ayu Kartika Dewi, S.Pd, M.A., Dede Rohayati, M.A, Dr. Hamdan Maghribi S.Th.I., M.Phil., Dr. Aly Mashar, S.Pd.I., M.Hum. yang telah berbagi pengalaman, ilmu, wawasan selama masa perkuliahan

11. Kawan-kawan angkatan 2017 SPI yang telah menemani penulis dalam menuntut ilmu: Johan, Firdha, Maisyah, Duanda, Abror, Misbah, Robby, Angga, Krisna, Atta, Adib, Kholis, Fadhil, Amin, Auliya, Adan, Dian, dan semua kawan-kawan jurusan SPI.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, adanya saran dan kritik membangun sangat diharapkan dan penulis berharap skripsi ini bisa memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan bidang sejarah

Sukoharjo, 15 November 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
E. Tinjauan Pustaka.....	16
F. Landasan Konseptual .....	20
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II. MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN DAN PERGOLAKAN di ACEH</b>	
A. Daud Beureueh dan Perjuangan Rakyat Aceh dalam Mempertahankan Kemerdekaan RI .....	24
B. Menjelang Aksi Pemberontakan 21 September 1953.....	36
C. Situasi Aceh Pasca Pemberontakan 21 September 1953 .....	55
D. Peristiwa Berdarah di Aceh dalam kacamata Media Massa Asing.....	71

<b>BAB III SOROTAN THE STRAITS TIMES TERHADAP PERISTIWA PERGOLAKAN DI/TII di ACEH</b>	
A. Sejarah Berdirinya <i>Straits Times</i> .....	75
B. Pemberitaan Huru-Hara dan Peristiwa Berdarah Aceh oleh <i>The Straits         Times</i> .....	80
<b>BAB IV ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PERISTIWA DI/TII ACEH</b>	
A. Analisis Framing Untuk Peristiwa Sejarah .....	99
B. Perbedaan narasi dalam isi berita <i>The Straits Times</i> dengan buku sejarah pergolakan DI/TII Aceh .....	100
<b>BAB V KESIMPULAN</b> .....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN .....	114

## DAFTAR SINGKATAN

APRI	: Angkatan Perang Republik Indonesia
API	: Angkatan Pemuda Indonesia
ALRI	: Angkatan Laut Republik Indonesia
AURI	: Angkatan Udara Republik Indonesia
BKR	: Badan Keamanan Rakyat
BPI	: Barisan Pemuda Indonesia
BPK	: Barisan Penjaga Keamanan
BPRI	: Barisan Pemuda Republik Indonesia
Brigjend	: Brigadir Jenderal
Brimob	: Brigade Mobil
CPM	: Corps Polisi Militer
DI	: Darul Islam
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRS	: Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
KDMA	: Komando Daerah Militer Aceh
Keppres	: Keputusan Presiden
KMKB	: Komando Militer Kota Besar
KNID	: Komite Nasional Indonesia Daerah
KNIL	: het Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger
KSAD	: Kepala Staf Angkatan Darat
KW	: Komandemen Wilayah
Letjend	: Letnan Jenderal
Letkol	: Letnan Kolonel
Mayjend	: Mayor Jenderal
MBRU	: Markas Besar Rakyat Umum
MUPPRDA	: Markas Umum Perjuangan dan Pertahanan Rakyat Daerah Aceh
NBA	: Negara Bagian Aceh
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBPA	: Persatuan Bekas Pejuang Aceh
PDRI	: Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Pesindo	: Pemuda Sosialis Indonesia.
PETA	: Pembela Tanah Air
PM	: Perdana Menteri
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PON	: Pekan Olahraga Nasional
PPD	: Penguasa Perang Daerah
PRI	: Persatuan Republik Indonesia
PRRI	: Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
PUSA	: Persatuan Ulama Seluruh Aceh
P4SU	: Panitia Penyelenggaraan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
RI	: Republik Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat

RPKAD: Resimen Para Komando Angkatan Darat  
SPH : *Singapore Press Holding*  
Tgk : Tengku  
TII : Tentara Islam Indonesia  
TKR : Tentara Keamanan Rakyat  
TNI : Tentara Nasional Indonesia  
TPR : Tentara Perjuangan Rakyat  
TT : Tentara Teritorium  
UII : Universitas Islam Indonesia  
Waperdam: Wakil Perdana Menteri

## DAFTAR ISTILAH

American Saloon Car	: jenis mobil sedan klasik antara dekade 1930-1960
British Saloon Car	: jenis mobil sedan klasik antara dekade 1920-1960
Comite Van Ontvangst	: Panitia penyambutan tentara Belanda
de facto	: berdasarkan kenyataan/fakta
de jure	: berdasarkan hukum
desersi	: lari meninggalkan dari tugas atau markas
Gunseibu	: semacam jabatan gubernur
Gyugun	: semacam ketentaraan sukarela
Heiho	: pasukan pembantu yang beranggotakan orang
Indonesia	
Kontroleur	: jabatan wedana
Merdeka (operasi) tahun 1958	: operasi penumpasan Permesta di Sulawesi Utara
Militaire Bystand militer	: suatu daerah ditetapkan sebagai daerah darurat
mosi	: keputusan rapat
Operatie Product	: Agresi militer Belanda pertama
Operatie Kraai	: Agresi militer Belanda kedua
Overste	: sebutan pangkat perwira menengah
Residen jenderal	: jabatan yang mewakili representasi gubernur
Sadar (operasi) tahun 1958	: Operasi penumpasan PRRI di Sumatra Selatan
Sapta Marga (operasi) tahun 1958	: Operasi penumpasan Permesta di Sulawesi Utara
show of force gentar	: memamerkan kekuatan agar musuh takut atau
status quo	: kondisi yang sedang berjalan saat ini
Tegas (operasi)	: Operasi penumpasan PRRI di Riau tahun 1958
Zelfbesturder	: semacam daerah otonomi khusus



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan. Kabar proklamasi kemerdekaan mulai terdengar di berbagai daerah meskipun baru diketahui beberapa hari. Contoh seperti di Pulau Sumatra, masyarakat di berbagai kota menerima kabar proklamasi berbeda-beda waktunya. Ada yang tepat pada 17 Agustus 1945 malam hari seperti di Bukittinggi dan Padang<sup>1</sup>. Sementara di Bengkulu kabar proklamasi diterima pada tanggal 20 Agustus 1945 lewat telegram dari Palembang, sementara di Aceh tersebar secara resmi pada 21 Agustus 1945<sup>2</sup>. Setelah kabar proklamasi tersebar, para tokoh Aceh yang pernah mengenyam pendidikan militer berkumpul membentuk suatu wadah atau organisasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Sementara itu pada 25 Agustus 1945, rombongan kapal perang Inggris atas nama Sekutu berlabuh di Pulau Weh. Tidak hanya tentara Inggris saja, tentara Belanda dan perangkat pemerintahan sipil Belanda dari AMACAB (Allied Military Administration Civil Affairs Branch) turut serta<sup>3</sup>. Letak Pulau Weh yang strategis terletak di pintu masuk Selat Malaka dan langsung menghadap Samudera Hindia menjadi penyebab Jepang menempatkan 10.000 pasukan pertahanan dibawah komando Laksamana Madya Hirose Sueto menjelang Jepang menyerah kepada Sekutu. Adapun

---

<sup>1</sup> Restu Gunawan dkk, *Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Kebudayaan, 2015) hal. 73

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 74

<sup>3</sup> Drs. Muhammad Ibrahim dkk, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta: Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 1983) hal. 81

penyebab Aceh tidak diduduki Belanda karena persenjataan yang dimiliki oleh rakyat Aceh dari rampasan tentara Jepang sangatlah lengkap seperti artileri penangkis serangan udara yang disiagakan di berbagai lapangan udara Langsa, Meulaboh, Sigli, Lhok Nga dan lainnya. Tidak lupa meriam anti kapal terpasang di berbagai pelabuhan di Sigli, Meulaboh, Kuala Langsa, Tapak Tuan, Krueng Raya dan lainnya<sup>4</sup>.

Ketika masa revolusi kemerdekaan, Aceh disebut sebagai daerah modal. Wilayah yang tidak dikuasai oleh Belanda dan rakyatnya menyumbang harta bendanya untuk modal perjuangan Indonesia. Sumbangan tersebut digunakan untuk membeli dua unit pesawat angkut Dakota dengan nama “Seulawah 1, Seulawah 2”<sup>5</sup>. Selain itu, biaya yang ditanggung oleh rakyat Aceh untuk segala akomodasi perjuangan diplomatik Indonesia berasal dari hasil penyelundupan dagang dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Uang dari hasil penyelundupan ini dikirim ke diplomat LN Palar yang sedang berada di markas PBB New York dan diplomat Dr. Sudarsono di India. Selain itu, berbagai perbekalan dan peralatan persenjataan juga didatangkan kemudian didistribusikan kepada pasukan TNI di Sumatra Utara dan Aceh<sup>6</sup>.

Pada tanggal 31 Januari 1950, Aceh resmi menjadi provinsi baru bersama pelantikan gubernur militer Teungku Daud Beureueh. Namun, pada bulan

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 85

<sup>5</sup> Dr. T. Ibrahim Alfian. M.A. dkk, *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945-1949)* (Banda Aceh: Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 1982) hal. 101

<sup>6</sup>Nur El Ibrahimy, *TGK.M.DAUD BEUREUEH: peranannya dalam pergolakan di Aceh*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982) hal. 44

Maret 1950, Menteri Dalam Negeri Mr. Santoso Tirtoprodjo saat melakukan kunjungan ke Kutaraja memberikan pernyataan bahwa Jakarta belum lagi memutuskan berdirinya provinsi Aceh. Hal ini tertuang dalam Perpu no. 5 tahun 1950. Jika ditarik kebelakang, pembentukan provinsi Aceh bukanlah kehendak pemerintah pusat. Ketika agresi Belanda II, PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) memutuskan semua aktivitas pemerintahan sipil dan militer dibawah kuasa Gubernur Militer (keputusan No.21/Pem/PDRI tanggal 16/5/1949). Esoknya mengumumkan keputusan lagi bahwa Sumatera Utara dibagi menjadi dua daerah militer (keputusan No.22/Pem/PDRI tanggal 17/5/1949). Daerah Militer Aceh meliputi seluruh wilayah Aceh ditambah Tanah Karo dan Langkat. Jabatan gubernur militer dipegang oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh yang berpusat di Kutaraja<sup>7</sup>.

Para pimpinan daerah Aceh khawatir adanya rencana pemindahan pusat pemerintahan sipil dan militer provinsi Sumatera Utara dari Kutaradja (sekarang Banda Aceh) menuju Medan. Jika terlaksana, maka status Aceh sebagai Daerah Militer Istimewa sejak tahun 1949 terancam dihapus. “Pukulan telak” yang diterima Aceh tidak berhenti begitu saja. Pembubaran Divisi Tentara Teritorium Aceh pada tahun 1951 yang mengakibatkan ribuan prajurit terlantar<sup>8</sup> dan karir perwira di lingkungan Teritorium Aceh terhambat lalu berbagai kesatuan batalyon tempur Aceh yang dikirim keluar Sumatera

---

<sup>7</sup>Rusdi Sufi dkk, *SEJARAH KOTAMADYA BANDTA ACEH*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997) hal. 72

<sup>8</sup> Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1990) hal. 57

untuk menumpas gerakan huru-hara di Kalimantan dan Sulawesi, dan penangkapan para tokoh pimpinan daerah Aceh semakin membuat rakyat Aceh kesal dan kecewa. Kecuali Daud Beureueh yang tidak ditangkap tetapi rumahnya turut digeledah<sup>9</sup>.

Mendengar adanya perselisihan antara Jakarta dengan Aceh, Imam Kartosuwiryo sebagai pemimpin DI/TII segera memanfaatkan momen tersebut. Kartosuwiryo mengirim seorang utusan Abdul Fatah/Mustafa pada Januari 1952 untuk melakukan pendekatan. Abdul Fatah membawa sepucuk salinan dakwah gerakan DI/TII dan membujuk agar pimpinan daerah Aceh bergabung dengan gerakan DI/TII. Daud Beureueh merespon dengan mengirim utusan Jahja Sulaiman bersama Abdul Fatah yang akan pulang ke Jawa Barat. Tugas dari Jahja Sulaiman yaitu membawa sepucuk surat balasan Daud Beureueh, meminta penjelasan lebih lanjut kepada Kartosuwiryo dan mendalami struktur pemerintahan dan militer DI/TII. Daud Beureueh kesal dengan dakwah DI/TII yang hanya berisi pembenaran ideologi gerakan DI/TII tanpa sistem yang jelas<sup>10</sup>.

Puncak dari huru-hara di Aceh adalah pengumuman “proklamasi” Aceh bagian dari DI/TII dibawah Imam Kartosuwiryo oleh Daud Beureueh pada tanggal 21 September 1953<sup>11</sup>. Sebelum adanya pengumuman “proklamasi”

---

<sup>9</sup>Rusdi Sufi dkk, *Op. cit*, hal.73

<sup>10</sup>Surat yang dikirim dari Daud Beureueh kepada Kartosuwiryo bertanggal 4 Oktober 1956. Dalam surat itu Daud Beureueh juga menulis hubungan lebih lanjut dengan Kartosuwiryo. Nazaruddin Sjamsuddin, *Op.cit*, hal. 89

<sup>11</sup>Ariwiadi, *GERAKAN OPERASI MILITER VII: Penjelesaian Peristiwa Atjeh*, (Jakarta: Mega Bookstore & Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, 1959) hal. 3

DI/TII di Aceh, tidak sedikit pejabat pusat yang datang untuk meredam gejala Aceh. Mulai dari Mr. Asaat pada 26 September 1950 kemudian Mr. Teuku Muhammad Hasan bahkan Wakil Presiden Moh. Hatta. Namun usaha tersebut dengan hasil tangan kosong<sup>12</sup>.

Setelah berkumandangnya “proklamasi” oleh Daud Beureueh, seketika suasana Aceh menjadi mencekam. Ribuan pengikut Daud Beureueh serentak menyerbu dan berusaha menduduki kota-kota penting di Aceh seperti Meulaboh, Kutaradja, Sigli, Takengon, dan Lhokseumawe. Aksi penyerbuan tersebut mendapat perlawanan dari aparat keamanan dari APRI/TNI, Brimob, dan Polisi Pamong Praja. Seperti di Kutaradja, pasukan APRI dibawah komando Mayor Priyatna dibantu Polisi Pamong Praja setempat berhasil mempertahankan Kota Kutaradja dari serangan pengikut Daud Beureueh. Selain aparat keamanan, pejabat daerah yang masih setia dengan Jakarta seperti Bupati Meulaboh Patih Radja Kalelong berhasil meredam aksi penyerbuan pengikut Daud Beureueh<sup>13</sup>.

Selain Kutaradja dan Meulaboh, kota yang gagal dikuasai oleh pengikut Daud Beureueh yakni Lhokseumawe (ibukota Kabupaten Aceh Utara) dan Sigli (ibukota Kabupaten Pidie). Hal ini dikarenakan polisi sektor kabupaten sudah siap siaga menghadapi serangan pengikut Daud Beureueh meskipun pertempuran berlangsung beberapa hari dan tidak sedikit jatuh korban jiwa.

---

<sup>12</sup> Rusdi Sufi dkk, *SEJARAH KOTAMADYA BANDA ACEH*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997) hal. 73

<sup>13</sup> Ariwiadi, *Op.cit*, hal. 4

Sementara di Meureuedu (masih bagian dari Kabupaten Pidie) berhasil dikuasai pengikut Daud Beureueh. Penyerbuan tersebut dipimpin oleh Hasan Saleh seorang perwira TNI yang melakukan tindakan desersi. Hasan Saleh membawa pasukan dan senjata lengkap dari Sidikalang, Sumatra Utara<sup>14</sup>.

Sebenarnya sejak pertengahan tahun 1953 Moh. Hatta sudah mengetahui hubungan Daud Beureueh dengan Kartosuwirjo. Sebagai seorang demokrat, berbagai usaha secara persuasif dilakukan oleh Moh. Hatta agar Daud Beureueh sadar dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi<sup>15</sup>. Usaha persuasif yang dilakukan oleh Moh. Hatta bukan tanpa alasan karena telah terjadi bentrokan bersenjata di Pulot dan Cot Jeumpa. Namun usaha persuasif Moh. Hatta sia-sia karena PM Ali Satroamidjojo berencana melakukan operasi penangkapan besar-besaran terhadap seluruh pimpinan daerah Aceh termasuk Daud Beureueh. Moh. Hatta selalu mendengarkan dan mendukung usaha persuasif yang dikemukakan oleh Kolonel Zulkifli Lubis (yang ingin melakukan perundingan dengan DI/TII) dan para perwira tentara putra Aceh seperti Kolonel Syamaun Gaharu.

Kolonel Syamaun Gaharu dan Moh. Hatta percaya bahwa solusi mengatasi gerakan DI/TII Aceh tidak bisa selesai dengan jalan operasi militer, tetapi memberikan opsi pemberian provinsi dan membiarkan Aceh mengatasi konflik internal sendiri antara *ulebalang* dengan ulama<sup>16</sup>. Sementara itu

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 5

<sup>15</sup> Nazaruddin Sjamsuddin, *Op.cit* hal. 151

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 2

bentrokan bersenjata semakin meningkat, Kapolda Sumatera Utara Darwin Karim meminta bantuan Jakarta berupa tambahan pasukan Brimob sebanyak 8 kompi atau “perbantuan militer” di daerah Aceh Utara dan Tengah<sup>17</sup>. Sebaliknya, komandan TT 1/BB, Kolonel Maludin Simbolon mendesak Jakarta untuk menghentikan segala “perbantuan militer” & segera menetapkan daerah Aceh sebagai Daerah Darurat Perang<sup>18</sup>. Gubernur Sumatera Utara, Sutan Mohammad Amin Nasution menentang permintaan Kolonel Simbolon. Menurut Amin, menetapkan Aceh sebagai daerah darurat perang bukanlah solusi untuk memperbaiki situasi keamanan.

Pendapat Amin berkaca pada situasi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan yang ditetapkan dalam keadaan darurat sejak tahun 1950 tidak kunjung membaik. Menurut Amin, menetapkan daerah darurat perang memberikan anggapan bahwa situasi kondisi keamanan ketertiban tidak bisa dikendalikan<sup>19</sup>. Untuk meredam aksi huru-hara di Aceh, Jakarta melantik kembali Gubernur Aceh baru yakni Ali Hasjmy pada 7 Januari 1957, namun pelantikan gubernur tersebut tidak menurunkan tensi huru-hara di Aceh. Akhirnya Presiden Soekarno menetapkan Aceh sebagai Daerah Darurat Perang yang tertuang dalam surat keputusan no. 40/1957.

---

<sup>17</sup> Darwin Karim mengirim surat permintaan bantuan kepada Kepala Polisi Negara Komisaris Jenderal Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo di Mabes DKN (Djawatan Kepolisian Negara) Jakarta. Surat tersebut bertanggal 5 November 1955. Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1990) hal. 155

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 155

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 156

Kolonel Syamaun Gaharu diangkat sebagai Penguasa Militer Daerah Aceh oleh Menteri Pertahanan dalam surat keputusan yakni MP/4/222/57. Kemudian Kolonel Syamaun Gaharu oleh Presiden Soekarno diangkat sebagai Ketua Penguasa Perang Daerah Aceh dalam surat keputusan Presiden Republik Indonesia no.222/1957<sup>20</sup>. Setelah dilantik menjadi PPD (Penguasa Perang Daerah) Aceh, Kolonel Syamaun Gaharu segera bergerak dan berkomunikasi dengan para gerombolan DI/TII yang mendirikan basis di Pidie, Aceh Timur, Aceh Besar, dan Aceh Utara. Sementara situasi masih mencekam dan rakyat Aceh yang tidak tahu apa-apa dan tidak terlibat dalam gerakan DI/TII menjadi korban teror. Pada siang hari diteror oleh tentara pemerintah, waktu malam hari diteror oleh gerombolan gerakan DI/TII.

Operasi militer dalam menumpas gerakan DI/TII dilakukan serentak oleh 4 angkatan perang yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Angkatan Darat mengirim berbagai kesatuan resimen batalyon seperti Resimen V TT.II/Sriwijaya dibawah komando Letkol Maraden Panggabean<sup>21</sup> dibantu oleh Kapten Subroto dan Kapten Juhartono<sup>22</sup>. TT.IV/Diponegoro juga mengirim pasukan dari Batalyon 434 dan Batalyon 446<sup>23</sup>. Angkatan Udara mengirim pasukan Pasgat (sekarang Korpaskhasau) dan pesawat udara (jenis angkut dan bomber) untuk

---

<sup>20</sup>Rusdi Sufi dkk, *SEJARAH KOTAMADYA BANDA ACEH*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997)hal. 74

<sup>21</sup>kelak Maraden Panggabean menjadi KASAD ke-8 masa jabatan tahun 1967-1969 dan Panglima ABRI masa jabatan tahun 1973-1978

<sup>22</sup>*M. Panggabean: Jenderal dari Tano Batak*, (Jakarta: Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, 2011) hal. 78

<sup>23</sup>Ariwiadi, *GERAKAN OPERASI MILITER VII: Penjelesaian Peristiwa Atjeh*, (Jakarta: Mega Bookstore & Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, 1959) hal. 10



mendukung operasi militer. Pesawat angkut Dakota dari skuadron 2 dan pesawat bomber B-25 dari skuadron 1 Lanud Cililitan berangkat menuju Medan pada tahun 1954<sup>24</sup>.

Sementara dari Angkatan Kepolisian mengerahkan pasukan Brimob. Pada tahun 1955, pasukan Brimob yang bertugas di Aceh mencapai 12 kompi<sup>25</sup>. Angkatan Laut mengerahkan berbagai kapal perang bersiaga di sepanjang Selat Malaka untuk memblokade pesisir Aceh. Langkah memblokade dilakukan agar gerombolan DI/TII Aceh tidak bisa melakukan penyelundupan senjata dan komoditas yang akan dibarter secara ilegal<sup>26</sup>.

Usaha pendekatan secara persuasif yang dilakukan Kolonel Syamaun Gaharu mulai berhasil. Sebagian kelompok/faksi yang bergabung dalam DI/TII Aceh mulai bersedia berdialog dan berunding dengan pemerintah. Kolonel Syamaun Gaharu mulai berunding dan membuka dialog lewat dua orang penghubung yaitu Ayah Pawang Leman dan Ishak Amin. 2x pertemuan diadakan pada tanggal 5 dan 7 April 1957. Saat pertemuan tanggal 7 April 1957 berhasil menghasilkan Ikrar Lamteh<sup>27</sup>.

Ikrar Lamteh yang digelar pada 7 April 1957 di Desa Lamteh menghasilkan 3 poin penting, yaitu:

---

<sup>24</sup>*Sejarah Angkatan Udara Indonesia 1950-1959: Jilid II*, (Jakarta: Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, 2005) hal. 158

<sup>25</sup>Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1990) hal. 126

<sup>26</sup>The rebellion in Sumatra, U 1392/59 – C 46 – P4/PS9, 23 Februari 1959, Den Haag, Menteri Luar Negeri

<sup>27</sup> Rusdi Sufi dkk, *Op.cit*, hal. 75

- Tekad membangun kembali Aceh yang telah menjadi “puing”
- Gencatan senjata antara pihak TNI-AD dengan TII
- Tekad menyelesaikan pergolakan secara damai<sup>28</sup>

Sehari kemudian, Kolonel Syamaun Gaharu mengumumkan penghentian permusuhan antara pemerintah dengan gerakan DI/TII Aceh. Tanggal 19-25 Oktober 1957, rombongan kabinet PM Djuanda berkunjung dan meninjau perkembangan situasi kondisi Aceh. Meskipun situasi Aceh mulai terkendali, tetapi ada sebagian kelompok/faksi tidak setuju adanya Ikrar Lamteh. Sebagian kelompok/faksi yang tidak setuju membentuk Dewan Revolusi dibawah komando Hasan Saleh<sup>29</sup>. Hasan Saleh mengambil alih Wali Negara Tgk. Daud Beureueh tanggal 15 Maret 1959.

Adapun susunan Dewan Revolusi sebagai berikut:

- Perdana Menteri/Ketua Dewan Revolusi: Ayah Gani
- Panglima/Menhankam: Hasan Saleh
- Menteri Kemakmuran: Teuku Muhammad Amin
- Menteri Penerangan: A.G. Mutyara
- Ketua DPRS: Teungku Amir Husin Al Mujahid<sup>30</sup>

Kolonel Syamaun Gaharu segera mengkonsolidasi pasukan APRI/TNI-Brimob dan meminta bantuan kepada kesatuan RPKAD (sekarang Kopassus)

---

<sup>28</sup>H . Badruzzaman Ismail, S.H dkk, *Delapan Puluh Tahun Melalui Jalan Raya Dunia: A. Hasjmy Aset Sejarah Masa Kini dan Masa Depan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994), hal. 61

<sup>29</sup>Hasan Saleh merupakan perwira TNI-AD angkatan 45. Dia berhasil melaksanakan tugas saat masa revolusi kemerdekaan di Pulau Sumatra yakni di Kota Medan. Hasan Saleh berhasil merepotkan pasukan Belanda saat berusaha menguasai Kota Medan. Selain itu, Hasan Saleh sukses memimpin pasukannya di Batalyon 110 Seulawah Jantan dalam menumpas gerakan RMS (Republik Maluku Selatan)& DI/TII “cabang” Sulawesi pimpinan Kahar Muzakar

<sup>30</sup>H . Badruzzaman Ismail, S.H. dkk, *Op.cit*, hal. 61

yang kebetulan sedang bertugas di Medan. Sebanyak 1 peleton RPKAD dikirim menuju Kutaradja untuk memperkuat perimeter pertahanan Kutaradja. Pengiriman pasukan RPKAD ini sebagai *show of force* dan jika Dewan Revolusi tidak mundur, maka Kolonel Syamaun Gaharu akan mendatangkan pasukan RPKAD lebih banyak lagi<sup>31</sup>. Akhirnya Dewan Revolusi mundur kembali menuju basisnya di Sigli.

Untuk mengatasi aksi Dewan Revolusi yang bisa mengakibatkan kesepakatan Ikrar Lamteh terganggu, Jakarta lewat keputusan PM Djuanda membentuk suatu tim misi. Misinya adalah melakukan pendekatan secara persuasif dengan kelompok Dewan Revolusi. Atas usulan Ali Hasjmy, PM Djuanda menunjuk Mr. Hardi. Mr. Hardi adalah seorang kader PNI (Partai Nasional Indonesia) yang saat itu menjabat sebagai Waperdam I. Alasan Ali Hasjmy mengusulkan Mr. Hardi karena pengaruh PNI di istana dan parlemen sangat kuat sehingga bisa mendukung langkah-langkah yang diambil Mr. Hardi di Aceh<sup>32</sup>.

Pada tanggal 24 Mei 1959, digelar musyawarah yang dihadiri oleh tim Mr. Hardi, perwakilan daerah Aceh, dan Dewan Revolusi. Berikut daftar nama delegasi yang hadir dalam musyawarah damai:

Delegasi Tim Mr. Hardi:

- Letjend TNI Soeprayogi menjabat Menteri Stabilisasi Ekonomi

---

<sup>31</sup>Rusdi Sufi dkk, *Op.cit*, hal. 75

<sup>32</sup>H . Badruzzaman Ismail, S.H. dkk, *Op.cit*, hal 59

- Mayjend TNI Gatot Subroto menjabat Wakil KASAD
- Mr. Sutikno Slamet menjabat Menteri Keuangan
- Perwakilan pejabat tinggi seluruh departemen

Delegasi pejabat Aceh:

- Gubernur Ali Hasjmy
- Overste (Letkol) Teuku Hamzah menjabat Kepala Staf Kodam Aceh.  
Letkol Teuku Hamzah menggantikan posisi Kolonel Syamaun Gaharu saat mendapatkan tugas keluar negeri

Delegasi Dewan Revolusi:

- Ayah Gani sebagai Ketua Dewan Revolusi
- Kolonel Hasan Saleh sebagai Panglima TII
- Amir Husin Al Mujahid sebagai anggota
- Husni Yusuf sebagai anggota
- T.A Hasan sebagai anggota
- A. Gani Mutyara sebagai anggota<sup>33</sup>

Situasi musyawarah damai berlangsung panas dan alot. bahkan sampai esoknya tanggal 25 Mei 1959 belum ada jalan keluar yang sifatnya *win-win solution*. Bupati Aceh Besar Zaini Bakri ikut membantu Ali Hasjmy dengan terus melakukan *lobby* dan meyakinkan para delegasi Dewan Revolusi agar mau menerima tawaran dari Tim Misi Hardi. Karena sudah larut malam dan

---

<sup>33</sup>H . Badruzzaman Ismail, S.H, *Ibid*, hal. 60

lelah, Ali Hasjmy pulang ke pendopo Gubernur dan menyerahkan negosiasi lanjutan kepada Zaini Bakri.

Ali Hasjmy terus memantau perkembangan negosiasi dari pendopo gubernur lewat komunikasi telepon dengan Zaini Bakri. Akhirnya pukul 03.30 pagi tanggal 26 Mei 1959, Zaini Bakri menelpon Ali Hasjmy melaporkan bahwa Dewan Revolusi menerima tawaran pemerintah. Tawaran yang diterima yaitu Aceh menjadi daerah istimewa (Aceh berhak mengurus pendidikan agama, pendidikan umum, dan kebudayaan secara mandiri), rehabilitasi bagi warga Aceh yang bergabung dalam DI/TII dan bantuan dana sebesar 88,4 juta Rupiah<sup>34</sup>.

Peristiwa gerakan DI TII Aceh menjadi sorotan internasional seperti Belanda dan Singapura negara yang menyoroti pergolakan di Aceh. Meskipun sudah tidak menjadi daerah jajahan, Belanda masih memantau perkembangan situasi kondisi Indonesia. Salah satu bukti Belanda menyoroti pergolakan Aceh adalah diterbitkannya sebuah arsip. Arsip tersebut dimuat dalam berkas arsip Kementerian Perang Umum Kerajaan (AOK) dan Urusan Umum (AZ): Kantor Perdana Menteri (KMP) akses nomor 2.03.01, inventaris nomor 2385. Arsip tersebut berjudul “Rebellion in Sumatra”.

Arsip tersebut telah digitalisasi oleh lembaga penelitian Buro Jansen & Janssen. Lembaga penelitian Buro Jansen & Janssen merupakan lembaga yang mengumpulkan dan menerbitkan berbagai arsip untuk kepentingan penelitian, pengembangan dan analisa berbagai bidang seperti politik, hukum,

---

<sup>34</sup>H. Badruzzaman Ismail, S.H, *Ibid*, hal.65

keamanan, militer/pertahanan, dan kebijakan publik. Salah satu arsip tentang gerakan pemberontakan di Sumatera dirilis oleh lembaga ini

Selain arsip laporan negara asing, media cetak asing juga mengabarkan gerakan DI/TII pimpinan Daud Beureueh, salah satunya adalah *The Straits Times*. *The Straits Times* merupakan salah satu media cetak terbesar di Singapura yang meliput peristiwa pergolakan DI/TII Aceh. Pemberitaan pergolakan DI/TII Aceh dimulai pada 24 September 1953, tiga hari setelah “proklamasi” DI/TII Aceh. Berita tersebut berisi tentang pemerintah pusat yang mulai memerintahkan aparat tentara dan polisi untuk bergerak menegakkan keamanan ketertiban kembali dan PM Ali Sastroamidjop yang mulai berdiskusi dengan para pejabat pusat<sup>35</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Agar pembaca paham dalam memahami maksud yang diungkapkan oleh penulis, maka perlu membuat rumusan masalah. Gerakan DI/TII Aceh dalam sorotan media cetak Singapura dari sudut pandang surat kabar *The Straits Times*.

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis yaitu:

---

<sup>35</sup> <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19530924-1.2.21> “Crush revolt, Army ordered”, Koran *The Straits Times*, 24 September 1953

1. Bagaimana situasi kondisi Aceh sebelum dan saat terjadinya pergolakan DI/TII yang dipimpin oleh Daud Beureueh berlangsung ?
2. Bagaimana surat kabar *The Straits Times* mengabarkan tentang pergolakan DI/TII ?
3. Bagaimana perbedaan pemberitaan *The Straits Times* dengan narasi sejarah DI/TII Aceh yang ada ?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Perlunya pembatasan ruang lingkup spasial dan temporal dalam menulis sejarah agar terkonsentrasi tidak keluar dari tema yang akan diteliti. Periodisasi merupakan hal yang vital dalam menulis sejarah karena sebagai batas rentang waktu dalam penelitian. Untuk periodisasi, penulis memilih di tahun 1953-1960, karena pada waktu itulah gerakan DI/TII Aceh pimpinan Daud Beureueh terjadi dan surat kabar *The Straits Times* mulai mewartakan situasi Aceh saat pergolakan DI/TII berkobar.

Tahun 1953 menjadi awal periodisasi karena Daud Beureueh “memproklamasikan” gerakan DI/TII di tanah Aceh. Tahun 1960 menjadi akhir periodisasi gerakan DI/TII Aceh karena pemerintah pusat mulai merangkul kembali Daud Beureueh lewat berbagai musyawarah damai.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian *PERGOLAKAN DARUL ISLAM ACEH DALAM SOROTAN MEDIA CETAK SINGAPURA THE STRAITS TIMES TAHUN*

1953-1960 mempunyai tujuan sebagai berikut: pertama adalah mengetahui situasi kondisi Aceh saat gerakan DI/TII berlangsung. Kedua adalah mengetahui sudut pandang *The Straits Times* dalam menyoroti gerakan DI/TII Aceh pimpinan Daud Beureuh. Terakhir adalah mengetahui perbandingan pemberitaan *The Straits Times* dengan narasi sejarah yang ada tentang gerakan DI/TII Aceh.

Setelah penyampaian tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian *PERGOLAKAN DARUL ISLAM ACEH DALAM SOROTAN MEDIA CETAK SINGAPURA THE STRAITS TIMES TAHUN 1953-1960* sebagai berikut: pertama adalah menambah wawasan mengenai gambaran Aceh saat berkobarnya gerakan DI/TII Aceh. Kedua adalah menambah wawasan mengenai sudut pandang asing menyoroti gerakan DI/TII Aceh berlangsung. Terakhir adalah menambah wawasan mengenai perbandingan pemberitaan media asing dengan tulisan-tulisan sejarah tentang pergolakan DI/TII DI Aceh.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka digunakan untuk mencari sumber tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian, tahap mengumpulkan data untuk membantu penulis penelitian yang lebih dalam. Berikut beberapa sumber pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian:



Buku yang ditulis oleh C. Van Dijk dengan judul *Rebellion under the banner of Islam* pada tahun 1981 yang diterbitkan oleh KITLV berisi tentang penjelasan asal muasal gerakan DI TII yang didirikan oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat, kemudian menyebar ke berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Dijelaskan juga alasan-alasan masyarakat tertarik dan bergabung dengan DI TII

Buku yang ditulis oleh Chiara Formichi dengan judul *Islam and the making of the nation: Kartosuwiryo and Political Islam in 20th century Indonesia* pada tahun 2012 yang diterbitkan oleh KITLV berisi tentang penjelasan awal berdirinya Darul Islam oleh Kartosuwiryo, sepak terjang pergerakan politik islam (Masyumi dan Darul Islam) dibawah kuasa jajahan Belanda dan Jepang tahun 1930-1945, gesekan antara kaum islamis dengan kaum nasionalis dan kaum sosialis pasca kemerdekaan 1945, aksi pergolakan Darul Islam di berbagai daerah

Buku yang ditulis oleh Nazaruddin Sjamsudin dengan judul *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*. Buku ini diterbitkan oleh PT. Pustaka Utama Grafiti pada tahun 1990 berisi tentang perjalanan berkobarnya gerakan DI/TII yang dimulai dari dibubarkannya Provinsi Aceh oleh Jakarta, lalu bergabungnya Daud Beureueh dalam gerakan DI/TII, sikap dan tanggapan Jakarta soal gerakan DI/TII Aceh, dan penyelesaian secara damai di Aceh

Buku yang ditulis oleh Mawardi Umar dan Al Chaidar dengan judul *Darul Islam Aceh: Pemberontakan atau Pahlawan ?* yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi NAD pada tahun 2006 berisi tentang respon Aceh terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dan peristiwa Cumbok, persiapan rakyat Aceh menjelang gerakan DI/TII Aceh, dihapusnya Provinsi Aceh oleh Jakarta, meletusnya gerakan DI TII Aceh, operasi militer yang digelar Jakarta, dan terakhir musyawarah damai antara Jakarta dengan petinggi DI/TII

Buku yang ditulis oleh Dada Meuraxa dengan judul *Peristiwa berdarah di Aceh* yang diterbitkan oleh Pustaka Sedar pada tahun 1956 berisi tentang asal muasal orang Aceh, berdirinya kerajaan Islam di Aceh, Belanda berkuasa di Aceh, Jepang berkuasa di Aceh, berdirinya PUSA, terjadinya peristiwa Cumbok, peristiwa Aceh berdarah (gerakan DI/TII di Aceh, dan struktur organisasi pemerintahan DI/TII negara bagian Aceh)

Buku yang ditulis oleh M. Nur El Ibrahimy dengan judul *TGK.M.Daud Beureueh: Peranannya dalam pergolakan di Aceh* yang diterbitkan oleh PT. Gunung Agung pada tahun 1982 berisi tentang kronologi awal mula Darul Islam di Aceh, gelar operasi militer TNI menumpas gerakan DI/TII Aceh, perjalanan sepak terjang DI/TII Aceh, musyawarah damai, rekonsiliasi damai oleh Kodam I Iskandar Muda, dan yang terakhir Daud Beureueh diasingkan ke Jakarta

Buku yang ditulis oleh tim penulis Panitia Delapan Puluh Tahun A. Hasjmy dengan judul *Delapan puluh tahun melalui jalan raya dunia: A. Hasjmy aset sejarah masa kini dan masa depan* yang diterbitkan oleh PT. Bulan Bintang pada tahun 1994 berisi tentang perjalanan kehidupan seorang Prof. Ali Hasjmy (mantan gubernur Aceh kedua). Buku tersebut dipersembahkan kepada Prof. Ali Hasjmy oleh para sejawat, kolega dan keluarga

*Skripsi* yang ditulis oleh Khairul Ummami dengan judul Ali Hasjmy: Penyelesaian konflik Darul Islam Aceh tahun 1957-1959 di UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2017. Untuk memperkuat data dan pustaka penulis, maka skripsi ini diambil sebagai tinjauan pustaka. Skripsi ini berisi tentang usaha perdamaian oleh tokoh Ali Hasjmy (Gubernur Aceh yang dilantik presiden saat aksi DI/TII Aceh berkobar). Hal ini memudahkan penulis dalam menggali setting waktu akhir dekade 1950an menjelang musyawarah damai

*Skripsi* yang ditulis oleh Nis Ika Herwati dengan judul Pemberontakan DI/TII Aceh tahun 1953-1959 di Universitas Sanata Dharma pada tahun 2007. Untuk memperkuat data dan pustaka penulis, maka skripsi ini diambil sebagai tinjauan pustaka. Skripsi ini berisi tentang latar belakang terjadinya gerakan DI/TII Aceh, jalannya peristiwa gerakan DI/TII Aceh, dan dampak akibat dari gerakan DI/TII Aceh. Hal ini memudahkan dan menguatkan data penulis tentang perjalanan waktu berkobarnya gerakan DI/TII Aceh.

Adapun penulis menggunakan dua sumber tinjauan pustaka diatas adalah menambah sumber yang dibutuhkan penulis yang dikutip dari skripsi diatas. Perbedaan antara riset penulis dengan dua sumber skripsi diatas adalah sorotan pemberitaan media asing terhadap pergolakan DI/TII yang terjadi di Aceh tahun 1953-1960.

## **F. Landasan Konseptual**

Koran merupakan salah satu media massa tertulis. Dengan koran bisa mengetahui tentang berbagai peristiwa terjadi. Agar mudah dipahami pembaca, perlu adanya alat bantu yaitu ilmu komunikasi. Dalam penyampaian berita pasti terjadi perbedaan sudut pandang bagi penerima berita. Dalam penyampaian berita kepada khalayak atau masyarakat dibutuhkan ilmu komunikasi sebagai jembatan penghubung antara media dengan masyarakat. Dalam ilmu komunikasi terdapat ilmu analisis framing/analisis bingkai. Analisis framing adalah analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami & dibingkai oleh media, suatu sikap yang mendukung positif/negatif hanyalah efek & bingkai yang dikembangkan media.

Analisis framing menekankan pada pembentukan pesan dari teks berita. Terdapat tiga bagian berita yang menjadi sasaran framing yakni judul berita, inti berita, dan akhir berita. Dengan analisis framing bisa mengetahui perbedaan satu media dengan media yang lain menyingkap fakta.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang vital dalam sebuah penelitian. Maka dari itu penting sekali penelitian sejarah menggunakan metode sejarah. Penulis akan memaparkan berita surat kabar asing tentang gerakan DI/TII Aceh tahun 1953-1963. Terdapat lima tahapan dalam penelitian metode sejarah yang dijelaskan oleh Kuntowijoyo<sup>36</sup>, yaitu:

### 1. Pemilihan Topik

Langkah yang pertama adalah menentukan pendekatan untuk pemilihan topik. Terdapat 2 cara pendekatan yakni pendekatan emosional dan pendekatan intelektual. Penulis memilih pendekatan secara intelektual, belum ada penulisan tentang sudut pandang asing terhadap gerakan DI TII yang berkobar di Aceh

### 2. Pengumpulan Data

Langkah yang kedua adalah pengumpulan data. Penulis mengumpulkan berbagai sumber tulisan seperti buku, arsip surat kabar, dan foto. Penulis menemukan beberapa sumber berbentuk surat kabar asing dari koleksi *digital archive* yang sezaman dan berhubungan dengan judul seperti *The Straits Times* (1953-1960). Buku-buku lokal yang ditulis langsung oleh pelaku sejarah contohnya Dada Meuraxa

---

<sup>36</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hal. 69-82

(Peristiwa Berdarah di Aceh), Ali Hasjmy (80 Tahun Melalui Jalan Raya Dunia: Aset Sejarah Masa Kini dan Masa Depan)

### 3. Verifikasi

Langkah yang ketiga adalah verifikasi. Kritik pada sumber tulisan yang dikumpulkan. Tujuan dari verifikasi adalah untuk menguatkan sumber tulisan yang akan digunakan. Kuntowijoyo menyebutkan ada dua tahap jenis kritik sumber yakni kritik ekstren dan kritik intern. Kritik ekstern adalah kritik berupa memeriksa keaslian sumber yang diperoleh penulis. Kritik intern adalah kritik berupa memeriksa isi dokumen oleh penulis

### 4. Interpretasi (penafsiran)

Langkah yang keempat adalah Interpretasi. Kuntowijoyo menyebutkan ada dua macam interpretasi/penafsiran yakni analisis dan sintesis. Analisis adalah menguraikan sumber atau data yang akan digunakan. Sintesis adalah menyatukan data atau sumber yang akan digunakan

### 5. Historiografi (penulisan sejarah)

Langkah yang terakhir adalah penulisan sejarah atau historiografi yang dikerjakan oleh sejarawan dalam menulis hasil penelitian.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis membagi pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan berupa latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penelitian

BAB II: Menjelaskan tentang situasi kondisi Aceh menjelang berkobarnya gerakan DI/TII, situasi kondisi Aceh pasca “proklamasi” DI/TII,

BAB III: Menjelaskan tentang pemberitaan media dan laporan surat-menyurat asing terhadap gerakan DI/TII Aceh pimpinan Daud Beureueh, berbagai arsip laporan dari negara asing terhadap gerakan DI/TII Aceh

BAB IV: Menjelaskan tentang perbandingan pemberitaan media asing dengan media dalam negeri terhadap gerakan DI/TII Aceh, tujuan dan motif asing mengabarkan berita gerakan DI/TII Aceh

BAB V: Bab sebagai penutup, tentang saran dan kesimpulan atas jawaban rumusan masalah yang telah dijelaskan bab sebelumnya

## **BAB II**

### **MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN DAN PERGOLAKAN di ACEH**

#### **A. Daud Beureueh dan perjuangan rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan RI**

Pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan, para tokoh perjuangan di Jakarta mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Berita proklamasi kemerdekaan mulai tersebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Aceh. Kabar berita proklamasi di Aceh baru diterima oleh para pegawai kantor radio Domei Kutaraja pada hari yang sama. Berita proklamasi tersebut oleh para pegawai Domei diteruskan kepada pegawai kantor koran *Atjeh Shimbun* dan kantor dinas penerangan *Hodoka*. Meskipun saat itu Jepang berusaha menyembunyikan berita proklamasi, pada 18 Agustus 1945 seorang direktur pengawas koran *Shimbun* dari Jepang, K. Yamada juga memberitahukan kabar proklamasi kendati para pegawai sudah mengetahui kabar proklamasi dari kantor radio *Domei*<sup>37</sup>.

Kemudian pada tanggal 21 Agustus 1945, para pegawai radio Domei diantaranya Armyn, Amiruddin, Ghazali Yunus, dan Bustami menghadap dan memberitahukan kepada Teuku Nyak Arif<sup>38</sup> (menjabat sebagai ketua Aceh Syiu Sangikai atau yang disebut DPRD Aceh<sup>39</sup>) bahwa proklamasi kemerdekaan telah berkumandang. Pada tanggal 27 Agustus 1945 di salah

---

<sup>37</sup> Rusdi Sufi dkk, *Sejarah Kotamadya Banda Aceh*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997) hal. 63

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 63

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 54



satu kamar hotel Sentral Kutaraja, para mantan perwira tentara Aceh didikan Jepang berkumpul secara diam-diam membahas pembentukan suatu organisasi pengawal dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Aceh. Syamaun Gaharu, Bachtiar Idham, Usman Nyak Gade, Nyak Neh Rika, Sahid Usman, Teuku Hamid Azwar dan lainnya merupakan tokoh yang berkumpul membahas pembentukan organisasi tersebut<sup>40</sup>.

Dalam pertemuan tersebut menghasilkan suatu kesepakatan yakni Syamaun Gaharu dan Teuku Hamid Azwar akan menemui Teuku Nyak Arif untuk meminta pendapat tentang pembentukan semacam organisasi pengawal dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Aceh. Karena Teuku Nyak Arif merupakan ketua Syiu Sangikai (DPRD Aceh) dan tokoh intelektual, maka selalu dimintai pendapat oleh masyarakat Aceh. Pertemuan dilaksanakan dan Teuku Nyak Arif menyambut usulan tersebut. Kemudian Teuku Nyak Arif memerintahkan kedua utusan ini untuk mengumpulkan para pemuda yang pernah masuk dinas atau ikut pendidikan militer seperti KNIL, PETA, Heiho, Gyugun dll untuk membentuk organisasi API (Angkatan Pemuda Indonesia)<sup>41</sup>.

API mulai resmi berdiri pada awal Oktober 1945 yang dipimpin oleh Syamaun Gaharu. Organisasi API terdiri dari 5 bagian:

---

<sup>40</sup> Drs. Muhammad Ibrahim dkk, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta: Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 1983) hal. 67

<sup>41</sup>Dr. T. Ibrahim Alfian. M.A. dkk, *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945-1949)* (Banda Aceh: Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 1982) hal. 44

1. Markas utama yang selalu berpindah-pindah. Awalnya berada di Hotel Sentral, pindah ke toko J. Pinke Ujung Peunayong, pindah lagi ke toko B. Naas, bergeser lagi ke asrama Kuta Alam dan terakhir di asrama keraton. Markas utama dipimpin Syamaun Gaharu
2. Markas daerah Aceh Besar & Pidie dipimpin oleh Nyak Neh
3. Markas daerah Aceh Utara & Tengah dipimpin oleh T.M. Syah
4. Markas daerah Aceh Timur dipimpin oleh Bachtiar
5. Markas daerah Aceh Barat dan Selatan dipimpin oleh Tjut Rachman<sup>42</sup>.

Merasa situasi Kutaraja pasca menyebarnya berita proklamasi tidak menentu, tanggal 23 Agustus 1945 *Tyokan* (Residen) S. Lino memanggil para tokoh masyarakat Aceh diantaranya: Daud Beureueh, Teuku Nyak Arif, Said Abubakar, Teuku Ahmad Danu, Teuku Panglima Polem Mohd. Ali di rumah pendopo Residen Kutaraja. S. Lino menjelaskan situasi Aceh dan posisi Jepang dalam perang Pasifik tetapi tidak menyinggung proklamasi kemerdekaan. Inti dari hasil pertemuan tersebut mengajak bersama para tokoh menjaga keamanan ketertiban Aceh. Karena pertemuan bersifat tertutup dan dihadiri terbatas, maka *Tyokan* S. Lino diminta mengeluarkan sebuah maklumat. Maklumat tersebut keluar dua hari kemudian yang bertujuan agar seluruh khalayak/masyarakat Aceh mengetahui hasil pertemuan tersebut<sup>43</sup>.

Sehari sebelumnya 24 Agustus 1945, Teuku Nyak Arif keliling kota Kutaraja dengan mobil pribadi yang telah terpasang bendera merah putih. Hal

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 45

<sup>43</sup> Drs. Muhammad Ibrahim dkk, *Op.cit*, hal. 53

ini dilakukan agar warga Aceh yang belum mengetahui berita proklamasi menjadi tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Malam harinya, 3 warga Aceh secara nekat mengibarkan bendera merah putih di kantor polisi Kutaraja. Aparat keamanan dari Jepang hanya bisa melihat dan tidak dapat berbuat banyak atas aksi tersebut<sup>44</sup>. Tanggal 25 Agustus 1945, seluruh pegawai gunseibu (kantor koordinator pemerintahan militer) baik dari Aceh maupun dari Jepang berkumpul di aula karesidenan mendengarkan pengumuman maklumat dari *Soematera Saikosikikan Kakka* (komando militer tertinggi) yang dibacakan oleh residen<sup>45</sup>.

Isi dari maklumat tersebut bahwa perang Asia Timur Raya sudah berakhir dan Kekaisaran Jepang setuju melakukan perundingan damai dengan Amerika Serikat, Inggris, Uni Sovyet, dan China. Juga ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada rakyat Aceh atas segala bantuan dan kerjasama selama ini<sup>46</sup>. Setelah berita proklamasi dan kekalahan Jepang tersebar luas di Aceh, timbul pertanyaan dari rakyat Aceh “siapa yang akan datang lagi ke Indonesia? apakah Belanda datang kembali? atau Amerika Serikat/Inggris/Australia/China?”. Bahkan warga Tionghoa di Aceh bersiap menyambut pasukan Ciang Kai Sek (pemimpin partai nasionalis China)<sup>47</sup>. Pada tanggal 3 Oktober 1945, pemerintahan Republik Indonesia baru resmi didirikan setelah gubernur Sumatera mengeluarkan sebuah pengumuman

---

<sup>44</sup> Rusdi Sufi dkk, *Op.cit.*, hal. 64

<sup>45</sup> Dr. T. Ibrahim Alfian. M.A. dkk, *Op.cit.*, hal. 30

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 30

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 31

bahwa seluruh staf dan residen gubernur mulai bekerja atas perintah dari presiden negara Republik Indonesia<sup>48</sup>.

10 hari kemudian, pada 13 Oktober 1945, diumumkan bahwa Teuku Nyak Arif diangkat sebagai residen Aceh. Kemudian penduduk diperintahkan mengibarkan bendera merah putih sampai tanggal 17 Oktober 1945<sup>49</sup>. Sehari sebelumnya, 12 Oktober 1945 seluruh organisasi pengawal kemerdekaan yang sudah berdiri seperti BRI (Barisan Republik Indonesia), BPRI (Barisan Pemuda Republik Indonesia), Pemuda PUSA, dan BKR (Badan Keamanan Rakyat) dengan latar belakang anggota pemuda yang pernah mendapatkan didikan militer seperti KNIL, PETA, Heiho, Gyugun dsb dilebur menjadi satu yaitu TKR (Tentara Keamanan Rakyat) lalu berubah menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia). Keberadaan organisasi diatas sangat dibutuhkan untuk merebut berbagai peralatan dan instalasi seperti gudang senjata, tangsi markas militer, stasiun kereta api, kantor pos, gudang percetakan, instalasi komunikasi, listrik, air minum dsb<sup>50</sup>. Tanggal 15 Oktober 1945, pemerintah kolonial Jepang di Aceh menyerahkan tanggung jawab kekuasaan dan pelucutan senjata kepada perwakilan pemerintah Indonesia di Kutaraja dengan pengawalan ketat dari personel API berkekuatan 2<sup>51</sup> kompi<sup>52</sup>.

Ketika semua unsur melakukan konsolidasi dan mempersatukan kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan, terjadi konflik internal di Aceh. Kaum

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 36

<sup>49</sup> Rusdi Sufi dkk, *Op.cit.*, hal. 65

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 66

<sup>51</sup> Umumnya, dalam militer kekuatan 1 kompi diisi 50 personel atau bisa kurang bahkan lebih tergantung kebutuhan di lapangan

<sup>52</sup> Rusdi Sufi, *Ibid*, hal. 66

uleebalang bergesekan dengan kaum revolusioner bersama kaum PUSA. Kaum uleebalang yang tradisional tidak suka atas ambisi kaum revolusioner yang ingin mendominasi pasca Jepang angkat kaki dari Aceh. Kaum revolusioner ini mengambil jalan militeristik untuk merebut kekuasaan di Aceh. Untuk menandingi kaum revolusioner yang sudah mendirikan organisasi seperti BPI dan PRI, sebagian kaum uleebalang yang bersedia dan mau melawan kaum revolusioner berkumpul dan membentuk laskar BPK (Barisan Penjaga Keamanan) dan Perhimpunan Indonesia yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Daud Cumbok<sup>53</sup>.

Beberapa kali terjadi bentrokan bersenjata antara BPK dengan BPI/PRI. Pada tanggal 3 November 1945, BPK menyergap anggota PRI. 5 hari kemudian, 8 November 1945 markas PRI diduduki oleh BPK di Lameulo, Pidie. Terjadi lagi pada awal Desember 1945 bentrokan bersenjata tetapi lebih besar antara BPK dengan PRI. Bentrokan tersebut membuat KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) Aceh dan TKR (Tentara Keamanan Rakyat yang kelak menjadi TNI) turun tangan mendamaikan kedua pihak dengan mengirim perwakilan/utusan<sup>54</sup>.

Pertimbangan KNID untuk turun tangan mengingat PRI adalah organisasi laskar revolusioner terbesar dan terkuat di Aceh berjaga-jaga akan terjadinya

---

<sup>53</sup> BPK berpusat di Lameulo dibawah pimpinan adik Teuku Muhammad Daud Cumbok yaitu Teuku Mahmud, sedangkan Perhimpunan Indonesia direncanakan tidak bersifat lokal tetapi meliputi seluruh Aceh di bawah Teuku Cut Hasan berkedudukan di Kutaraja. Organisasi terakhir tidak berkembang karena sekali lagi tidak mendapat restu dari beberapa uleebalang terkemuka yaitu Teuku Chiek Muhammad Johan Alamsyah Peusangan dan Teuku Muhammad Daudsyah Idi. Dr. T. Ibrahim Alfian. M.A. dkk, *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945-1949)* (Banda Aceh: Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 1982) hal. 68

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 69

aksi balas dendam. Ketika situasi panas belum mereda, muncul gosip bahwa uleebalang mempersiapkan sebuah panitia untuk menyambut kedatangan tentara Belanda. Tim panitia tersebut disebut *Comite Van Ontvangst*. Pihak laskar revolusioner memanfaatkan gosip tersebut untuk memojokkan kaum uleebalang<sup>55</sup>. Setelah menduduki markas PRI, tanggal 25 November 1945 BPK segera bergerak ke Sigli untuk merebut persenjataan tentara Jepang yang akan meninggalkan Aceh.

Kelompok PRI tidak tinggal diam mengetahui BPK akan merebut persenjataan dan segera bergerak menuju Sigli. Saling merebut senjata kedua belah pihak membuat pemerintah kolonial Jepang ragu-ragu akan kemampuan pemerintahan republik dalam menegakkan keamanan ketertiban. TKR (kelak menjadi TNI) menawarkan agar persenjataan milik tentara Jepang diserahkan kepada pemerintah republik. Pemerintah kolonial Jepang menolak tawaran tersebut dengan alasan masih terikat perjanjian dengan Sekutu. Ternyata pemerintah kolonial Jepang malah menyerahkan persenjataan kepada BPK.

Bentrokan bersenjata tak bisa terhindarkan antara PRI dengan BPK pada awal Desember 1945. Pada tanggal 6 Desember 1945, TKR segera bergerak dan memerintahkan kedua belah pihak menghentikan tembak menembak.

---

<sup>55</sup> Kebenaran tuduhan itu masih diragukan dan memerlukan penelitian yang mendalam. Sebab literatur mengenai gerakan Cumbok di Aceh selama ini amat berat sebelah. Karangan mengenai peristiwa Cumbok ini pada umumnya ditulis oleh lawan mereka, yang sangat subyektif dan sepihak. Selain itu terdapat juga penulis yang agak netral seperti Mr. S. M. Amin, tetapi pada masa itu ia mempunyai aliansi politik dengan kelompok revolusioner. Menarik untuk dikonfrontir bagaimana pernyataan antara Teuku Cut Hasan dan Teuku Mahmud dengan Mr. T.M. Hasan Gubernur Sumatra sewaktu berkunjung ke Sigli 9-1 2 Desember 1945, yang menyatakan bahwa mereka (gerakan Cumbok) memiliki juga lencana merah putih. Dr. T. Ibrahim Alfian. M.A. dkk, *Ibid*, hal. 69

Selain itu, PRI dan BPK harus keluar dari Sigli dan segera menyerahkan berbagai persenjataan kepada TKR. Untuk urusan keamanan menjadi tanggung jawab TKR<sup>56</sup>. Meskipun ada kesepakatan bersama, kondisi masih mencekam dan tensi panas.

Tanggal 10 Desember 1945, BPK melakukan konsolidasi di rumah Teuku Laksamana Umar di desa Luengputu, Pidie Jaya. Hasil dari konsolidasi tersebut adalah BPK akan melakukan tindakan lebih jauh seperti pembunuhan bagi siapapun yang menghalangi BPK<sup>57</sup>. Tanggal 16 Desember 1945, BPK menyerang dengan berbagai persenjataan berat (tidak semua persenjataan BPK yang disembunyikan di markas Uleebalang diserahkan kepada TKR<sup>58</sup>) perkampungan desa Luengputu dan Meutareum yang diduga sebagai basis kaum revolusioner. Tanggal 20 Desember 1945, BPK bergerak menuju Tieteu, Pidie membakar berbagai fasilitas umum seperti sekolah dan kantor kehakiman. Tanggal 22 Desember 1945 kaum revolusioner pemuda, ulama dan rakyat yang kontra dengan uleebalang bersatu menghimpun kekuatan membentuk organisasi MBRU (Markas Besar Rakyat Umum) di Gampong Garut lalu pindah ke Sigli<sup>59</sup>.

Kaum uleebalang dengan organisasi BPK semakin ofensif menyerang kaum revolusioner. Tanggal 30-31 Desember 1945, BPK menyerbu desa Meutereum, Langga, Ilot dan Lala. Akibat dari penyerbuan tersebut,

---

<sup>56</sup> Dr. T. Ibrahim Alfian. M.A. dkk, *Ibid*, hal. 70

<sup>57</sup> Drs. Muhammad Ibrahim dkk, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta: Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 1983), hal. 94

<sup>58</sup> Dr. T. Ibrahim Alfian. M.A. dkk, *Op.cit*, hal. 71

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 71

permukiman warga setempat rusak berat<sup>60</sup>. Aksi saling membalas kedua pihak BPK dengan PRI dan sebaliknya, juga ancaman dari luar (kedatangan NICA) membuat unsur pemerintah daerah Aceh mengambil tindakan. Badan koordinator militer MUPPRDA (Markas Umum Perjuangan dan Pertahanan Rakyat Daerah Aceh) menggelar sidang pertama pada 6 Januari 1945 membahas situasi Aceh di Pidie.

Tanggal 8 Januari 1946, menggelar sidang kedua yang membahas berbagai laporan dari berbagai pihak seperti Mujahidin (diwakili Daud Beureueh), Pesindo (diwakili Ali Hasjmy), PNI (yang diwakili Ismail Yakob), TKR (diwakili Husein Yusuf dan Teuku Muhammad Syah) dan menghasilkan suatu maklumat dan peringatan kepada kaum Uleebalang di Lameulo. Maklumat tersebut isinya adalah kelompok yang melakukan aksi huru-hara di Cumbok, Lameulo, dan tempat yang lain dalam lingkup wilayah Pidie dianggap sebagai “musuh negara Republik Indonesia”. Selain itu bagi warga yang terpengaruh kaum uleebalang segera menjauhi dan yang ikut aksi huru-hara akan ditangkap dan dihukum sesuai kesalahannya. Untuk isi peringatannya adalah kelompok yang dianggap sebagai musuh negara Republik Indonesia, mulai hari Kamis 10 Januari 1946 pukul 12.00 segera menyerahkan diri dan jika tidak diindahkan maka akan ditindak tegas. Pernyataan maklumat dan ultimatum ditandangi oleh wakil Residen Aceh

---

<sup>60</sup> Drs. Muhammad Ibrahim dkk, *Op.cit.*, hal. 95



Teuku Panglima Polem Mohammad Ali dan ketua MUPPRDA Syamaun Gaharu<sup>61</sup>.

Maklumat dan ultimatum ternyata tidak direspon oleh kaum uleebalang/BPK. Ada 2 pertimbangan kaum uleebalang yang tidak merespon maklumat dan ultimatum dari pemerintah daerah. Pertama adalah persenjataan kaum uleebalang lebih baik dan lengkap daripada persenjataan TKR. Kedua jika kaum uleebalang tertangkap akan dihadapkan dengan pengadilan revolusi. Lebih baik mati bertempur daripada mati karena pengadilan revolusi<sup>62</sup>.

Akhirnya pemerintah daerah Aceh bertindak tegas terhadap kaum uleebalang. Pasukan TKR dan unsur Kepolisian dikerahkan dan berbagai pasukan dari unsur laskar yang dibawah komando MBRU juga diturunkan<sup>63</sup>. Pertempuran hebat terjadi di Cumbok pada 13-16 Januari 1946<sup>64</sup> antara pasukan gabungan TKR, Kepolisian dan unsur MBRU berhadapan dengan BPK. Karena pertempuran tidak seimbang, BPK menyerah. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti aksi balas dendam, aksi koboi dsb, tanggal 16 Januari 1946 MBRU mengeluarkan maklumat yaitu:

1. bahwa semua senjata api yang berasal dari rampasan BPK harus dikembalikan kepada markas MBRU
2. Markas Uleebalang berhasil dikuasai oleh TKR dan masyarakat tetap tenang

---

<sup>61</sup> Dr. T. Ibrahim Alfian. M.A. dkk, *Op.cit* hal. 73

<sup>62</sup> *Ibid*, hal. 74

<sup>63</sup> *Ibid*, hal. 74

<sup>64</sup> Rusdi Sufi, *Op.cit*, hal. 68

3. Masyarakat dilarang melakukan perampasan dan penggelapan harta para kaum uleebalang yang kalah<sup>65</sup>.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kaum uleebalang mengalami kekalahan, antara lain:

1. Kaum uleebalang di seluruh tanah Aceh tidak kompak satu suara dalam menyikapi kemerdekaan Indonesia, akibatnya gerakan uleebalang di Cumbok yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Daud Cumbok tidak mendapatkan dukungan
2. Kaum laskar revolusioner berhasil dan sukses memanfaatkan simbol keagamaan dan kemerdekaan untuk menarik perhatian dukungan rakyat Aceh. Laskar revolusioner kerap mengeluarkan tentang fatwa kemerdekaan. Ketika uleebalang menyerbu kaum ulama yang kontra terhadap uleebalang dan membakar fasilitas umum seperti masjid dan sekolah, semakin menambah simpati rakyat kepada laskar revolusioner
3. Keberhasilan laskar revolusioner mempengaruhi publik Aceh lewat media koran *Semangat Merdeka*. Koran *Semangat Merdeka* dikelola oleh laskar revolusioner<sup>66</sup>
4. Karena 2 faktor diatas membuat pengaruh laskar revolusioner berhasil menembus lingkaran lingkungan perwira militer TRI

Setelah perang saudara Cumbok usai, Aceh diguncang lagi huru-hara.

Pada 1 Maret 1946, gerombolan pasukan bersenjata tiba di Kutaraja dengan

---

<sup>65</sup> Anwar Daud & Husaini Husda, '*Serial Konflik Aceh dari Masa ke Masa*' Aceh dari konflik ke damai: *Peristiwa Cumbok di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Prov. NAD, 2006) hal. 3

<sup>66</sup> Dr. T. Ibrahim Alfian. M.A. dkk, *Op.cit*, hal. 76

50 unit kendaraan truk dan kereta api. Gerombolan pasukan tersebut menamakan diri sebagai TPR (Tentara Perjuangan Rakyat). Kedatangan pasukan TPR tersebut dipimpin oleh Amir Husin Al Mujahid. TPR menuntut Teuku Nyak Arif mundur dari jabatan Residen Aceh dan menuntut Syamaun Gaharu juga Teuku Hamid Azwar mundur dari jabatan pimpinan TRI daerah Aceh.

Amir Husin Al Mujahid sebelumnya menduduki ketua pemuda PUSA. Karena harapan terlalu tinggi yang menyebabkan kekecewaan berat terhadap operasi Cumbok, maka Amir Husin Al Mujahid membentuk TPR pada bulan Januari 1946 di Idie. Amir Husin Al Mujahid memandang masih ada para pejabat residen yang harus dibersihkan secara revolusioner<sup>67</sup>. Demi situasi Aceh agar tidak ada pertumpahan darah lagi, Teuku Nyak Arif bersedia mundur dari jabatan residen<sup>68</sup>. TPR segera bergerak membersihkan para pejabat yang dianggap feodal.

TPR menyasar daerah Aceh Timur dan segera mencopot kaum uleebalang seperti Teuku Abdullah Paloh, Teuku Ali Basyah, Teungku Arifin, Teungku Sulong yang menjabat sebagai *zelfbesturder* (wedana), kontrolleur (patih), dan asisten residen<sup>69</sup>. TPR menyadari bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menguasai seluruh Aceh. Untuk memuluskan aksi menguasai Aceh, Amir Husin Al Mujahid secara diam-diam bekerja sama dengan Mayor Husin Yusuf yang menjabat sebagai staf dan ajudan Divisi ke-5 TRI Bireun.

---

<sup>67</sup> Dr. T. Ibrahim Alfian. M.A. dkk, *Op.cit*, hal. 77

<sup>68</sup> Rusdi Sufi, *Op.cit*, hal. 69

<sup>69</sup> Anwar Daud & Husaini Husda, *Op.cit*, hal. 75

Ternyata Mayor Husin Yusuf juga memiliki ambisi yang sama seperti Amir Husin Al Mujahid<sup>70</sup>.

Setahun kemudian, pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan serangan agresi militer I. Seluruh wilayah Aceh tidak dikuasai oleh Belanda kecuali kota Sabang, Pulau Weh. Pasukan gabungan TRI di Aceh memang membiarkan Sabang dikuasai Belanda karena berkonsentrasi mempertahankan Medan dan Kutaraja. Selain itu, didukung persenjataan TRI sangat lengkap hasil dari rampasan Jepang. Kota Medan menjadi perhatian TRI karena menjadi pintu masuk menuju Aceh. Jika Medan jatuh ke tangan Belanda, maka Belanda lebih mudah masuk ke Aceh<sup>71</sup>.

Hampir setahun kemudian, pada 10 Maret 1948 rombongan delegasi KTN (Komisi Tiga Negara) berkunjung ke Kutaraja bertemu dengan gubernur militer Aceh-Tanah Karo-Langkat yakni Daud Beureueh<sup>72</sup>.

#### **B. Menjelang aksi pemberontakan 21 September 1953**

Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua di Yogyakarta. Esoknya pada 19 Desember 1948, seluruh pejabat pemerintah Indonesia ditangkap termasuk Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, dan Menteri Luar Negeri Agus Salim<sup>73</sup>. Dengan adanya aksi menyerbu langsung ke ibukota Yogyakarta dan penangkapan para pejabat Indonesia, Belanda menganggap eksistensi Indonesia sudah tamat dan selesai. Namun

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hal. 75

<sup>71</sup> Rusdi Sufi, *Op. cit*, hal. 69

<sup>72</sup> Dr. T. Ibrahim Alfian. M.A. dkk, *Op.cit*, hal. 97

<sup>73</sup> M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007) hal. 462

hal ini sudah diantisipasi oleh Presiden dan Wakil Presiden yang memutuskan memberikan mandat kekuasaan kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat pasca rapat kabinet darurat tepat beberapa jam sebelum ditangkap tentara Belanda lewat kawat telegram. Sjafroeddin Prawiranegara saat itu sedang kunjungan kerja ke Bukittinggi mengadakan rapat dadakan pada sore hari 19 Desember 1948<sup>74</sup>.

Selama 8 bulan berjalan (Desember 1948 – Juli 1949) peran PDRI sangatlah penting dan krusial dalam masa revolusi kemerdekaan. PDRI sebagai koordinator perjuangan antar pulau Jawa dengan Sumatera dan sebagai corong kabar perjuangan Indonesia ke dunia internasional<sup>75</sup>. Dalam kurun waktu 8 bulan, PDRI juga mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan memperlancar jalannya roda pemerintahan. Pada 16 Mei 1949, PDRI memutuskan seluruh aktivitas pemerintahan sipil dan militer dibawah kekuasaan gubernur militer (keputusan No.21/Pem/PDRI tanggal 16/5/1949)<sup>76</sup>. Esoknya, PDRI mengumumkan keputusan lagi bahwa Sumatera Utara dibagi menjadi dua daerah militer (keputusan No.22/Pem/PDRI tanggal 17/5/1949). Daerah Militer Aceh meliputi seluruh wilayah Aceh ditambah Tanah Karo dan Langkat. Jabatan gubernur militer

---

<sup>74</sup> Mestika Zed, *PDRI sebagai sumber pembelajaran TT hari belanegara: refleksi dan tindakan* (Makalah Pengantar untuk Seminar Sehari Dalam Rangka Peringatan PDRI, Hari Bela Negara 2010) (Padang: Fakultas Ilmu Sosial UNP, 2010) hal. 3

<sup>75</sup> *Ibid*, hal. 3

<sup>76</sup> Rusdi Sufi dkk, *Sejarah Kotamadya Banda Aceh*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997) hal. 72

dipegang oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh yang berpusat di Kutaraja<sup>77</sup>.

Setelah perjanjian KMB usai dilakukan dan penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia 27 Desember 1949, otomatis perundang-undangan PDRI tidak berlaku lagi. Sjafroeddin Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan ditunjuk sebagai utusan Jakarta untuk mengurus permasalahan di pulau Sumatera berjanji akan mempertahankan status Aceh sebagai provinsi sendiri. Janji tersebut diucapkan karena Sjafroeddin terus didesak dan ditekan oleh para tokoh masyarakat Aceh. Atas persetujuan Moh. Hatta (menjabat sebagai Perdana Menteri RIS), janji tersebut direalisasikan dengan penghapusan daerah militer dan jabatan gubernur militer Aceh. Mulai 1 Januari 1950, provinsi Aceh (tanpa daerah Tanah Karo dan Langkat) mulai berdiri<sup>78</sup>.

Janji yang dipenuhi oleh Sjafroeddin mulai mendapat tentangan pemerintah negara bagian RI yang beribukota Yogyakarta. Abdul Halim sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia (saat itu Indonesia berbentuk serikat dan daerah Aceh masuk dalam negara bagian Republik Indonesia) tidak hadir atau mengirim perwakilan pejabat untuk hadir di pelantikan Daud Beureueh sebagai gubernur Aceh pada 30 Januari 1950<sup>79</sup>. Menurut Yogyakarta, apa yang dilakukan oleh Sjafroeddin adalah perbuatan

---

<sup>77</sup>*Ibid* hal. 72

<sup>78</sup> Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1990) hal. 35

<sup>79</sup> *Ibid*, hal. 35

inkonstitusional. Dianggap inkonstitusional karena mengubah struktur negara. Para pejabat daerah di Sumatera Utara juga menentang pembentukan provinsi Aceh.

Sjafroeddin dianggap tidak berdiskusi terlebih dahulu dengan Medan (Gubernur SM. Amin dan DPRD Sumatera Utara). Medan menganggap pembentukan provinsi baru Aceh dilakukan untuk mengabdikan kepentingan segelintir pimpinan tertentu di Aceh. Anggapan pembentukan provinsi baru demi kepentingan segelintir pimpinan tertentu ini dibantah oleh para tokoh Aceh. Para tokoh Aceh ini kemudian menggelar konferensi Majelis Ifta Daerah Aceh di Kutaraja pada 15-16 Februari 1950. Fungsi sementara dari Majelis Ifta sebagai badan “penasehat” pemerintah daerah Aceh bidang keagamaan dan Hasballah Indrapuri diangkat sebagai ketua Majelis<sup>80</sup>.

Para peserta konferensi Majelis Ifta sepakat dalam sebuah resolusi bahwa Aceh mempunyai warisan sejarah, adat, budaya dan sosial yang berbeda dengan daerah Sumatera lainnya. Selain itu semenjak kehadiran kolonialisme Belanda, Aceh didominasi oleh orang-orang dari Sumatera Timur yang notabene dulu dikuasai oleh para Sultan kerajaan Aceh. Hal ini menimbulkan ikatan emosional tinggi dan secara psikologis Aceh tidak mau lagi dibawah kekuasaan Sumatera Timur. Resolusi inilah sebagai jawaban atas anggapan

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hal. 38

dari Medan bahwa pembentukan provinsi baru Aceh dilakukan oleh segelintir pimpinan tertentu<sup>81</sup>.

Meskipun menentang pendirian provinsi Aceh, secara tidak langsung PM Halim mengakui *status quo* berdirinya provinsi Aceh karena tidak pernah mengeluarkan tentangan secara tertulis resmi (*de jure*) dan membiarkan aktivitas administrasi provinsi Aceh berjalan seperti biasa (*de facto*). Hal ini terjadi karena Yogyakarta menganggap ada pekerjaan yang lebih mendesak daripada permasalahan Aceh. Sementara Jakarta (pusat pemerintahan RIS) tidak terlalu ikut campur permasalahan pembentukan provinsi Aceh karena Aceh masuk dalam negara bagian Republik Indonesia dan menjadi masalah internal. Sampai akhirnya Yogyakarta mengirim tim investigasi ke Kutaraja yang dipimpin oleh mendagri Mr. Susanto Tirtoprodjo pada bulan Maret 1950. Susanto menyatakan bahwa Yogyakarta belum memutuskan tentang permasalahan provinsi baru Aceh karena membutuhkan lebih banyak fakta di lapangan<sup>82</sup>.

Pada tanggal 19 Mei 1950, bentuk negara Indonesia berubah menjadi negara kesatuan dari federal setelah serangkaian kesepakatan bersama antara negara bagian Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Kemudian tanggal 15 Agustus 1950 Mr. Asaat

---

<sup>81</sup> Resolusi ini kemudian ditandatangani oleh Hasballah Indrapuri di Kutaraja tanggal 16 Februari 1950. *Ibid*, hal. 40

<sup>82</sup> Cornelis Van Dijk, *Rebellion Under the Banner of Islam: The Darul Islam In Indonesia*, (Den Haag: Martinus Nijhoff Publishers, 1981) hal. 290



menyerahkan jabatan Presiden RI kepada Soekarno di Yogyakarta<sup>83</sup>. Otomatis semua urusan pemerintahan diambil alih Jakarta. Tanggal 25 Juli 1950, Jakarta menetapkan 10 provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil) yang akan berdiri dan seminggu kemudian pada 1 Agustus 1950 membentuk P4SU (Panitia Penyelenggaraan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara). P4SU dipimpin oleh R. Sarimin Reksodihardjo (Jawa) dengan anggotanya Binanga Siregar (Mandailing), Teuku Daudsjah (Aceh), dan Radja Kaliamsah Sinaga (Batak Toba)<sup>84</sup>.

Pembentukan 10 provinsi tanpa Aceh ini bukan tanpa alasan. Dengan situasi ekonomi yang sulit, Jakarta (kabinet PM Hatta) melakukan reorganisasi aparatur dan efisiensi anggaran. Selain itu, Jakarta masih menanggung hutang warisan Hindia Belanda sebesar US\$ 1.130 juta<sup>85</sup> dari hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 12 Agustus 1950, DPRD Aceh menggelar sidang untuk menyikapi berdirinya 10 provinsi baru tanpa Aceh. DPRD Aceh sangat menentang keras daerah Aceh digabungkan dengan Sumatera Utara.

DPRD Aceh mengeluarkan mosi bahwa pembangunan di Aceh sangat tertinggal jauh dengan daerah lainnya di Sumatera Utara terutama bidang sosial ekonomi. Selain itu terdapat dua faktor lainnya yakni perbedaan

---

<sup>83</sup> Arum Sutrisni Putri, “Kembali ke Negara Kesatuan” <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/12/173000869/kembali-ke-negara-kesatuan> Diakses pada 28 Januari 2022

<sup>84</sup> Nazaruddin Sjamsuddin, *Op.cit*, hal. 41

<sup>85</sup> *Ibid*, hal. 42

kebutuhan dan faktor budaya. Untuk faktor perbedaan kebutuhan, apa yang dibutuhkan daerah Aceh belum tentu dibutuhkan daerah lain seperti Tapanuli dan Sumatera Timur begitu juga sebaliknya. Lalu soal faktor budaya seperti hukum adat Aceh (tanah, warisan, perkawinan dll) pasti berbeda dengan daerah yang lain di Sumatera Utara. Belum tentu juga semua rakyat Aceh menerima kenyataan bahwa Aceh masuk provinsi Sumatera Utara (hal ini diakibatkan dari perasaan anti kolonial dan tidak ingin didominasi lagi oleh orang-orang Sumatera Timur)<sup>86</sup>.

Jika mosi ini tidak didengarkan Jakarta, anggota DPRD Aceh bersama pejabat daerah yang lain mengancam akan mundur dari jabatan masing-masing. Hal ini mengakibatkan kinerja P4SU menjadi terhambat. Selama bulan Agustus 1950 - Januari 1951, utusan Jakarta dan Aceh silih bergantian berkunjung dan Daud Beureueh ditunjuk menjadi koordinator P4SU Aceh. Abdul Wahab Seulimeum (ketua PUSA & ketua DPRD Aceh) dan Ayah Gani (anggota DPRD Aceh) sebagai utusan Aceh. Pada 15 Agustus 1950, Moh. Hatta mengembalikan mandat kabinet kepada Presiden Soekarno dan pada 6 September 1950 Muh. Natsir dilantik menjadi Perdana Menteri<sup>87</sup>.

Dilantiknya Natsir sebagai Perdana Menteri membawa angin harapan bagi Aceh. Mengingat Natsir seorang kader partai Masyumi dan Aceh sebagai basis partai Masyumi diharapkan bisa mengawal mempertahankan status provinsi Aceh. Sayangnya harapan tersebut hanya menjadi angan-angan.

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hal. 43

<sup>87</sup> *Ibid*, hal. 44

Delegasi Aceh gagal meyakinkan PM Natsir agar mempertahankan provinsi Aceh. PM Natsir meneruskan program kabinet terdahulu yakni efisiensi anggaran dan penyerdehanaan reorganisasi aparatur.

Kemudian jika Natsir mengiyakan mempertahankan provinsi Aceh bukan tidak mungkin diserbu oleh partai lainnya terkait efisiensi anggaran. Terakhir akan menimbulkan kecemburuan dan tuntutan dari daerah lainnya jika mempertahankan provinsi Aceh<sup>88</sup>. Meskipun keputusan Natsir membuat kecewa rakyat Aceh, Natsir yakin kalau rakyat Aceh tidak akan berbuat lebih jauh nekat dan tetap setia kepada Jakarta. Usulan bahwa Daud Beureueh menjadi wakil gubernur Sumatera Utara muncul dari Natsir. Tujuan usulan tersebut untuk menenangkan situasi Aceh dan tentunya menjaga suara Masyumi di pemilu yang sedang direncanakan<sup>89</sup>.

Pada tanggal 26 September 1950, utusan Jakarta berkunjung ke Kutaraja. Rombongan utusan Jakarta yang ikut diantaranya Mr. Assat (Menteri Dalam Negeri), Sjafroeddin Prawiranegara (Menteri Keuangan), R. Sarimin Reksodihardjo (ketua P4SU) dan pejabat lainnya. Para rombongan disambut Daud Beureueh di lapangan terbang Kutaraja, sementara para pejabat daerah Aceh, tokoh masyarakat dan ulama menunggu di rumah dinas Daud Beureueh. Dialog antar tokoh dan pejabat daerah Aceh dengan utusan Jakarta berlangsung hangat. Mr. Asaat berujar dirinya ragu-ragu apakah keinginan

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hal. 45

<sup>89</sup> Wawancara penulis Nazaruddin Sjamsuddin dengan M. Natsir pada 2 Februari 1974 di Jakarta. *Ibid*, hal. 46

berdirinya provinsi Aceh adalah kehendak rakyat Aceh sendiri atau akal-akalan segelintir golongan tertentu<sup>90</sup>.

Keraguan Mr. Asaat ini menyebabkan suasana berubah menjadi panas. Pembubaran provinsi Aceh tinggal menunggu waktu dan segala upaya yang dilakukan oleh para tokoh berpengaruh Aceh gagal. Hal ini menimbulkan reaksi warga Aceh yakni mobilisasi besar-besaran meskipun Daud Beureueh berkata rakyat tidak akan menempuh aksi pemberontakan. Disisi lain Daud Beureueh tidak melarang adanya aksi mobilisasi besar-besaran. Adanya mobilisasi untuk mempersiapkan diri berjaga-jaga kalau pecah perang dunia ke-3. Selain itu Daud Beureueh juga berujar bahwa Aceh bukan seperti Maluku Selatan yang mengobarkan pemberontakan<sup>91</sup>.

Sementara pada tanggal 14 Agustus 1950, pemerintah mengeluarkan Perpu no.5 tahun 1950 tentang berdirinya provinsi Sumatera Utara<sup>92</sup>. Gelombang tuntutan masih dilakukan oleh rakyat Aceh. PUSA menggelar kongres pada 23-27 Desember 1950 untuk menggalang suara mempertahankan provinsi Aceh. Kongres tersebut dibiayai secara patungan oleh para peserta dari para saudagar dan sebagian dari sumbangan pemda Aceh. Beberapa jam sebelum dimulainya kongres, santer kabar bahwa PUSA mempersiapkan aksi pemberontakan dan ketika berjalannya kongres pada pukul 23.00 beredar kabar barisan konvoi tank baja TNI memasuki Kutaraja. Selama beberapa hari digelarnya kongres, tidak satupun keluar

---

<sup>90</sup> *Ibid*, Hal. 47

<sup>91</sup> *Ibid*, hal. 48

<sup>92</sup> <https://sumutprov.go.id/artikel/halaman/sejarah> diakses pada 9 Februari 2022

keputusan/hasil yang pasti, yang ada hanyalah secara resmi PUSA tetap menuntut mempertahankan provinsi Aceh<sup>93</sup>.

Memasuki tahun 1951, tentara di lingkungan teritorium Aceh disibukkan pergeseran pemindahan pasukan yang akan ditugaskan keluar Aceh. Tapanuli<sup>94</sup>, Sulawesi<sup>95</sup>, dan Maluku<sup>96</sup> merupakan tujuan pergeseran pasukan. Tidak hanya digeser saja, divisi tempur ke-X Teritorium Aceh resmi dibubarkan. Untuk mengisi kekosongan posisi prajurit tempur Tentara-Teritorium Aceh, diisi oleh prajurit dari luar daerah. Pada bulan Agustus 1951, Perdana Menteri Sukiman yang berasal dari Partai Masyumi mengeluarkan kebijakan razia memburu dan menggeledah para kader PKI di seluruh Indonesia.

Pasca peristiwa penyerbuan kantor polisi di Tanjung Priok bulan Agustus 1951 dan pemogokan buruh yang terjadi sepanjang tahun 1950-1951 mengakibatkan aktivitas ekonomi lumpuh<sup>97</sup>. Selain memburu kader PKI dan rentetan aksi mogok buruh, alasan razia dilakukan karena kondisi Indonesia sudah damai dan warga sipil wajib mengembalikan senjata kepada pemerintah baik legal maupun ilegal. Sementara di Aceh malah kebalikannya.

---

<sup>93</sup> Dada Meuraxa, *Peristiwa Berdarah di Atjeh* (Medan: Pustaka Sedar, 1956), hal. 26

<sup>94</sup> 1 brigade tempur dibawah pimpinan Mayor Hasbalah Haji digeser ke Tapanuli dari Kutaraja. Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1990) hal. 57

<sup>95</sup> Batalyon 110 Seulawah Jantan dibawah komando Kapten Hasan Saleh dikirim ke Makassar dalam rangka operasi penumpasan pemberontakan Kahar Muzakar. *Ibid*, hal. 57

<sup>96</sup> Pada bulan Juli 1951, Kapten Abdul Manaf beserta pasukannya dikirim ke Ambon dalam rangka operasi penumpasan pemberontakan RMS. *Ibid*, hal. 57

<sup>97</sup> Bonnie Triyana "Bagaimana Persaingan Partai Islam dengan Komunis pada Pemilu 1955? Ini Kisahnya" <https://historia.id/politik/articles/bagaimana-persaingan-partai-islam-dengan-komunis-pada-pemilu-1955-ini-kisahnya-DpoMM/page/1> diakses pada 19 Desember 2021

Tempat tinggal para tokoh/figur berpengaruh Aceh yang menentang eksistensi PKI digeledah tak terkecuali tempat tinggal Daud Beureueh. Operasi penggeledahan pada 29 Agustus 1951 dilakukan secara tiba-tiba.

Tidak hanya digeledah saja, para tokoh terutama mantan milisi masa revolusi kemerdekaan ditangkap dan dijebloskan penjara. Tokoh tersebut diantaranya H. Ibrahim (Jaksa Lhok Sukon), Tgk Tahir (Kepala Negeri Mutiara), Tgk. Hasan Hanafiah (Kepala Jawatan Agama Kabupaten Aceh Barat), Syekh Marhaban (Wedana Kutaraja) dll<sup>98</sup>. Penggeledahan yang menyasar para tokoh masyarakat Aceh adalah “hasil” dari usaha kaum uleebalang yang menghasut tentara dan polisi dengan memanfaatkan momen razia Agustus untuk balas dendam menekan lawan politik yakni para kaum ulama Aceh. Hal ini semakin menambah bara emosi rakyat Aceh. Mendengar adanya perselisihan antara Jakarta dengan Aceh, Imam Kartosuwiryo sebagai pemimpin DI/TII segera memanfaatkan momen tersebut.

Kartosuwiryo mengirim seorang utusan Abdul Fatah/Mustafa pada Januari 1952 untuk melakukan pendekatan. Abdul Fatah membawa sepucuk salinan dakwah gerakan DI/TII dan membujuk agar pimpinan daerah Aceh bergabung dengan gerakan DI/TII. Daud Beureueh merespon dengan mengirim utusan Jahja Sulaiman bersama Abdul Fatah yang akan pulang ke Jawa Barat. Tugas dari Jahja Sulaiman<sup>99</sup> yaitu membawa sepucuk surat balasan Daud Beureueh, meminta penjelasan lebih lanjut kepada

---

<sup>98</sup> Mawardi Umar & Al Chaidar, *'Serial Konflik Aceh dari Masa ke Masa' Darul Islam Aceh: Pemberontak atau Pahlawan?* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Prov. NAD, 2006) hal. 138

<sup>99</sup> Jahja Sulaiman merupakan seorang ketua Pemuda PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) Meureudu, Pidie

Kartosuwiryo dan mendalami struktur pemerintahan dan militer DI/TII. Daud Beureueh kesal dengan dakwah DI/TII yang hanya berisi pembenaran ideologi gerakan DI/TII tanpa sistem yang jelas<sup>100</sup>.

Berbagai persiapan untuk pelaksanaan “proklamasi” mulai dilakukan. Tidak hanya Daud Beureueh saja yang sudah mempersiapkan diri saat kongres Ulama digelar, para pengikut Daud Beureueh juga tidak ketinggalan. Zainal Abidin Tiro (utusan Daud Beureueh) melakukan silaturahmi kepada para ulama di Sumatra Timur. Silaturahmi tersebut dalam rangka meminta dukungan aksi “proklamasi” Darul Islam sekaligus mengajak bergabung dalam Negara Islam Indonesia. Para ulama tersebut antara lain Alim Hasan, Jahja Pinto, dan Zainul Arifin Abbas<sup>101</sup>.

Selain menggalang dukungan tokoh ulama, Daud Beureueh juga menggalang dukungan para perwira TNI asal Aceh. Hasan Ali diperintahkan mengumpulkan dan berdiskusi dengan para perwira tentara TNI asal Aceh yang berdinasi di Sumatra Timur dan Tapanuli. Pada bulan Agustus 1953, Hasan Ali berhasil mengumpulkan para perwira tentara dalam suatu rapat yang digelar di rumah salah satu patih bupati Langkat AR Hadjat<sup>102</sup>. Perwira

---

<sup>100</sup>Surat yang dikirim dari Daud Beureueh kepada Kartosuwiryo bertanggal 4 Oktober 1956. Dalam surat itu Daud Beureueh juga menulis hubungan lebih lanjut dengan Kartosuwiryo. Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1990) hal. 8

<sup>101</sup> Wawancara penulis Nazaruddin Sjamsudin dengan Hasan Ali di Banda Aceh pada 28 Juli 1973. Nazaruddin Sjamsudin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990) hal. 96

<sup>102</sup>*Ibid*, hal. 96

TNI yang hadir dalam rapat tersebut yaitu Mayor Hasballah Haji (Komandan KMKB Medan), Letnan Ibrahim Saleh<sup>103</sup>, dan para perwira lainnya.

Hasil dari pertemuan Hasan Ali dengan para perwira TNI asal Aceh yaitu pada tanggal 21 September 1953 para pemimpin sipil Aceh mengumumkan bergabung dengan NII. Sehari sebelumnya, pada 20 September 1953 para perwira membantu gerakan ulama Sumatera Timur yang akan menjebak para pejabat pusat termasuk Presiden Soekarno yang menghadiri pembukaan PON (Pekan Olahraga Nasional) di Medan<sup>104</sup>. Sebanyak 2 kompi pasukan akan ditarik dari Medan agar memperlancar aksi 21 September.

Selain persiapan mencari dukungan, persiapan secara fisik juga dilakukan. Rakyat Aceh dimobilisasi kemudian dilatih dasar-dasar militer. Hal ini berdasarkan keputusan rapat PUSA (dari unsur Ulama, Pemuda, dan Wanita) di Langsa yang digelar pada 25-29 April 1953. Ada dua organisasi yang akan dibentuk untuk mendukung mobilisasi rakyat Aceh. Pertama adalah PBPA (Persatuan Bekas Pejuang Aceh) yang diketuai oleh Husin Jusuf (ex komandan Divisi X) dan Pandu Islam yang diketuai oleh Abdul Gani Mutyara (kepala pemred harian *Tegas* dan juga ex perwira Divisi X)<sup>105</sup>.

Adapun tujuan didirikannya PBPA untuk memobilisasi veteran TNI di seluruh tanah Aceh. Kemudian tujuan didirikannya Pandu Islam untuk

---

<sup>103</sup> Ibrahim Saleh merupakan kakak kandung Hasan Saleh yang usianya terpaut dua tahun. Meskipun lebih tua Ibrahim, tetapi pangkat Hasan lebih tinggi satu tingkat. Akmal Nasery Basral, *Napoleon dari tanah rencong: Novelisasi perjuangan Hasan Saleh*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013) hal. 3

<sup>104</sup> Wawancara penulis Nazaruddin Sjamsudin dengan Hasan Ali di Banda Aceh pada 28 Juli 1973 dan 19 November 1975. *Op.cit*, hal. 96

<sup>105</sup> Cornelis Van Dijk, *Op.cit*, hal. 302



mencetak para pemuda yang siap tempur dengan latihan militer yang disamarkan dengan gerakan kependuan agar tidak mencurigakan<sup>106</sup>. Daud Beureueh juga memiliki peran sebagai mobilisasi dukungan moral rakyat Aceh. Daud Beureueh tidak sendirian, dibantu oleh dua pemuda sebagai penyambung lidah yakni Husin Al-Mudjahid dan Ismail Yakub. Sementara itu dilaporkan bahwa persiapan PBPA dan Pandu Islam tidak maksimal.

Kedua organisasi tidak mampu menyediakan persenjataan. Hal ini terjadi akibat dari kebijakan pemerintah yakni razia Agustus 1951. Para pemuda Pandu Islam terpaksa melakukan latihan dengan peralatan seadanya seperti pedang, pisau, dan senapan kayu peninggalan kolonial Jepang. Kondisi personel PBPA sama seperti Pemuda Pandu Islam yang melakukan pelatihan dasar militer di pedalaman Bireun. Hal inilah yang membuat para petinggi PUSA tidak menetapkan secara pasti “hari H” meskipun persiapan tempur tetap berlanjut.

Untuk mengatasi masalah kekurangan senjata, Hasan Ali (organisateur PUSA) bergerak mencari dukungan. Dalam mencari dukungan persenjataan, Hasan Ali tidak mengalami kesulitan karena ia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Daerah Aceh sehingga mudah berkomunikasi dengan para perwira polisi dan tentara asal Aceh baik dalam provinsi Aceh maupun luar Aceh. Karena menduduki jabatan tinggi provinsi inilah membuat Jakarta tidak mencurigai gerak-gerik Hasan Ali.

---

<sup>106</sup>, Nazaruddin Sjamsudin, *Op.cit*, hal. 92

Puncak dari huru-hara di Aceh adalah pengumuman “proklamasi” Aceh bagian dari DI/TII dibawah Imam Kartosuwiryo oleh Daud Beureueh pada tanggal 21 September 1953<sup>107</sup>. Sebelum adanya pengumuman “proklamasi” DI/TII di Aceh, tidak sedikit pejabat pusat yang datang untuk meredam gejolak Aceh. Mulai dari Mr. Asaat pada 26 September 1950 kemudian Mr. Teuku Muhammad Hasan bahkan Wakil Presiden Moh. Hatta. Namun usaha tersebut dengan hasil tangan kosong<sup>108</sup>.

Sebenarnya gelagat Aceh untuk melakukan aksi pemberontakan terhadap Jakarta mulai terendus. Abdul Fatah tertangkap polisi di Jakarta saat tiba dari Aceh pada bulan Mei 1953. Polisi menemukan barang bukti berupa berbagai dokumen termasuk surat dukungan Daud Beureueh kepada Kartosuwiryo<sup>109</sup>. Dalam perjalanan dari Aceh menuju Jawa Barat, Abdul Fatah ditemani Iljas Leube<sup>110</sup> tetapi Iljas berhasil lolos dari sergapan polisi. Jakarta terkejut atas isi surat dokumen tersebut tetapi tidak melakukan tindakan keras.

Jakarta mencoba melakukan tindakan persuasif lewat PM Wilopo dengan pendekatan kepada Daud Beureueh. PM Wilopo mengangkat kembali Daud Beureueh sebagai pejabat di kantor Kementerian Dalam Negeri<sup>111</sup>. Selain Wilopo, Moh. Hatta sebagai wakil presiden juga melakukan usaha dialog agar

---

<sup>107</sup> Ariwiadi, *Gerakan Operasi Militer VII: Penjelesaian Peristiwa Atjeh*, (Jakarta: Mega Bookstore & Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, 1959) hal. 3

<sup>108</sup> Rusdi Sufi dkk, *Op.cit*, hal. 73

<sup>109</sup> Wawancara penulis Nazaruddin Sjamsudin dengan Muhammad Diah Hadji di Jakarta, 3 Juli 1975. Nazaruddin Sjamsudin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990) Hal. 99

<sup>110</sup> Iljas Leube merupakan salah satu murid Daud Beureueh, ia diperintahkan Daud Beureueh sebagai kurir dan mendampingi Abdul Fatah. *Ibid*, hal. 93

<sup>111</sup> *Ibid*, hal. 99

aksi huru-hara tidak meletus. Usahanya adalah bertemu langsung dengan Daud Beureueh. Selain itu, Hatta juga meminta saran kepada para perwira tentara yang berasal dari Aceh seperti Kolonel Zulkifli Lubis dan Kolonel Syamaun Gaharu.

Kolonel Syamaun Gaharu dan Moh. Hatta percaya bahwa solusi mengatasi gerakan DI/TII Aceh tidak bisa selesai dengan jalan operasi militer, tetapi memberikan opsi pemberian provinsi dan membiarkan Aceh mengatasi konflik internal sendiri antara ulebalang dengan ulama<sup>112</sup>. Sementara Kolonel Zulkifli Lubis ingin melakukan perundingan dengan pihak DI/TII. Alasan Hatta menempuh jalan persuasif karena terjadi penembakan berdarah yang dilakukan oleh tentara pemerintah kepada warga sipil. penembakan berdarah tersebut terjadi di Pulot, Cot Jeumpa, dan Kruengkala. Aksi penembakan pertama terjadi di Pulot pada 26 Februari 1955 yang mengakibatkan 25 orang tewas<sup>113</sup>.

Penembakan kedua terjadi di Cot Jeumpa pada 28 Februari 1955 yang mengakibatkan 64 orang tewas. Penembakan ketiga terjadi di Kruengkalang pada 4 Maret 1955 yang mengakibatkan 10 orang tewas. Total korban tewas sebanyak 99 jiwa antara usia 11-100 tahun. Tragedi penembakan berdarah ini

---

<sup>112</sup> Cornelis Van Dijk, *Op.cit*, hal. 293

<sup>113</sup> “Kala Tentara Orde Lama Bantai Warga Aceh di Pulot Cot Jeumpa, Februari 1955” <https://kumparan.com/acehkini/kala-tentara-orde-lama-bantai-warga-aceh-di-pulot-cot-jeumpa-februari-1955-1vFfqk5WFIB/full> diakses pada 27 Februari 2022

diungkap oleh seorang wartawan Achmad Chatib Aly (Acha). Acha merupakan pemred Koran Peristiwa di Kutaraja<sup>114</sup>.

Sebenarnya aksi huru-hara sudah dimulai dua hari sebelumnya pada 19 September 1953. Saluran telepon antar kota Kutaraja dengan Medan sudah terputus. Massa mulai berkonsentrasi di berbagai kampung sekitar jalan raya dan jalur rel kereta api dengan membawa bendera Darul Islam dan berbagai senjata tajam juga senjata api. Pada malam harinya, massa serentak menyerbu pos jaga polisi dan tentara. Aksi huru-hara tersebut menular ke berbagai kabupaten.

Gerombolan massa yang bersenjata tajam dan senjata api menyasar berbagai titik kota-kota penting di Aceh. Kota tersebut diantaranya Tapak Tuan (Aceh Selatan), Meulaboh (Aceh Barat), Kutaraja/Banda Aceh (Aceh Besar), Sigli (Pidie), Lhokseumawe & Bireun (Aceh Utara), juga Takengon. Gerombolan massa ini terdiri dari kaum muda yang dilatih kemiliteran dasar di gerakan kepanduan, para veteran TNI era revolusi kemerdekaan, dan pasukan TNI yang membelot melakukan desersi.

Bahkan gerombolan massa yang berusaha menguasai Lhokseumawe (ibukota kabupaten Aceh Utara) kontak tembak dengan aparat polisi-tentara selama 4,5 jam<sup>115</sup>. Sementara di ibukota Kutaraja, pasukan kepolisian dibawah komando Mayor Priyatna dibantu personel pamong praja berhasil

---

<sup>114</sup> Dada Meuraxa, *Op.cit*, hal. 43

<sup>115</sup> Nazaruddin Sjamsudin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990) hal. 84

menggagalkan aksi pendudukan oleh massa<sup>116</sup>. Situasi semakin mencekam membuat masyarakat terutama para keluarga pamong dan aparat yang berasal dari luar Aceh mengungsi keluar kota<sup>117</sup>. Selain keluarga pamong dan aparat, para tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat yang bertugas diluar ibukota Kutaraja yang dianggap tidak aman ditarik. Para dokter diungsikan menuju Kutaraja sementara lalu dibawa ke Medan menggunakan kapal<sup>118</sup>.

Bupati Meulaboh, Patih Raja Kalelong berhasil menggagalkan aksi penyerbuan oleh gerombolan bersenjata. Sementara itu, Tapak Tuan (Aceh Selatan) berhasil dikuasai gerombolan bersenjata sampai tanggal 3 Oktober 1953. Pasukan TNI yang masih bertahan di Aceh Selatan melakukan konsolidasi kekuatan. Untuk sementara waktu, ibukota kabupaten dipindah ke Kandang. Pada sore hari tanggal 1 Oktober 1953, Letnan Hasan Samosir mengadakan rapat bersama pejabat sipil dan penduduk yang masih bertahan<sup>119</sup>.

Rapat tersebut bertujuan untuk mengatur strategi merebut kembali Tapak Tuan dari tangan gerombolan bersenjata. Esoknya pada pukul 03.00 pasukan TNI dibantu penduduk dari Kandang dan Bakongan menyerbu posisi gerombolan bersenjata di Kluet Utara. Para gerombolan bersenjata berhasil dipukul mundur keluar dari Kluet Utara. Setelah dirasa aman, pasukan TNI

---

<sup>116</sup>Ariwiadi, *Gerakan Operasi Militer VII: Penjelesaian Peristiwa Atjeh*, (Jakarta: Mega Bookstore & Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, 1959) hal. 3

<sup>117</sup> Nazaruddin Sjamsudin, *Op.cit*, hal. 84

<sup>118</sup> Teuku Dadek & Hermansyah, *Meulaboh dalam lintas sejarah Aceh* (Meulaboh: Bappeda Aceh Barat, 2013) hal. 91

<sup>119</sup> Ariwiadi, *Op.cit*, hal. 3

bersama penduduk memperbaiki jembatan Krueng Batee. Esoknya diadakan merebut kembali ke Tapak Tuan dan berhasil tanpa ada perlawanan berarti karena gerombolan bersenjata meninggalkan terlebih dahulu<sup>120</sup>.

Penyebab dari banyaknya pos maupun markas polisi jatuh ke tangan gerombolan bersenjata adalah polisi yang bertugas jaga melarikan diri. Aksi melarikan diri tersebut sudah direncanakan jauh sebelum penyerbuan dilakukan dan mayoritas anggota polisi berasal dari Aceh sehingga ada semacam rasa “solidaritas”<sup>121</sup>. Sementara di Meureuede Pidie, gerombolan massa pengikut Daud Beureueh berhasil menguasai keadaan. Gerombolan massa ini adalah pasukan TNI yang membelot melakukan desersi yang dipimpin oleh Mayor Hasan Saleh. Pasukan tersebut membawa senjata lengkap bergerak dari Sidikalang, Sumatra Utara<sup>122</sup>.

Untuk mengatasi situasi huru-hara yang tidak terkendali, Jakarta mengirim pasukan pemukul dari APRI/TNI dan Brimob yang terdekat dari Aceh yakni dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Diharapkan berbagai pasukan dari kesatuan yang ada di Sumatera Utara dan Barat bisa memukul mundur para gerombolan massa.

Pada kenyataannya di lapangan terdapat kesulitan dalam menerjunkan pasukan pemukul yakni sebagian tentara dan polisi lokal lari meninggalkan

---

<sup>120</sup> *Ibid*, hal. 4

<sup>121</sup> Hasil wawancara penulis Nazaruddin Sjamsudin dengan Ishak Amin, di Banda Aceh tanggal 3 November 1975, Nazaruddin Sjamsudin *Op.Cit*, hal. 95

<sup>122</sup> Ariwiadi, *Gerakan Operasi Militer VII: Penjelesaian Peristiwa Atjeh*, (Jakarta: Mega Bookstore & Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, 1959) hal. 5

markas dan melakukan aksi desersi bergabung dengan DI/TII. Hal tersebut membuat Polda Sumatera Utara (dalam hal ini kesatuan Brimob yang diturunkan) kesulitan melaksanakan operasi penegakan hukum dan ketertiban umum sehingga membutuhkan tambahan pasukan dari APRI/TNI. Sebelum “proklamasi” dikumandangkan, hanya ada 2 kompi Brimob yang disiagakan di Aceh sehingga tidak mampu menjaga kota-kota strategis di sepanjang pesisir secara maksimal<sup>123</sup>. Kapolda Sumatera Utara, Kolonel Pol. Darwin Karim meminta tambahan pasukan sebanyak 8 kompi kepada MDKN yang akan diterjunkan di daerah Aceh Tengah dan Aceh Utara<sup>124</sup>.

### **C. Situasi Aceh pasca pemberontakan 21 September 1953**

Setelah 1 bulan terjadi huru-hara yang tidak bisa dikendalikan, Pemprov Sumatera Utara membentuk Badan Koordinasi pada 24 Oktober 1953 dengan Gubernur Sumatera Utara SM. Amin sebagai ketua. Untuk anggota diisi oleh 3 pejabat, yakni Panglima Teritorium I (Kolonel Simbolon), Kapolda Sumatera Utara (Kolonel Pol. Darwin Karim), Kepala Kejaksaan Sumatera Utara (St. Machudum)<sup>125</sup>. Sementara di Kutaraja, para pejabat yang masih bertahan juga membentuk tim Staf Keamanan Sipil pada 27 Oktober 1953. Tim tersebut terdiri dari empat bagian yakni ketua, anggota, sekretaris, dan

---

<sup>123</sup> Nazaruddin Sjamsudin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990) hal. 126

<sup>124</sup> Kolonel Pol. Darwin Karim mengirim surat permintaan bantuan kepada Kepala Polisi Negara Komisaris Jenderal Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo di Mabes DKN (Djawatan Kepolisian Negara) Jakarta. Surat tersebut bertanggal 5 November 1955. Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1990) hal. 155

<sup>125</sup> M. Nur El Ibrahimy, *Tgk.M.Daud Beureueh: peranannya dalam pergolakan di Aceh* (Jakarta: Gunung Agung, 1982) hal. 157

penghubung/liaison. Posisi ketua dipegang oleh Bupati Aceh Besar (Abdul Wahab), posisi anggota diisi oleh pejabat kehakiman, perwira polisi daerah Aceh, perwira tentara komando teritorium Aceh, dan pejabat koordinator bupati. Untuk posisi penghubung/liaison diisi oleh seorang perwira Polisi Militer<sup>126</sup>.

Ketegangan antar pejabat mulai muncul karena perbedaan pendapat. Kolonel Simbolon mendesak Jakarta agar Aceh segera ditetapkan sebagai Daerah Darurat Militer<sup>127</sup>. Desakan tersebut langsung ditentang oleh SM. Amin. Menurut Amin, menetapkan Aceh sebagai daerah darurat militer bukanlah solusi untuk memperbaiki situasi keamanan. Pendapat Amin berkaca pada situasi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan yang ditetapkan dalam keadaan darurat sejak tahun 1950 tidak kunjung membaik. Menurut Amin, menetapkan daerah darurat perang memberikan anggapan bahwa situasi kondisi keamanan ketertiban tidak bisa dikendalikan<sup>128</sup>.

Karena huru-hara tidak kunjung mereda di Aceh, akhirnya Jakarta menetapkan Aceh sebagai 'Militaire Bystand' yang berpedoman pada Keputusan Presiden no. 175 tahun 1952. Sebanyak 4 batalyon TNI dan 13 batalyon Brimob diterjunkan dan disebar seluruh daerah Aceh. Untuk membendung serangan gerombolan bersenjata, pasukan pemerintah (TNI dan Brimob) wajib mempertahankan garis pantai Peurlak-Kutaraja-Aceh Barat-

---

<sup>126</sup> *Ibid*, hal. 158

<sup>127</sup> Nazaruddin Sjamsuddin, *Op.cit*, hal. 155

<sup>128</sup> *Ibid*, hal. 156



Lama Inong (Meulaboh bagian selatan). Berbagai markas detasemen yang sudah didirikan diperkuat kembali termasuk di daerah yang terpencil. AURI menerjunkan pesawat patroli untuk mendukung pergerakan pasukan TNI dan Brimob<sup>129</sup>.

Meskipun mulai menggelar kekuatan militer, Jakarta masih menggunakan cara persuasif. Para ulama yang tidak mendukung dan tidak bergabung dengan DI/TII dirangkul Jakarta. Ulama tersebut diantaranya Tgk. Abdussalam Meuraxa, Tgk. Makam, Tgk. H. Hasan Krueng Kale, Tgk. Saleh Meusigit Raya, Tgk. Muda Wali (Tapak Tuan). Para ulama tersebut mengajak rakyat dan aparatur (pegawai negeri, tentara, polisi) yang terlanjur bergabung dengan DI/TII kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Selama operasi penegakan hukum dan ketertiban berlangsung, rakyat yang tidak tahu apa-apa sangat ketakutan karena pada siang hari diteror pasukan pemerintah dan pada malam hari diteror gerombolan bersenjata DI/TII<sup>130</sup>.

Jakarta terus mengirim kekuatan militer menuju Aceh. AURI mengirim pesawat udara (angkut dan bomber) dan pasukan Pasgat untuk mendukung operasi militer. Pesawat angkut Dakota berangkat dari skadron 2 dan pesawat bomber B-25 Mitchell dari skadron 1 Lanud Cililitan. Berangkat dari Lanud Cililitan menuju Medan sekitar tahun 1954<sup>131</sup>. Tidak ketinggalan dari Angkatan Darat (Resimen V TT.II/Sriwijaya dipimpin oleh Letkol Maraden

---

<sup>129</sup> *Ibid*, hal. 157

<sup>130</sup> Rusdi Sufi dkk, *Sejarah Kotamadya Banda Aceh*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997) hal. 74

<sup>131</sup> *Sejarah Angkatan Udara Indonesia 1950-1959: Jilid II*, (Jakarta: Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, 2005) hal. 158

Panggabean<sup>132</sup> dan wakil Kapten Subroto dan Kapten Juhartono<sup>133</sup>, ditambah dari batalyon 434 & 464 TT.IV/Diponegoro<sup>134</sup>). Angkatan Laut mengerahkan berbagai kapal perang di Selat Malaka untuk memblokade pesisir timur Aceh. Hal ini dilakukan agar gerombolan DI/TII tidak bias melakukan penyelundupan persenjataan dan komoditas yang akan dibarter secara ilegal<sup>135</sup>.

Pada tanggal 12 Mei 1954, pasukan pemerintah berhasil menangkap 2 petinggi DI/TII Aceh yakni Abdullah Gani dan Tengku Suleman Daud kemudian ditahan di markas CPM (Corps Polisi Militer) Kutaraja. 15 hari kemudian, 2 tokoh ini diinterogasi oleh gubernur Sumatera Utara SM Amin di pendopo dinas Kutaraja. Interogasi tersebut dimulai pada pukul 20.00 malam. Adapun keterangan yang berhasil didapatkan dari interogasi adalah:

1. Pemberontakan dilakukan semata-mata karena kekecewaan gagal tuntutan otonomi Aceh dan karena kekecewaan inilah yang membuat Daud Beureueh mau bergabung dengan gerakan DI/TII Kartosuwiryo
2. Senjata-senjata yang digunakan dalam aksi pemberontakan merupakan hasil dari rampasan pertempuran. Sempat ada usaha membeli dan

---

<sup>132</sup> kelak Maraden Panggabean menjadi KASAD ke-8 masa jabatan tahun 1967-1969 dan Panglima ABRI masa jabatan tahun 1973-1978 <https://www.kompas.com/stori/read/2022/07/16/161600379/biografi-tokoh-indonesia--maraden-panggabean?page=all> diakses pada 10 November 2022

<sup>133</sup> M. Panggabean: *Jenderal dari Tano Batak*, (Jakarta: Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, 2011) hal. 78

<sup>134</sup> Ariwiadi, *Gerakan Operasi Militer VII: Penyelesaian Peristiwa Atjeh*, (Jakarta: Mega Bookstore & Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, 1959) hal. 10

<sup>135</sup> The rebellion in Sumatra, U 1392/59 – C 46 – P4/PS9, 23 Februari 1959, Den Haag, Menteri Luar Negeri

menyelundupkan senjata dari Malaya (Malaysia dan Singapura) tetapi belum berhasil (hingga tahun 1954) dan belum ada dukungan persenjataan dari Kartosuwiryo

3. Daud Beureueh dan Hasan Ali adalah tokoh yang bersemangat dalam perencanaan pemberontakan
4. Sebagian kelompok ada yang belum bergerak melancarkan aksi pemberontakan karena kurangnya persenjataan
5. Sebagian kelompok tidak memiliki alat komunikasi radio untuk berkoordinasi
6. Ada rencana negosiasi damai dari kelompok DI/TII kepada Jakarta
7. Muncul bibit perpecahan di internal kelompok DI/TII

Sementara itu, Darul Islam Aceh berusaha menggalang bantuan luar negeri. Malaysia dan Singapura merupakan negara yang terdekat dari Aceh yang hanya dipisahkan Selat Malaka. Said Abubakar yang merupakan pengikut Daud Beureueh tinggal di Penang<sup>136</sup>. Pada pertengahan tahun 1954, Said Abubakar membuka sebuah kantor di Singapura. Kantor tersebut berfungsi sebagai perwakilan Darul Islam Aceh dalam membeli peralatan persenjataan dan menggalang dukungan dari negara-negara yang benci terhadap komunisme<sup>137</sup>.

Selain Said Abubakar, ada juga Hasan Muhammad Tiro yang tinggal di New York. Hasan Tiro sebelumnya merupakan pegawai kedutaan Indonesia

---

<sup>136</sup> Nazaruddin Sjamsudin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990) hal. 143

<sup>137</sup> *Ibid*, hal. 250

untuk PBB bagian dinas penerangan<sup>138</sup>. Sebelumnya Hasan Tiro terpilih menerima beasiswa dari almaternya UII Yogyakarta di Columbia Universty bagian Fakultas Hukum<sup>139</sup>. Pada akhir 1954, Daud Beureueh dan Kahar Muzakar sepakat menanggung bersama biaya kampanye anti Jakarta lewat Hasan Tiro<sup>140</sup>. Selama bulan Februari-Juni 1955, dikabarkan bahwa terjadi penyelundupan sebanyak 4 kali menuju Aceh<sup>141</sup>.

Adapun barang selundupan yang berhasil diterima diantaranya 2500 seragam (kaos kaki, sepatu, tanda pangkat), berbagai senjata (amunisi, senapan serbu), rokok, dan peralatan medis<sup>142</sup>. Meskipun berhasil mengumpulkan berbagai perlengkapan untuk pemberontakan berkat kelonggaran dari otoritas Singapura dan Malaya, masalah kekurangan senjata masih belum teratasi. Ada 3 penyebab utama masalah kekurangan senjata belum teratasi. Pertama, kesulitan mengakses lapak senjata gelap di Singapura<sup>143</sup>. Kedua, karena kesulitan mengakses lapak senjata gelap di Singapura maka mencoba alternatif negara lain, tetapi harga senjata di pasar gelap negara lain lebih mahal. Ketiga harga sewa pesawat angkut untuk dikirim ke Aceh juga mahal<sup>144</sup> meskipun pernah menyewa 1-2 kali<sup>145</sup>.

---

<sup>138</sup> Mawardi Umar, Al Chaidar, "*Darul Islam Aceh: Pemberontakan atau Pahlawan ?*" (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Pemprov NAD, 2006) hal. 222

<sup>139</sup> *Ibid*, hal. 222

<sup>140</sup> *Ibid*, hal. 257

<sup>141</sup> Nazaruddin Sjamsudin, *Op.cit*, hal. 221

<sup>142</sup> *Ibid*, hal. 221

<sup>143</sup> Hasil wawancara penulis Nazaruddin Sjamsudin dengan seorang penyelundup yang tidak mau menyebut namanya di Bireuen, 30 Desember 1975. Nazaruddin Sjamsudin, *Op.cit*, hal. 222

<sup>144</sup> *Ibid*, hal. 221

<sup>145</sup> *Ibid*, hal. 222

Pada tanggal 13 Oktober 1955, Darul Islam Aceh menerbitkan sebuah piagam “Batee Kureng”. Piagam tersebut menyatakan bahwa Aceh bagian dari negara bagian NII<sup>146</sup>. NBA (Negara Bagian Aceh) dipimpin oleh seorang wali negara dan Daud Beureueh sebagai wali negara pertama. Untuk kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri dan kabinet perdana menteri bertanggung jawab kepada Wali Negara. Untuk bagian legislatif dibentuk lembaga Majelis Syuro yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dan untuk sementara anggota pertama dipilih oleh Wali Negara<sup>147</sup>.

Piagam “Batee Kureng” hasil dari sebuah konferensi yang digelar di Desa Batee Krueng Aceh Utara. Selain penetapan piagam “Batee Krueng”, sebanyak 65 peserta dilantik sebagai anggota Majelis Syuro (DPR). Para pimpinan Aceh memilih bentuk negara federal daripada komandemen militer yang dipraktikkan oleh NII pusat (Kartosuwiryo). Hal tersebut terjadi karena para pimpinan Aceh menganggap situasi darurat tidak akan lama. Namun praktek pemerintahan federal tidak berlangsung lama.

Situasi perang yang berlarut-larut dan kegagalan DI/TII Aceh merebut kekuasaan dalam waktu singkat membuat para pimpinan DI/TII menetapkan kembali status keadaan perang. Akibatnya lembaga-lembaga sipil seperti Dewan Syuro lumpuh tidak berfungsi. Oleh NII pusat, Aceh ditetapkan sebagai KW V (Komandemen Wilayah). Daud Beureueh menjadi Panglima

---

<sup>146</sup> Dada Meuraxa, *Peristiwa Berdarah di Atjeh* (Medan: Pustaka Sedar, 1956) hal. 49

<sup>147</sup> *Ibid*, hal. 50

Komando KW V Aceh. Praktis seluruh kekuasaan sipil diambil alih para komandan militer TII.

Pada tanggal 26 Februari 1956, jabatan gubernur Sumatera Utara diserahkan kepada Zainal Abidin Sultan Komala Pontas yang sebelumnya dijabat oleh SM. Amin<sup>148</sup>. Semenjak SM. Amin dilantik menjadi gubernur Sumatera Utara pada 23 Oktober 1953-26 Februari 1956, permasalahan keamanan ketertiban Aceh belum tertuntaskan. Pada bulan yang sama Abdullah Arif (seorang pegawai utusan Kementerian Penerangan) datang ke Aceh bertemu Hasan Ali. Tawaran Jakarta perihal amnesti masih tidak menarik bagi Darul Islam. Tuntutan Darul Islam perihal perundingan resmi atas nama pemerintah dengan pemerintah jelas ditolak Jakarta<sup>149</sup>.

Untuk meredam aksi huru-hara di Aceh, Jakarta melantik kembali gubernur Aceh baru yakni Ali Hasjmy pada 7 Januari 1957. Tetapi pelantikan gubernur tersebut tidak menurunkan tensi huru-hara di Aceh. Akhirnya Presiden Soekarno menetapkan Aceh sebagai Daerah Darurat Perang yang tertuang dalam surat keputusan no. 40/1957. Kolonel Syamaun Gaharu diangkat sebagai Penguasa Militer Daerah Aceh oleh Menteri Pertahanan dalam surat keputusan yakni MP/4/222/57. Kemudian Kolonel Syamaun Gaharu oleh Presiden Soekarno diangkat sebagai Ketua Penguasa Perang

---

<sup>148</sup> Mawardi Umar, Al Chaidar, "*Darul Islam Aceh: Pemberontakan atau Pahlawan?*" (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Pemprov NAD, 2006) hal. 227

<sup>149</sup> *Ibid*, hal. 242

Daerah Aceh dalam surat keputusan Presiden Republik Indonesia no.222/1957<sup>150</sup>.

Setelah dilantik menjadi PPD (Penguasa Perang Daerah) Aceh, Kolonel Syamaun Gaharu segera bergerak dan berkomunikasi dengan para gerombolan DI/TII yang mendirikan basis di Pidie, Aceh Timur, Aceh Besar, dan Aceh Utara. Sementara situasi masih mencekam dan rakyat Aceh yang tidak tahu apa-apa dan tidak terlibat dalam gerakan DI/TII menjadi korban teror. Pada siang hari diteror oleh tentara pemerintah, waktu malam hari diteror oleh gerombolan gerakan DI/TII. Usaha pendekatan secara persuasif yang dilakukan Kolonel Syamaun Gaharu mulai berhasil. Sebagian kelompok/faksi di internal DI/TII Aceh mulai bersedia berdialog dan berunding dengan pemerintah.

Kolonel Syamaun Gaharu mulai berunding dan membuka dialog lewat dua orang penghubung yaitu Ayah Pawang Leman dan Ishak Amin. 2x pertemuan diadakan pada tanggal 5 dan 7 April 1957. Saat pertemuan tanggal 7 April 1957 berhasil menghasilkan Ikrar Lamteh<sup>151</sup>. Ikrar Lamteh yang digelar pada 7 April 1957 di Desa Lamteh menghasilkan 3 poin penting, yaitu:

- Tekad membangun kembali Aceh yang telah menjadi “puing”
- Gencatan senjata antara pihak TNI-AD dengan TII
- Tekad menyelesaikan pergolakan secara damai<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup> Rusdi Sufi dkk, *Sejarah Kotamadya Banda Aceh*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997) hal. 74

<sup>151</sup> *Ibid*, hal. 75

<sup>152</sup> *Delapan Puluh Tahun Melalui Jalan Raya Dunia: A. Hasjmy Aset Sejarah Masa Kini dan Masa Depan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994), hal. 61

Sehari kemudian, Kolonel Syamaun Gaharu mengumumkan penghentian permusuhan antara pemerintah dengan gerakan DI/TII Aceh. Tanggal 19-25 Oktober 1957, rombongan kabinet PM Djuanda berkunjung dan meninjau perkembangan situasi kondisi Aceh. Meskipun situasi Aceh mulai terkendali, tetapi ada sebagian kelompok/faksi tidak setuju adanya Ikrar Lamteh. Sebagian kelompok/faksi yang tidak setuju membentuk Dewan Revolusi dibawah komando Hasan Saleh<sup>153</sup>. Hasan Saleh mengambil alih Wali Negara Tgk. Daud Beureueh tanggal 15 Maret 1959.

Adapun susunan Dewan Revolusi sebagai berikut:

- Perdana Menteri/Ketua Dewan Revolusi: Ayah Gani
- Panglima/Menhankam: Hasan Saleh
- Menteri Kemakmuran: Teuku Muhammad Amin
- Menteri Penerangan: A.G. Mutyara
- Ketua DPRS: Teungku Amir Husin Al Mujahid<sup>154</sup>

Kolonel Syamaun Gaharu segera mengkonsolidasi pasukan APRI/TNI-Brimob dan meminta bantuan kepada kesatuan RPKAD (sekarang Kopassus) yang kebetulan sedang bertugas di Medan. Sebanyak 1 peleton RPKAD dikirim menuju Kutaradja untuk memperkuat perimeter pertahanan Kutaradja. Pengiriman pasukan RPKAD ini sebagai *show of force* dan jika Dewan Revolusi tidak mundur, maka Kolonel Syamaun Gaharu akan

---

<sup>153</sup> Hasan Saleh merupakan perwira TNI-AD angkatan 45. Dia berhasil melaksanakan tugas saat masa revolusi kemerdekaan di Pulau Sumatra yakni di Kota Medan. Hasan Saleh berhasil merepotkan pasukan Belanda saat berusaha menguasai Kota Medan. Selain itu, Hasan Saleh sukses memimpin pasukannya di Batalyon 110 Seulawah Jantan dalam menumpas gerakan RMS (Republik Maluku Selatan)& DI/TII “cabang” Sulawesi pimpinan Kahar Muzakar

<sup>154</sup> Ali Hasjmy, *Ibid*, hal.61



mendatangkan pasukan RPKAD lebih banyak lagi<sup>155</sup>. Akhirnya Dewan Revolusi mundur kembali menuju basisnya di Sigli.

Untuk mengatasi aksi Dewan Revolusi yang bisa mengakibatkan kesepakatan Ikrar Lamteh terganggu, Jakarta lewat keputusan PM Djuanda membentuk suatu tim misi. Misinya adalah melakukan pendekatan secara persuasif dengan kelompok Dewan Revolusi. Atas usulan Ali Hasjmy, PM Djuanda menunjuk Mr. Hardi. Mr. Hardi adalah seorang kader PNI (Partai Nasional Indonesia) yang saat itu menjabat sebagai Waperdam I. Alasan Ali Hasjmy mengusulkan Mr. Hardi karena pengaruh PNI di istana dan parlemen sangat kuat sehingga bisa mendukung langkah-langkah yang diambil Mr. Hardi di Aceh<sup>156</sup>.

Pada tanggal 24 Mei 1959, digelar musyawarah yang dihadiri oleh tim Mr. Hardi, perwakilan daerah Aceh, dan Dewan Revolusi. Berikut daftar nama delegasi yang hadir dalam musyawarah damai:

Delegasi Tim Mr. Hardi:

- Letjend TNI Soeprayogi menjabat Menteri Stabilisasi Ekonomi
- Mayjend TNI Gatot Subroto menjabat Wakil KASAD
- Mr. Sutikno Slamet menjabat Menteri Keuangan
- Perwakilan pejabat tinggi seluruh departemen

---

<sup>155</sup> Rusdi Sufi dkk, Sejarah Kotamadya Banda Aceh, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997) hal. 76

<sup>156</sup> Ali Hasjmy *Op.cit*, hal. 59

Delegasi pejabat Aceh:

- Gubernur Ali Hasjmy
- Overste (Letkol) Teuku Hamzah menjabat Kepala Staf Kodam Aceh. Letkol Teuku Hamzah menggantikan posisi Kolonel Syamaun Gaharu saat bertugas keluar negeri

Delegasi Dewan Revolusi:

- Ayah Gani sebagai Ketua Dewan Revolusi
- Kolonel Hasan Saleh sebagai Panglima TII
- Amir Husin Al Mujahid sebagai anggota
- Husni Yusuf sebagai anggota
- T.A Hasan sebagai anggota
- A. Gani Mutyara sebagai anggota<sup>157</sup>

Situasi musyawarah damai berlangsung panas dan alot. bahkan sampai esoknya tanggal 25 Mei 1959 belum ada jalan keluar yang sifatnya *win-win solution*. Bupati Aceh Besar Zaini Bakri ikut membantu Ali Hasjmy dengan terus melakukan *lobby* dan meyakinkan para delegasi Dewan Revolusi agar mau menerima tawaran dari Tim Misi Hardi. Karena sudah larut malam dan lelah, Ali Hasjmy pulang ke pendopo Gubernur dan menyerahkan negosiasi lanjutan kepada Zaini Bakri.

Ali Hasjmy terus memantau perkembangan negosiasi dari pendopo gubenur lewat komunikasi telepon dengan Zaini Bakri. Akhirnya pukul 03.30

---

<sup>157</sup> *Ibid*, hal. 60

pagi tanggal 26 Mei 1959, Zaini Bakri menelpon Ali Hasjmy melaporkan bahwa Dewan Revolusi menerima tawaran pemerintah. Tawaran yang diterima yaitu Aceh menjadi daerah istimewa (Aceh berhak mengurus pendidikan agama, pendidikan umum, dan kebudayaan secara mandiri), rehabilitasi bagi warga Aceh yang bergabung dalam DI/TII dan bantuan dana sebesar 88,4 juta Rupiah<sup>158</sup>.

Pada tahun yang sama, aksi pemberontakan PRRI mengalami kemunduran setelah digempur oleh APRI/TNI dengan berbagai gelar operasi militer seperti operasi 17 Agustus, operasi Sadar, operasi Tegas, operasi Sapta Marga, dan operasi Merdeka<sup>159</sup>. Pasca digempur oleh APRI/TNI, PRRI tidak tinggal diam. PRRI segera mengkonsolidasi kekuatan dan mengajak DI/TII Aceh kubu Daud Beureueh bergabung dan bersatu. Tanggal 1 November 1959, dalam suatu rapat di Simpang Kapuk PRRI dan DI/TII sepakat mendirikan negara “Republik Persatuan Indonesia”. Cita-cita dari negara PRI adalah merubah bentuk Indonesia dari kesatuan menjadi federal yang terdiri dari berbagai daerah yang dikuasai PRRI dan DI/TII<sup>160</sup>.

Setelah melakukan kesepakatan, PRRI mengumumkan “proklamasi” RPI tanggal 8 Februari 1960 beserta susunan kabinet. Berikut adalah susunan kabinet “Republik Persatuan Indonesia”:

---

<sup>158</sup> *Ibid*, hal. 66

<sup>159</sup> Martinus Danang, “Operasi Penumpasan Gerakan Separatis: PRRI/Permesta”, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/operasi-penumpasan-gerakan-separatis-prri-permesta>

diakses pada 21 Juli 2022

<sup>160</sup> *Sejarah TNI-AD 1945-1973 jilid 3: Peranan TNI-AD dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia*, (Bandung: Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, 1979) hal. 54

1. Presiden : Sjafruddin  
Prawiranegara
2. Perdana Menteri : Sjafruddin  
Prawiranegara
3. Wakil Presiden : Kartosuwiryo
4. Mendagri : Moh. Natsir
5. Menkeu : Sjafruddin  
Prawiranegara
6. Menhub : Mr. Soemitro
7. Jaksa Agung : Mr. Soemitro
8. Menlu : Kol. Simbolon
9. KASAD : Kol. Ahmad  
Djambek
10. KASAU : Mr. Soemitro
11. KSAP : Kahar Muzakar
12. Dubes PBB : Hasan Tiro
13. Mendikbud : M. Syafei
14. Mahkamah Agung : Mr. Asaat
15. Mensos : Suleman Daud
16. Wali Negara Aceh : Teungku Daud  
Beureueh
17. Wali Negara  
Laut Tawar : Iljas Leube

18 . Menteri Penerangan : Mr. Burhanuddin  
Harahap<sup>161</sup>

Pada tahun yang sama, Daud Beureueh memutuskan hubungan dengan Kartosuwiryo. Hal tersebut terjadi karena perbedaan pandangan Daud Beureueh dengan Kartosuwirjo dan perbedaan latar belakang *track record* antara Daud Beureueh dengan Kartosuwiryo. Daud Beureueh menganggap “Negara Islam Indonesia” berbentuk negara federal<sup>162</sup>, sebaliknya Kartosuwirjo tetap pada konsep kesatuan<sup>163</sup>. Daud Beureueh sebagai seorang tokoh ulama berpengaruh didukung dengan corak pendidikan Aceh yang menekankan pada agama tidak sulit mendapatkan dukungan penuh rakyat Aceh<sup>164</sup>. Berbeda dengan Kartosuwiryo yang latar belakangnya bukan dari ulama dan hanya segelintir ulama yang mendukung dan menduduki jabatan di organisasi DI/TII. Diperkuat lagi dengan korespodensi surat menyurat Kartosuwiryo dengan Daud Beureueh yang memuat kutipan ayat Quran berulang-ulang<sup>165</sup>.

Pada tanggal 10 November 1960, Letkol M. Jasin diangkat menjadi pjs (pejabat sementara) Panglima KDMA berdasarkan SK KSAD No: Kpts-878/10/1960 tanggal 10 Oktober 1960. Letkol M. Jasin menggantikan Brigjend TNI Suprpto. ketika memimpin KDMA (Komando Daerah Militer Aceh) baru berjalan delapan bulan, Presiden menaikkan pangkat M. Jasin dari

---

<sup>161</sup> *Ibid*, hal. 54

<sup>162</sup> Nazaruddin Sjamsudin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990) hal. 204

<sup>163</sup> *Ibid*, hal. 255

<sup>164</sup> *Ibid*, hal. 259

<sup>165</sup> *Ibid*, hal. 261

letkol menjadi kolonel. Kenaikan pangkat tersebut berdasarkan Keppres RI No: 458/M/60 tanggal 4 Juli 1960. Setelah menerima jabatan dan kenaikan pangkat, Kol. M. Jasin diperkenalkan kepada seluruh anggota keluarga besar KDMA<sup>166</sup>.

Perkenalan tersebut saat acara malam resepsi pisah sambut Panglima KDMA yang juga dihadiri Brigjend TNI Suprpto pada 8 November 1960. Brigjend TNI Suprpto yakin bahwa Kol. M. Jasin mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya juga maksimal dan ia sangat kenal terhadap pribadi Kol. M. Jasin. Kol. M. Jasin sadar bahwa tugas seorang panglima sangat berat dan kompleks dibandingkan tugas jabatan yang ia emban sebelumnya. Untuk memperlancar tugasnya sebagai panglima, Kol. M. Jasin menerapkan motto “Mengalah untuk menang”. Langkah pertama Kol. M. Jasin yang ditempuh adalah mengumumkan bahwa barang siapa yang menyerahkan diri kembali ke pangkuan ibu pertiwi secara ikhlas dan jujur, oleh Jakarta akan diampuni. Pengumuman tersebut dikeluarkan ketika KDMA merayakan usia ke-4 tahun tanggal 22 Desember 1960. Pengumuman tersebut menuai berbagai reaksi. Ada yang menyambut baik, ada yang belum yakin akan kebenaran pengumuman tersebut, dan ada yang ingin menyerahkan diri tapi masih ragu-ragu<sup>167</sup>.

Selain menggunakan cara persuasif, Kol. M. Jasin masih tetap menerjunkan pasukan untuk menekan gerombolan DI/TII yang masih

---

<sup>166</sup> *Sejarah TNI-AD 1945-1973 Jilid XIII: Riwayat hidup singkat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat*, (Bandung: Dinas Sejarah TNI-AD, 1981), hal. 530

<sup>167</sup> *Ibid*, hal. 536

berkeliraran. Pasukan tersebut melancarkan operasi di Aceh Besar, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Hingga akhir tahun 1960, dilaporkan kekuatan DI/TII sebanyak 2500 orang, 1500 pucuk senapan ringan, 52 pucuk senapan mesin, 12 bazooka (peluncur roket ringan), dan 5 mortir<sup>168</sup>

Kolonel M. Jasin kembali mengumumkan kedua kalinya pada 28 Februari 1961. Pengumuman tersebut mendapatkan dukungan dari badan Da'watul Islam Wa Ishlah<sup>169</sup>. Pengumuman panglima KDMA menuai hasil positif yakni seluruh anggota DI/TII Aceh Besar menyatakan kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Kolonel M. Jasin akhirnya menjadi panglima KDMA secara penuh setelah keluar SK Kasad No: Kpts-280/2/1962, dimulai tanggal 1-11-1961. Kol. M. Jasin juga merangkap sebagai Peperda (Penguasa Perang Daerah)<sup>170</sup>.

#### **D.Peristiwa Berdarah di Aceh dalam kacamata Media Massa Asing**

Gerakan huru-hara yang dilakukan gerombolan DI/TII Aceh tidak luput dari sorotan media asing. Berbagai media asing dari beberapa negara juga mewartakan peristiwa pemberontakan di Aceh. Negara asal media asing tersebut seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Belanda. Berikut judul berita yang memuat tentang peristiwa pemberontakan di Aceh:

---

<sup>168</sup> Nazaruddin Sjamsudin, Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990) hal. 323

<sup>169</sup> *Ibid*, hal. 537

<sup>170</sup> *Op.cit*, hal. 536

Singapura:

***Singapore Free Press***

“800,000 in rebel ‘state’. Gangs seize Sumatra territory”, 23 September 1953. Berita ini membahas tentang situasi awal huru-hara gerombolan DI/TII Aceh. Tidak hanya di Aceh saja, Sulawesi Selatan dibawah pimpinan Kahar Muzakar dan Jawa Barat dibawah pimpinan Kartosuwiryo “memproklamasikan” berdirinya DI/TII. Sementara di Jakarta, pemerintah pusat membahas situasi Aceh dan memerintahkan militer untuk mengatasi huru-hara yang terjadi di Aceh

“Acheen – Scouts are surprised” 5 Oktober 1953. Aksi huru-hara yang terjadi di Aceh juga melibatkan para anggota pramuka. Anggota pramuka tersebut tergabung dalam “Gerakan Pramuka Muslim”. Pimpinan pramuka pusat sedang melakukan penyelidikan atas peristiwa huru-hara yang melibatkan para anggota pramuka Aceh.

“Sukarno has lost support of most Muslim” 25 April 1957. Pelham Groom seorang jurnalis menulis tentang terjadinya pemberontakan di Aceh. Pelham Groom menjelaskan secara singkat awal perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari serangan Belanda maupun gangguan dari dalam negeri seperti pemberontakan PKI. Kemudian munculnya DI/TII yang berawal dari kekecewaan Kartosuwiryo terhadap Soekarno yang dekat dengan kaum komunis.



*“Support is mounting, say rebel”* 18 Februari 1958. Berita tentang perwira tentara yang berada di Sulawesi mendukung gerakan PRRI di Bukittinggi dan turut serta DI/TII Aceh mendukung PRRI.

*“Jakarta denies rebels success”* 26 Maret 1959. Pemerintah pusat membantah laporan dari para jurnalis bahwa para pemberontak di Sulawesi Utara (gerakan Permesta) berhasil merebut beberapa kota. Sementara itu, situasi di Aceh bahwa Daud Beureueh sebagai pemimpin DI.TII Aceh diancam posisinya oleh Hasan Saleh panglima DI/TII

*“Smuggler outlaws”* 28 Desember 1959.

#### ***The Straits Times***

*“500 rebels arrested”* 26 September 1953. Militer Indonesia berhasil menangkap lima ratus pemberontak di Sumatra Utara. Penangkapan ini terjadi setelah adanya penyerbuan markas kepolisian di tujuh titik

*“Executed’ 94 died fighting in Acheen”* 14 Maret 1955. Beredar kabar bahwa telah terjadi pembantaian warga sipil dengan jumlah korban mencapai 94 orang.

*“Crush revolt, Army ordered”* 24 September 1953. Setelah “proklamasi” 21 September 1953, pemerintah pusat memerintahkan aparat tentara dan polisi untuk mengatasi gangguan keamanan ketertiban. PM. Ali Sastroamidjojo segera berdiskusi dengan Kepala Staf AD, Jaksa Agung dan pejabat pusat lainnya untuk mencari solusi masalah di Aceh.

*“Malayan Ships are Sent to Belawan”* 26 September 1953. Situasi Aceh yang tidak menentu, membuat perusahaan pelayaran kapal menghentikan

operasional pengangkutan dari dan menuju Aceh. Hal ini membuat barang-barang komoditas terlantar.

*“The Sultan gives a conference”* 30 September 1953. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menggelar konferensi pers. Dirinya tidak melihat gelombang pengungsi dari Aceh yang berkumpul di Medan.

*“Japs Among Rebels”* 7 Oktober 1953. Seorang jenazah warga Jepang ditemukan diantara para jenazah para pemberontak.

Belanda

***De Tijd***

*“Zware verliezen in Atjeh, Verbindingen vernield”* 26 September 1953

***Java Bode***

*“Situatie in Atjeh: Oproepaan alle ambtenaren om terugtekeren”* 4 November 1953

Amerika Serikat

***The New York Times***

*“Women, children among fanatics participating in revolt in Sumatra; Jakarta sends reinforcements to quell the moslem-led uprising in Atjeh area”*  
26 September 1953

*“Indonesia seizes 21 in South Sumatra”* 9 Oktober 1953. 21 orang ditangkap aparat kemanan terkait pemberontakan DI/TII di Sumatera Selatan.

*“Moslem rebels win North Sumatra area”* 15 Oktober 1953. Dilaporkan bahwa pasukan pemerintah mundur ke pantai di suatu pertempuran di Meureuedu yang letaknya di tenggara Kutaraja.

### BAB III

## SOROTAN *THE STRAITS TIMES* TERHADAP PERISTIWA PERGOLAKAN di ACEH

#### A. Sejarah Berdirinya *Straits Times*

The *Straits Times* merupakan salah satu surat kabar dari Singapura yang memiliki jejaring bisnis tersohor di benua Asia. Jejaring bisnis tersebut meliputi percetakan, telekomunikasi, majalah, periklanan, *event organizer* dll<sup>171</sup>. The *Straits Times* merupakan bagian dari perusahaan SPH (*Singapore Press Holding*). SPH berdiri pada 4 Agustus 1984 dan merupakan perusahaan gabungan yang terdiri dari *The Straits Times Limited* (1975), *Times Publishing Berhad*, *Singapore Newspaper Services Pte Ltd*, dan *Singapore News and Publications Limited*<sup>172</sup>.

The *Straits Times* berdiri pada tahun 1845. Muncul perdebatan siapa yang pertama kali mendirikan *The Straits Times*. Menurut pendapat Charles Burton Buckley pada 1902, seorang penggemar sejarah Singapura sekaligus warga kehormatan Singapura, bahwa pendiri *The Straits Times* seorang pedagang dari Armenia yakni Marterus Thaddeus Apar. Pendapat Buckley dibantah oleh Constance Mary Turnbull. Menurut Turnbull tidak mungkin seorang warga Armenia menerbitkan surat kabar berbahasa Inggris dan saat itu ukuran pasar pembaca pada masa itu

---

<sup>171</sup> “Rahasia Koran *Straits Times* Bertahan 170 Tahun”, 9 Februari 2015, <https://mediaindonesia.com/humaniora/16446/rahasia-koran-straits-times-bertahan-170-tahun>, diakses pada 12 November 2022

<sup>172</sup> “Formation of *Singapore Press Holding*, 4th Aug 1984” <https://eresources.nlb.gov.sg/history/events/34789177-5f5e-468d-9a77-db3680ce4161>, diakses pada 12 November 2022

sangatlah kecil. Apalagi saat itu sudah terbit surat kabar lainnya yang lebih mapan yaitu *The Singapore Free Press*. Apcar sudah memesan mesin cetak koran dari Inggris dan sudah merekrut seorang editor. Namun editor yang direkrut Apcar meninggal dan Apcar bangkrut sebelum mesin cetak tiba di Singapura. Catchick Moses meneruskan usaha Apcar membeli mesin cetak yang sudah dipesan dan mengajak Robert Carr Woods seorang jurnalis Inggris yang tiba dari Bombay, India sebagai editor dan ikut meluncurkan terbitnya perdana surat kabar tersebut. Cetakan pertama koran berisi delapan halaman yang terdiri dari berita lokal, editorial, iklan dan berita luar negeri yang dikutip dari surat kabar asing<sup>173</sup>.

*The Straits Times* merekam berbagai peristiwa besar beberapa tahun antara 1853-1860 di luar negeri maupun koloni Inggris di Asia (seperti India, Semenanjung Malaya, dan Sarawak). Peristiwa tersebut antara lain bentrokan sesama komunitas Cina antara Hokkien dengan Teochew di Singapura tahun 1854, Perang Krimea tahun 1853-1856, perang opium kedua di Tiongkok tahun 1856-1860, pemberontakan komunitas Cina terhadap penguasa raja putih James Brooke di Serawak dan pemberontakan rakyat India tahun 1857. Perjalanan dimulai ketika cetakan pertama terbit pada 15 Juli 1845. *The Straits Times* dan *The Singapore Journal of Commerce* dicetak di sebuah kantor No. 7 *Commercial Square* (sekarang *Raffles Place*). Sampai tahun 1858, *The*

---

<sup>173</sup> Stephanie Ho, "The Straits Times", 28 Februari 2016, [https://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP\\_2016-02-29\\_133820.html](https://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_2016-02-29_133820.html), diakses pada 13 November 2022

*Straits Times* berubah nama menjadi *Singapore Daily Times*. Pada tahun 1883, kembali berubah nama seperti semula *The Straits Times*<sup>174</sup>.

Pada tahun 1900, *The Straits Times* berubah kepemilikan pribadi menjadi publik dengan modal awal \$100,000<sup>175</sup>. Distribusi surat kabar *The Straits Times* yang berawal dari seorang bocah loper koran dengan sepeda merah pada 1896 kemudian berkembang menggunakan mobil jenis van *Morris Mirror* tahun 1931 memperluas jangkauan ke Malaya<sup>176</sup>. Keadaan mulai berubah ketika berkobarnya Perang Dunia II. Jepang menginvasi Asia Tenggara termasuk Singapura dan berhasil mendepak Inggris dari semenanjung Malaya tahun 1942. *The Straits Times* diambil alih Jepang berganti nama *Shonan Shimbun* dan *Shonan Times* untuk kepentingan propaganda Jepang. Jepang merekrut jurnalis lokal dan masih mengandalkan sebagian teknisi *The Straits Times*<sup>177</sup>. *The Straits Times* kembali terbit pada 7 September 1945 setelah Perang Dunia II usai.

Format penulisan pada surat kabar dibuat singkat karena masih dalam keterbatasan efek dari Perang Dunia II<sup>178</sup>. Pada tahun 1959 kantor *The Straits Times* pindah ke Kuala Lumpur. Alasan pemindahan karena Kuala Lumpur dianggap stabil dan strategis daripada Singapura saat itu<sup>179</sup>.

Selain stabil dan strategis, alasan *The Straits Times* pindah karena saat itu

---

<sup>174</sup> Bhagyashree Garekar, *Living History: 170 Years Of The Straits Times*, (Singapura: The Straits Times, 2015) hal. 234

<sup>175</sup> Stephanie Ho, *Op.cit.*

<sup>176</sup> Bhagyashree Garekar, *Op.cit.*, hal. 9

<sup>177</sup> Stephanie Ho, *Op.cit.*

<sup>178</sup> Stephanie Ho, *Ibid*

<sup>179</sup> “PAP and English Press (contd)”, Koran The Straits Times, 30 April 1959, <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19590430-1.2.87>, diakses pada 13 November 2022

*The Straits Times* bergesekan dengan parpol PAP (People's Action Party). PAP menuduh *The Straits Times* sebagai bawahan Inggris<sup>180</sup>. Pada bulan Juli dan September tahun 1964 terjadi kerusuhan rasial di Singapura yang menyebabkan stabilitas politik bergejolak. Akibatnya Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaya. Dampaknya kantor *The Straits Times* kembali ke Singapura. Malaysia menuding bahwa *The Straits Times* memiliki jaringan bisnis yang kuat di Malaysia tetapi 70% modalnya berada di Singapura<sup>181</sup>.

Pada tahun 1984, didirikanlah perusahaan SPH (*Singapore Press Holding*) yang terdiri dari empat perusahaan gabungan *The Straits Times Limited* (1975), *Times Publishing Berhad*, *Singapore Newspaper Services Pte Ltd*, dan *Singapore News and Publications Limited*. Diperkirakan nilai aset empat perusahaan gabungan itu mencapai \$300 juta<sup>182</sup>. Ketika *The Straits Times* merayakan ulang tahun pada usia ke-150 tahun 1995, menerbitkan sebuah buku berjudul *Dateline Singapore: 150 Years of the Straits Times* dengan tebal 400 halaman ditulis oleh sejarawan Asia Tenggara asal Inggris, Prof. Constance Mary Turnbull<sup>183</sup>. Selain

---

<sup>180</sup> "PAP attacks the Straits Times", Koran The Straits Times, 16 April 1959, <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19590416-1.2.76>, diakses pada 13 November 2022

<sup>181</sup> "Straits Times proposes major changes", Koran The Straits Times", 31 Januari 1973, <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19730131-1.2.174.1>, diakses pada 13 November 2022

<sup>182</sup> "SPH will be among the top cash-rich companies", Koran The Straits Times", 5 Oktober 1984, <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19841005-1.2.45.3>, diakses pada 13 November 2022

<sup>183</sup> "Attempting a record in a race against time", Koran The Straits Times, 8 Juli 1995, <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19950708-1.2.80.2.1>, diakses pada 13 November 2022

menerbitkan buku, *The Straits Time* juga menerbitkan portal berita *online* bersama perusahaan induknya *Singapore Press Holding*. *The Straits Times Interactive* diluncurkan pada 1 Desember 1995 dan *SPH's website Asia One* pada 15 Juni 1995<sup>184</sup>.

Pada tahun 1999, *The Straits Times* meluncurkan program *School Pocket Money Fund*, anak-anak sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu berpenghasilan rendah mendapatkan bantuan uang saku. Setiap tahun 10.000 anak-anak sekolah mendapatkan bantuan uang saku dan *The Straits Times* menggelontorkan dana sebesar \$42 juta<sup>185</sup>. Pada tahun 2009, *The Straits Times* meluncurkan aplikasi *The Straits Times* untuk pengguna *smartphones iPhone* dan membuat akun media sosial resmi twitter @STCom<sup>186</sup>. Pada tahun 2014, *The Straits Times* melebarkan sayap bisnis ke Myanmar dan Brunei Darussalam. Pada 24 Maret 2014, perwakilan *The Straits Times* Chua Wee Phong (*Executive Vice-President, Circulation SPH*), perwakilan *The RVi Group* Argus Ang (*CEO*), Duta Besar Singapura untuk Myanmar Robert Chua, dan wakil Menteri Penerangan Myanmar U Ye Htut. Penandatanganan perjanjian dilakukan di Hotel Sedona, Kota Yangon. Kesepakatan tersebut tentang distribusi surat kabar *The Straits Times* di kota besar di Myanmar seperti Yangon, Naypyidaw dan Mandalay. Kemudian sasaran distribusi dilakukan di kantor-kantor pemerintahan ibukota negara, bandara, kantor pusat bisnis,

---

<sup>184</sup> Bhagyashree Garekar, *Op.cit*, hal. 243

<sup>185</sup> *Ibid*, hal. 244

<sup>186</sup> *Ibid*, hal. 246

supermarket, dan toko buku<sup>187</sup>. Pada 30 Oktober 2014, perwakilan *The Straits Times* Chua Wee Phong (*Executive Vice-President, Circulation SPH*), Dato Paduka Lim Beng Thai, (*Chairman, United Daily News (B) Sdn Bhd*), Sim Yong Liang (*Managing Director, United Borneo Press (B) Sdn Bhd*), dan Jaya Ratnam (*Singapore High Commissioner to Brunei*). Penandatanganan perjanjian dilakukan di Hotel Parkview Kampong Jerudong, Brunei Darussalam. Sama seperti di Myanmar, sasaran distribusi dilakukan di kantor-kantor pemerintahan ibukota negara, bandara, kantor pusat bisnis, supermarket, dan toko buku<sup>188</sup>. Enam tahun kemudian, *The Straits Times* merayakan ulang tahun usia ke-150 tahun pada 2015.

## **B. Pemberitaan huru-hara dan peristiwa berdarah Aceh oleh The Straits Times**

Pemberitaan peristiwa berdarah dan huru-hara di Aceh oleh surat kabar *The Straits Times* dimulai tanggal 24 September 1953<sup>189</sup>, tiga hari pasca “proklamasi” DI/TII Aceh. Pemerintah pusat memerintahkan tentara dan polisi melakukan tindakan pemulihan ketertiban di Aceh akibat dari

---

<sup>187</sup> “*The Straits Times launches Myanmar edition*”, 24 Maret 2016, [https://web.archive.org/web/20160630052327/http://www.sph.com.sg/media\\_releases/2040](https://web.archive.org/web/20160630052327/http://www.sph.com.sg/media_releases/2040), diakses pada 13 November 2022

<sup>188</sup> “*The Straits Times launches Brunei edition*” 29 Oktober 2014, [https://web.archive.org/web/20160630045615/http://www.sph.com.sg/media\\_releases/2266](https://web.archive.org/web/20160630045615/http://www.sph.com.sg/media_releases/2266), diakses pada 13 November 2022

<sup>189</sup> “*Crush revolt, Army ordered*”, Koran *The Straits Times*, 24 September 1953, <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19530924-1.2.21>, diakses pada 27 Juli 2022



pemberontakan kelompok muslim fanatik. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo berkonsultasi dan berdiskusi dengan Kepala Staf AD, Jaksa Agung, Menteri pertahanan, dan para perwira tinggi kepolisian untuk mencari solusi mengatasi huru-hara kerusuhan di Aceh.

. Tanggal 26 September 1953, *The Straits Times* melaporkan bahwa sejumlah kapal dagang yang biasa melakukan angkutan komoditas ekspor dari Aceh menuju Penang dan sebaliknya digunakan mengangkut pengungsi. Para pengungsi dibawa menuju Medan. Kapal dagang itu juga melaporkan situasi Aceh kepada kantor pelabuhan Penang. Sementara banyak juragan/pedagang yang berkantor di Medan belum mendapatkan kabar terakhir keluarga/karyawannya yang tinggal di Aceh. Dampak dari kerusuhan di Aceh yakni barang komoditas ekspor sebanyak 35 ribu karung pinang terlantar di pelabuhan Belawan. Situasi kondisi Aceh yang sedang huru-hara membuat salah satu perusahaan kapal *Straits Steamship Company* menghentikan operasional sementara sampai waktu yang belum ditentukan<sup>190</sup>. Meskipun di beberapa tempat situasi mulai bisa dikendalikan aparat, gubernur Sumatra Utara Abdul Halim memperingatkan bahwa huru-hara yang terjadi di Aceh bukanlah kejadian yang remeh. Pada tanggal 30 September 1953<sup>191</sup> Sri Sultan Hamengkubuwono IX menggelar konferensi pers di Medan. Sri Sultan mengatakan bahwa dirinya tidak melihat kegaduhan di kota Medan terutama

---

<sup>190</sup> “*Malayan Ships are Sent to Belawan*”, Koran *The Straits Times*, 26 September 1953, <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19530926-1.2.5>, diakses pada 27 Juli 2022

<sup>191</sup> “*The Sultan gives a conference*”, Koran *The Straits Times*, 30 September 1953, <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19530930-1.2.17>, diakses pada 18 September 2022

para pengungsi yang berasal dari Aceh. Dirinya juga tidak melihat adanya pemberontakan. Dirinya juga menyatakan bahwa semua warga Medan sedang menikmati *event* olahraga PON ke-III. Selama beberapa pekan pasca “proklamasi” DI/TII Aceh, aparat keamanan terus melakukan operasi pemulihan ketertiban hingga ke pegunungan. Ketika kondisi Aceh masih huru-hara, Pemerintah pusat mengirim perwakilan sebanyak tiga menteri untuk menyelidiki tentang huru-hara di Aceh dan dikabarkan parlemen di Jakarta juga akan mengirim tim perwakilan penyelidikan. Aksi huru-hara di Aceh masih berlangsung membuat sebagian perusahaan pelayaran kapal Singapura membatalkan aktivitas pelayaran ke Aceh. Hal tersebut dikarenakan perusahaan kapal khawatir kapalnya disita pemerintah Indonesia untuk digunakan sebagai angkutan pasukan ke Aceh. Berita ini ditulis oleh *The Straits Times* pada 2 Oktober 1953<sup>192</sup>. Rencananya, ketika situasi Aceh mulai kondusif, pemerintah pusat akan melakukan pembangunan di berbagai bidang seperti pendidikan, pertanian, pekerjaan umum, dan perencanaan desentralisasi untuk Aceh. Sementara sebagian pihak menganggap bahwa beban tanggung jawab pemerintah daerah Aceh yang seharusnya bisa ditangani sendiri justru semuanya diambil alih pemerintah pusat. Dugaan sementara penyebab huru-hara di Aceh karena pemerintah pusat mengabaikan warga Aceh dan terlalu fokus pada Jakarta. Dilaporkan bahwa sebagian aparat melakukan Tindakan desersi lari dari kesatuan. Sementara pemberontak

---

<sup>192</sup> “Indonesia plans to develop Acheen”, *Koran The Straits Times*, 2 Oktober 1953, <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19531002-1.2.31> diakses pada 18 September 2022

sebanyak 5000 orang menyerbu Sigli, letaknya di sebelah timur Kutaraja. Pasukan dari kesatuan Brimob memaksa pemberontak mundur dari Kutaraja sejauh 3 mil dari pusat kota. Pemberontak juga menyebarkan pamflet propaganda dan berhasil menguasai bandara Blang Bintang. Setelah menguasai bandara, pemberontak menumpahkan cairan aspal di landasan pacu untuk menghalangi lalu lintas udara. Akibat dari aksi pemberontak menguasai bandara Blang Bintang, maskapai Garuda Indonesia *Airways* menghentikan penerbangan tujuan Kutaraja. Pemerintah pusat sangat optimis menerjunkan seluruh kesatuan polisi, tantara dan pasukan khusus mengatasi huru-hara di Aceh. *The Straits Times* memberitakan pada tanggal 7 Oktober 1953<sup>193</sup> ditemukan jenazah seorang warga Jepang diantara 400 jenazah pemberontak. Selain itu juga ditemukan 41 orang terluka.

Selain itu, *The Straits Times* pada tanggal 9 November 1953<sup>194</sup> juga melaporkan berbagai dampak yang ditimbulkan dari aksi huru-hara dan bentrokan berdarah antara pemberontak dengan aparat tentara dan polisi. Selama 7 minggu aksi huru-hara, Darul Islam sudah kehilangan anggota lebih dari 1000 orang. Akibat dari huru-hara di berbagai Aceh, semua aktivitas lumpuh total. Pelayanan masyarakat tutup berhenti total, bahan pokok beras mulai langka di pasaran yang diperkirakan sampai enam bulan kedepan, transportasi darat seperti jalur kereta api terputus dan lumpuh.

---

<sup>193</sup> “*Japs Among Rebels*”, Koran *The Straits Times*, 7 Oktober 1953, <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19531007-1.2.6>, diakses pada 27 Juli 2022

<sup>194</sup> “*The Acheen revolt enters new phase*” Koran *The Straits Times*, 9 November 1953, <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19531109-1.2.111>, diakses pada 27 Juli 2022

Sementara di Jakarta, anggota parlemen dan para ketua partai politik menyatakan angkatan perang Indonesia sangat memprihatinkan, *statement* yang dirilis oleh *The Straits Times* pada 18 Desember 1953<sup>195</sup>. Menurut parlemen, angkatan perang Indonesia memiliki pasukan sebanyak 250.000 personel yang kebanyakan kurang terlatih dan peralatan persenjataan yang kurang maksimal seperti matra angkatan laut dan angkatan udara. Diketahui sampai berita diturunkan, personel angkatan udara Indonesia dilatih oleh 30 orang dari Amerika Serikat dengan latar belakang para veteran penerbang tempur perang dunia II dari skadron tempur sukarelawan *Flying Tigers* yang beroperasi di wilayah udara daratan China, pulau Formosa, sebagian Asia Tenggara, dan sebagian India yang dipimpin oleh Jenderal Claire Chennault<sup>196</sup>. Sementara itu pemberontakan Darul Islam di Aceh juga terjadi di Kalimantan. Darul Islam juga mengklaim memiliki 80.000 pasukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Operasi menegakkan ketertiban yang dilakukan oleh aparat tidak berhenti.

Pada tanggal 27 Februari 1954<sup>197</sup>, *The Straits Times* melaporkan bahwa 50

---

<sup>195</sup> “*Budding Air Force*”, Koran *The Straits Times*, 18 Desember 1953, <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19531218-1.2.137>, diakses pada 28 September 2022

<sup>196</sup> Skadron Flying Tiger merupakan skuadron tempur berisi penerbang tempur sukarelawan yang disebut AVG (American Volunteer Group) berasal dari tiga matra kecabangan penerbang udara Angkatan Darat, Angkatan Laut, & Korps Marinir. AVG mulai beroperasi pada bulan April 1941-Desember 1945. Claire Chennault dimintai langsung oleh pemerintah Republik China untuk memimpin skuadron sukarelawan membantu melawan Jepang. Meskipun sifatnya sukarelawan, para penerbang dan teknisi mendapat gaji \$600/bulan dan bonus \$500 jika berhasil menembak jatuh satu pesawat tempur Jepang. *Air Force Combat Units Of World War II*, (Washington DC: Office of Air Force History, 1983), hal. 74. “*The Flying Tigers*”, *The Aviation History On-Line Museum*, 2006, <http://www.aviation-history.com/airmen/tigers.htm>, diakses pada 16 September 2022

<sup>197</sup> “*50 Atjeh rebels die*”, Koran *The Straits Times*, 27 Februari 1954, <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19540227-1.2.28>, diakses pada 27 Juli 2022

pemberontak tewas dalam suatu penyerangan oleh aparat militer Indonesia. Kabar tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Indonesia yang berada di Medan. Sementara di tempat lain, sekelompok pengacau membakar stasiun kereta api Matang Kuli. Telah beredar kabar terjadi pembantaian yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap warga sipil di Pulot dan Tjot Jeumpa. Kabar tersebut dirilis oleh *The Straits Times* pada 14 Maret 1955<sup>198</sup>. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 26 & 28 Februari 1955. Juru bicara komando militer Sumatra Utara membantah telah terjadi pembantaian rakyat sipil sebanyak 94 orang dan menyatakan ketika operasi militer kontra gerilya di Aceh yang digelar sejak 1953 bahwa rakyat sangat beresiko menjadi korban. Kelompok gerilyawan selalu menggunakan rakyat sebagai tameng hidup dan pembantu.

Sebelum beredar kabar pembantaian rakyat sipil, pada tanggal 22 Februari 1955 terjadi penyerangan yang dilakukan oleh gerilyawan Darul Islam yang mengakibatkan 15 tentara tewas dan seorang warga sipil terluka. Penyerangan tersebut dipimpin oleh seseorang bernama Leman. Selain menyergap, diduga Leman juga menghasut warga desa untuk membantu Darul Islam melawan tentara. Sementara di lain tempat, kantor berita Indonesia melaporkan bahwa terjadi penyerbuan Pelabuhan Kuala Langsa oleh gangster sebanyak 50 orang yang mengakibatkan 5 polisi tewas dan rumah terbakar dengan kerugian ditaksir Rp. 20 juta atau \$5,05 juta<sup>199</sup>.

---

<sup>198</sup> "Executed' 94 died fighting in Acheen" Koran *The Straits Times*, 14 Maret 1955, <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19550314-1.2.53>, diakses pada 31 Juli 2022

<sup>199</sup> *Ibid*, diakses pada 31 Juli 2022

Ketika melakukan aksi pemberontakan, Darul Islam sangat membutuhkan dukungan dana operasional. Dalam mencari pendanaan, Darul Islam mendirikan semacam kantor perwakilan. Pada tanggal 17 Mei 1955<sup>200</sup>, *The Straits Times* mengutip laporan dari surat kabar “Patriot” dari kota Medan bahwa pusat komando Darul Islam dipindahkan ke Singapura pasca operasi pembersihan yang dilakukan oleh militer Indonesia. Patriot juga menulis bahwa Darul Islam berhubungan dengan salah satu wakilnya yang berada di New York. Kemudian persediaan untuk Darul Islam tiba dengan perahu pada malam hari dengan pesawat terbang. Beberapa bulan sebelum dilaporkan dalam berita ini, telah ditemukan sebuah parasut yang diduga persediaan untuk Darul Islam yang dijatuhkan dari pesawat terbang. Selain parasut, juga ditemukan uang kertas “Negara Islam Indonesia” yang ditemukan beberapa minggu sebelum dilaporkan.

Surat kabar “Patriot” menuding bahwa uang kertas yang ditemukan dibuat di AS dan diciptakan oleh Hasan Tiro mantan pegawai Konsulat Indonesia untuk PBB di New York yang dipecat. Pasca dipecat, Hasan Tiro gencar menulis melawan pemerintah Indonesia. Peran Hasan Tiro dalam pemberontakan Darul Islam diperkuat dengan ditemukannya sebuah dokumen oleh militer Indonesia ketika operasi pembersihan berlangsung. Perannya menjadi “duta besar” Darul Islam Aceh di kantor PBB. Dilaporkan bahwa

---

<sup>200</sup> “Achin Rebels Set up Cell in Singapore”, Koran *The Straits Times*, 17 Mei 1955, <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19550517-1.2.10>, diakses pada 11 September 2022

Konsulat Indonesia untuk PBB di New York dan Konsulat Indonesia di Singapura<sup>201</sup> bekerja sama untuk menyelidiki sepak terjang Darul Islam Aceh.

Sejak tahun 1953 sampai tahun 1955 militer Indonesia terus melakukan operasi pembersihan terhadap gerombolan Darul Islam. Hasil dari operasi pembersihan dilaporkan oleh *The Straits Times* pada 28 Agustus 1955<sup>202</sup>. Dalam suatu operasi pembersihan. Militer Indonesia berhasil menewaskan 28 gerombolan di suatu desa wilayah Aceh. Konflik dan huru-hara yang semakin berlarut-larut antara Darul Islam Aceh dengan pemerintah pusat membuat beberapa pihak mencoba menawarkan negosiasi untuk berdamai. Pihak tersebut adalah Hasballah Daud, putra dari Daud Beureueh pemimpin gerakan Darul Islam Aceh. Hasballah Daud bersama seorang pegawai Kementerian Penerangan Abdullah Arief. Kedua orang ini telah bertemu dengan Daud Beureueh dan membicarakan tentang “misi perdamaian” di suatu tempat persembunyian wilayah Aceh. Pertemuan tersebut disampaikan oleh Kementerian Penerangan pada tanggal 1 September 1955. Berita tentang Hasballah Daud dan Abdullah Arief bertemu Daud Beureueh dirilis oleh *The Straits Times* tanggal 2 September 1955<sup>203</sup>.

---

<sup>201</sup> kantor perwakilan diplomatik Indonesia di Singapura sebelum tahun 1965 merupakan konsulat jenderal dibawah kedutaan besar Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia. Hal ini terjadi karena Singapura masih dibawah naungan federasi Malaysia. Setelah Singapura merdeka pada tahun 1965, Konsulat Indonesia berubah status menjadi kedutaan besar.

<sup>202</sup> “Troops kill 28 outlaws”, Koran *The Straits Times*, 28 Agustus 1955, <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19550828-1.2.5>, diakses pada 11 September 2022

<sup>203</sup> “Darul Islam Peace Move”, Koran *The Straits Times*, 2 September 1955, <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19550902-1.2.50>, diakses pada 11 September 2022

Meskipun militer bersama angkatan kepolisian Indonesia gencar melakukan pembersihan dan menekan aksi perlawanan terhadap gerombolan Darul Islam, para gerombolan terus melakukan perlawanan. Salah satunya merebut sebuah kota kecil yang mengakibatkan 100 orang tewas. Kabar Darul Islam merebut kota kecil diumumkan oleh otoritas gabungan militer kepolisian setempat. Pengumuman tersebut dilaporkan oleh *The Straits Times* pada 11 November 1955<sup>204</sup>.

Darul Islam Aceh diduga mendapat dukungan dari pihak luar. Pihak luar yang mendukung Gerakan Darul Islam adalah Westerling. Westerling merupakan seorang mantan prajurit komando usia 37 tahun yang melakukan pemberontakan di Bandung tahun 1950 yang kemudian melarikan diri ke Belanda karena aksinya berhasil dipadamkan militer Indonesia. Pemberontakannya dinamakan sebagai “Angkatan Ratu Adil” yang berhasil menguasai kota Bandung selama 3 hari. Westerling dan Darul Islam memiliki rencana yang sama yakni menggulingkan pemerintahan Soekarno karena kebijaksanaan “menyerahkan negara kepada komunis”.

*The Straits Times* mengutip sumber dari koran *Sunday Times* pada tanggal 22 Januari 1956<sup>205</sup> yang mewawancarai seseorang yang dekat dengan Westerling mengatakan bahwa terjadi pertemuan antara Westerling dengan para tokoh Darul Islam Aceh yang tinggal di Malaysia dan Singapura

---

<sup>204</sup> “*Rebels kill 100*”, Koran *The Straits Times*, 11 November 1955, <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19551111-1.2.57>, diakses pada 11 September 2022

<sup>205</sup> “*Is ‘TURKO’ Westerling Back In Indonesia ?*”, Koran *The Straits Times*, 22 Januari 1956, <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19560122-1.2.29>, diakses pada 22 Juli 2022



termasuk Hasan Tiro. Diketahui bahwa Westerling tiba di Penang menyamar sebagai orang blasteran Eropa. Dari Penang, Westerling menyeberang ke pulau Langkawi untuk bertemu Hasan Tiro yang sebelumnya melakukan pertemuan dengan para tokoh Darul Islam Aceh di Kedah. Pertemuan tersebut sudah diadakan sejak tanggal 22 Desember 1955. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah akan mendirikan negara islam di Indonesia sebagai benteng dari gelombang komunisme. *Sunday Times* juga menulis bahwa apa yang diramalkan oleh Westerling menjadi kenyataan.

Ramalan tersebut adalah pada tahun 1957 Indonesia akan menjadi negara komunisme. Ramalan itu menjadi benar karena PKI berhasil menduduki 4 besar pemilu 1955 menurut para pengamat. Sementara itu tanggal 12 Januari 1956, Westerling bersama Hasan Tiro menyeberang menuju Sumatra dari Penang menggunakan *speedboat*. Wartawan *The Straits Times* berusaha mengkonfirmasi tentang pertemuan Westerling dengan Hasan Tiro kepada Konsul Jenderal Indonesia di Singapura Dr. Herman Kartowisastro tetapi gagal karena sedang bertugas ke Penang.

Dalam mendukung operasional aksi pemberontakan, Darul Islam mengandalkan kegiatan penyelundupan. Pemerintah pusat tidak tinggal diam menyikapi aksi penyelundupan yang dilakukan oleh Darul Islam. Seperti yang diberitakan oleh *The Straits Times* tanggal 13 Maret 1956<sup>206</sup>, pemerintah pusat lewat insititusi departemen Bea Cukai menyatakan bahwa aksi

---

<sup>206</sup> “*Jakarta battle on illicit traders*”, Koran *The Straits Times*, 13 Maret 1956, <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19560313-1.2.37>, diakses pada 29 Juli 2022

penyelundupan merugikan negara sebesar \$51 juta per tahun dan akan memberantas para penyelundup terutama penyelundup dengan kapal motor canggih. Departemen Bea Cukai menyatakan bahwa aksi penyelundupan ekspor ilegal sekitar 50% melewati gudang kepabeanan pelabuhan. Adapun produk utama yang menjadi penyelundupan yaitu karet, kopi, kopra.

Ketiga produk itu menyumbang 60% total volume ekspor ilegal. Untuk memperlancar aksi penyelundupan, para penyelundup menyuap para pejabat daerah setempat dan menebar teror pada penduduk setempat. Sampai berita diturunkan telah terjadi baku tembak antara penyelundup dengan petugas bea cukai yang mengakibatkan tiga petugas bea cukai tewas di lepas pantai Aceh.

Ketika pemerintah pusat mengetahui Darul Islam mendirikan kantor dan basis di Singapura, Jakarta melayangkan protes kepada pemerintah Federasi Malaysia. Protes tersebut disampaikan oleh Letkol Ahmad Sukendro kepada Menteri Pertahanan Dato Abdul Razak saat berkunjung ke Kuala Lumpur. Letkol Ahmad Sukendro menyatakan bahwa Singapura dijadikan basis subversif oleh Darul Islam terhadap Jakarta. Setelah berkunjung ke Kuala Lumpur Letkol Ahmad Sukendro berkunjung ke Singapura. Kunjungan tersebut dalam rangka inspeksi perwira atase militer Indonesia di seluruh ibukota Asia. Seorang staf informasi konsulat jenderal Indonesia di Singapura D. Sujuno mengatakan kepada *The Straits Times* bahwa sebelum Aceh mendapatkan otonomi khusus, anggota Darul Islam selalu berkunjung dan berkegiatan ke Singapura. Semenjak mendapatkan otonomi khusus, kegiatan

anggota Darul Islam mulai menyusut. Berita tentang aksi protes tersebut dimuat *The Straits Times* tanggal 12 November 1957<sup>207</sup>.

Seorang petinggi Darul Islam, Hasan Ali berusia 42 tahun diketahui berkunjung ke Malaysia. Kunjungan ke Malaysia tersebut diberitakan oleh *The Straits Times* pada 18 November 1958<sup>208</sup>. Diketahui Hasan Ali ditemani oleh Tengku Djuli tiba di Johor Bahru setelah perjalanan dari Kuala Lumpur dengan mengendarai mobil pada hari Sabtu 15 November 1958. Hasan Ali membantah bahwa dirinya akan bertemu dengan para petinggi Darul Islam di Johor Bahru saat reporter *The Straits Times* mewawancarai dirinya. Alasan Hasan Ali berkunjung ke Johor Bahru untuk melihat kondisi terakhir Malaysia pasca merdeka dari Inggris. Selain itu, reporter *The Straits Times* mendapatkan kabar bahwa Hasan Ali ditolak masuk Singapura oleh otoritas Imigrasi koloni Singapura.

Esoknya pada 19 November 1958<sup>209</sup>, *The Straits Times* memberitakan bahwa Hasan Ali bermalam di sebuah hotel ber-AC kelas suite dengan biaya \$20/hari. Seorang pejabat imigrasi mengatakan bahwa Hasan Ali tiba bersama seorang pria berusia 25 tahun bernama J.I. Djuli. Pejabat imigrasi juga mengatakan bahwa Hasan Ali mengklaim dirinya seorang “Perdana Menteri”

---

<sup>207</sup> “S'pore is base for rebels -Jakarta”, Koran *The Straits Times*, 12 November 1957, <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19571112-1.2.75>, diakses pada 29 Juli 2022

<sup>208</sup> “Riddle of Darul Islam Leader”, Koran *The Straits Times*, 18 November 1958, <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19581118-1.2.10>, diakses pada 29 Juli 2022

<sup>209</sup> “While a Darul Islam 'premier' stayed in his room”, Koran *The Straits Times*, 19 November 1958, <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19581119-1.2.11>, diakses pada 29 Juli 2022

Darul Islam Aceh. Karena Hasan Ali dilarang masuk Singapura, maka Tengku Djuli yang akan pergi ke Singapura bertemu seorang anggota Darul Islam dari Eropa mewakili atas nama Hasan Ali dan ditemani seseorang bernama Musafah usia 34 tahun yang memiliki izin tinggal sementara. Hasan Ali tetap di kamar hotelnya.

Untuk mengetahui informasi lebih mendalam tentang Hasan Ali, reporter *The Straits Times* bertemu dengan kepala Konsulat Jenderal Indonesia di Singapura Brigjend TNI G.P.H. Djatikusumo, bahwa dirinya tidak tahu menahu tentang perjalanan Hasan Ali di Malaysia. Ia juga mengatakan bahwa Hasan Ali adalah orang yang tidak diinginkan oleh pemerintah Indonesia.

*The Straits Times* mencoba menggali lebih dalam informasi tentang Hasan Ali di Malaysia pada lain kesempatan. Kesempatan itu datang ketika Brigjend TNI G.P.H. Djatikusumo diundang sebagai kepala Konsulat Jenderal Indonesia yang baru oleh kepala Menteri bagian Singapura Mr. Lim Yew Hock pada 20 November 1958<sup>210</sup>. Setelah melakukan pertemuan selama 15 menit, Djatikusumo keluar ruangan dengan tersenyum. Dirinya mengatakan kepada para wartawan bahwa pertemuan itu adalah dialog ramah tamah dan kepala Konsul Jenderal Indonesia itu berharap bahwa hubungan Indonesia dengan Singapura bisa terjaga dengan baik. Dirinya juga tidak bertanya dan menyinggung perihal aktivitas para pemberontak Darul Islam di Singapura

---

<sup>210</sup> “Indonesia's new envoy sees Chief Minister”, Koran *The Straits Times*, 20 November 1958, <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19581120-1.2.28>, diakses pada 30 Juli 2022

karena akan membawa konsekuensi serius antara hubungan kedua negara tersebut.

Dirinya menambahkan jika para pemberontak Darul Islam yang tinggal di Singapura ikut membantu aksi pemberontakan, Indonesia tidak tinggal diam. Perihal tentang Hasan Ali yang berada di Malaysia, ia menjawab mungkin Hasan Ali sedang liburan dan para petinggi TNI yang ada di Aceh sudah mengetahui.

Pada tanggal 20 November 1958<sup>211</sup>, *The Straits Times* melaporkan bahwa Kedutaan Besar Indonesia meminta pemerintah Federasi Malaysia untuk menyerahkan para pemberontak Darul Islam yang melanggar aturan imigrasi Malaysia di daerah semenanjung Malaya. Kabar terakhir yang menghebohkan adalah saat Hasan Ali tiba di Johor Bahru. Selain meminta menyerahkan para pemberontak Darul Islam, Kedutaan Besar Indonesia juga memohon Federasi Malaysia untuk melacak status dokumen identitas paspor para pemberontak yang sudah masuk “daftar hitam” tapi bisa lolos urusan imigrasi. Semenjak Jakarta berusaha menumpas pemberontakan PRRI di Sumatra Tengah, tidak sedikit pemberontak Darul Islam hilir mudik semenanjung Malaya lewat jalur penyelundupan. Sementara, kepala Konsulat Jenderal Indonesia di Singapura Brigjend TNI GPH. Djatikusumo ditanya oleh reporter *The Straits Times* apakah akan melakukan tindakan serupa seperti yang dilakukan Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur, dirinya menjawab tidak.

---

<sup>211</sup> “Indonesia’s new envoy sees Chief Minister”, Koran *The Straits Times*, 20 November 1958, <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19581120-1.2.61>, diakses pada 30 Juli 2022

Pada tanggal 21 November 1958<sup>212</sup>, *The Straits Times* melaporkan bahwa Hasan Ali dan Tengku Djuli menghilang dari hotel tempat menginapnya. Sementara, polisi di perbatasan Johor Bahru, Malaysia dengan Woodlands, Singapura menghentikan kendaraan melakukan razia mencari buronan Hasan Ali. Diduga Hasan Ali dan Tengku Djuli berhasil menyelip masuk Singapura. *The Straits Times* juga menjelaskan bagaimana cara Hasan Ali dan Tengku Djuli berhasil mengelabui polisi setempat dan menyelip masuk Singapura.

Pada tanggal 20 November 1958, ketika jam makan siang Tengku Djuli meninggalkan hotel dan pergi ke pasar Johor Bahru. Disana ia bertemu dengan seorang pria Anang bin Rahmat usia 46 tahun mantan agen asuransi yang sedang duduk di mobil sedan *Bitish saloon car*. Anang ketika memberikan keterangan kepada reporter *The Straits Times* pada saat itu menunggu istrinya sedang berbelanja dihampiri oleh Djuli. Djuli meminta tolong kepada Anang kalau teman Djuli sedang sakit kemudian Anang masuk ke hotel. Lalu Djuli dan “temannya yang sakit” langsung bergegas naik mobil dan Anang meyalakan mobilnya. Baru perjalanan 1000 meter, Djuli meminta Anang untuk berhenti.

Kedua orang Indonesia ini langsung melompat ke arah sebuah mobil sedan lain yang sudah menunggu dan langsung tancap gas. Pada malam harinya, Djuli kembali ke hotel untuk membayar tagihan kamar sebesar \$203

---

<sup>212</sup> “Premier’ in Slick Vanishing Trick”, Koran *The Straits Times*, 21 November 1958, <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19581121-1.2.3>, diakses pada 30 Juli 2022

kemudian bergegas pergi. Mobil sedan *American saloon car* yang membawa Djuli dari Penang menuju Johor Bahru ikut menghilang. Selama lima hari di Johor Bahru, Hasan Ali sudah menghubungi pemberontak Darul Islam yang tinggal di Singapura. Sementara itu, istri Anang bin Rahmat yang bekerja sebagai bidan di rumah sakit setempat Johor Bahru, dicegat oleh polisi di Woodlands, Singapura saat ia akan menengok temannya yang sakit di daerah Bukit Timah. Polisi mengatakan bahwa sedang mencari seseorang bernama Hasan Ali<sup>213</sup>.

Dalam rangka memuluskan “perjuangan kemerdekaan”, Darul Islam Aceh menyebarkan propaganda paham/ideologinya. Salah satu bentuknya mencetak buku berjudul “kisah perang aceh”. Buku tersebut dicetak pertama di Kutaraja tahun 1956. Pada bulan Februari 1958, Jakarta melarang buku “kisah perang aceh” terbit. Agar buku tersebut tetap terbit, pemberontak Darul Islam mengalihkan percetakan ke Singapura. Seorang pengusaha Teuku Haji Omar bersama 4 orang pemberontak Darul Islam datang ke Penang untuk mengambil pesanan 5000 eksemplar buku. Buku tersebut dicetak di Singapura lalu dikirim ke Penang. Para perwakilan Darul Islam tidak bisa mengambil barang langsung ke Singapura, hal ini terjadi karena gerak-gerik anggota Darul Islam di Singapura sedang diawasi ketat oleh otoritas setempat. Ketika Jakarta mulai melarang edaran buku “kisah perang aceh” salinan buku dikirim ke Singapura. Saat diwawancarai oleh reporter *The Straits Times* pada 30

---

<sup>213</sup> *Ibid*, diakses pada 30 Juli 2022

Januari 1959<sup>214</sup>, Teuku Haji Omar berharap bisa membawa seluruh eksemplar buku tersebut menuju Sumatra. Menurut Teuku Haji Omar, isi dari buku “kisah perang aceh” adalah perjuangan Indonesia pasca agresi militer Belanda.

Tanda-tanda meredanya huru-hara di Aceh mulai terlihat. Pada tanggal 24 Maret 1959<sup>215</sup>, *The Straits Times* melaporkan yang dikutip dari kantor berita Antara bahwa Darul Islam Aceh akan mengirim delegasi ke Jakarta. Selain mengirim delegasi ke Jakarta, Antara melaporkan tiga hal yang berkaitan dengan rencana perdamaian Darul Islam Aceh dengan Jakarta. Pertama, pasca perpecahan yang terjadi di internal Darul Islam pada pertengahan bulan Maret 1959, salah satu kubu akan mencari jalan perdamaian dengan Jakarta. Kedua, gubernur Aceh Dr. Hasjmy menyatakan perwakilan pemerintah dan perwakilan Darul Islam sudah melakukan pertemuan. Ketiga, terjadi konsentrasi massa sebanyak 30 ribu orang yang berkumpul di Kutaraja menyuarkan orasi perdamaian.

Pemerintah pusat telah menawarkan otonomi khusus untuk Aceh agar mengakhiri huru-hara yang terjadi. Sementara itu, *The Straits Times* juga melaporkan bahwa sebagian kubu Darul Islam dilaporkan bergabung dengan gerakan PRRI-Permesta yang dipimpin oleh para perwira tentara yang membangkang.

---

<sup>214</sup> “*Shopping List of Five Rebels: 5,000 Banned War Books*”, Koran *The Straits Times*, 30 Januari 1959, <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19590130-1.2.92>, diakses pada 8 Agustus 2022

<sup>215</sup> “*Darul Islam in 'peace bid'*”, Koran *The Straits Times*, 24 Maret 1959, <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19590324-1.2.32>, diakses pada 8 Agustus 2022



Proses negosiasi perdamaian dilanjutkan antara Jakarta dengan Darul Islam Aceh. Jakarta mengirim delegasi Waperdam I (wakil perdana menteri) Hardi. *The Straits Times* mengabarkan pada 25 Mei 1959<sup>216</sup> Waperdam Hardi dalam perjalanan menuju Aceh. Nampaknya proses perdamaian mulai membuahkan hasil. Para pengikut Darul Islam mulai menyerahkan diri sebanyak 40 orang yang diberitakan oleh *The Straits Times* pada 10 Agustus 1959<sup>217</sup>.

Meskipun sudah mencapai kesepakatan perdamaian, ada sebagian kubu Darul Islam masih melakukan gerilya. *The Straits Times* pada 14 November 1960<sup>218</sup> mewartakan terjadi bentrokan di internal Darul Islam dalam bulan Oktober-November. Aksi penyelundupan untuk pasokan logistik mulai dicegat oleh Angkatan Darat Indonesia yang menguasai sebagian besar pelabuhan di pantai Sumatra. Angkatan Darat Indonesia melaporkan bahwa 20 orang tewas karena bentrokan antar sesama Darul Islam. Brigjend TNI Suprpto, wakil kepala staf Angkatan Darat bagian Sumatra menyatakan bahwa para pimpinan Darul Islam yang masih bergerilya bersembunyi dan bergabung dengan PRRI di Sumatra bagian barat. Beberapa bulan terakhir, Angkatan Darat Indonesia berhasil memukul sisa-sisa pergerakan gerilya Darul Islam Aceh.

---

<sup>216</sup> “Red canary ‘defected’ to West at Geneva”, Koran *The Straits Times*, 25 Mei 1959, <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19590525-1.2.49> diakses pada 8 Agustus 1959

<sup>217</sup> “Rebels give up”, Koran *The Straits Times*, 10 Agustus 1959, <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19590810-1.2.17>, diakses pada 8 Agustus 2022

<sup>218</sup> “Rebels Battle Each Other Army”, Koran *The Straits Times*, 14 November 1960, <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19601114-1.2.34>, diakses pada 8 Agustus 2022

## **BAB IV**

### **ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PERISTIWA DI/TII ACEH**

#### **A. Analisis framing untuk peristiwa sejarah**

##### **- Pengertian analisis framing**

Analisis framing adalah analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami & dibingkai oleh media, suatu sikap yang mendukung positif/negative hanyalah efek & bingkai yang dikembangkan media<sup>219</sup>. Terdapat dua esensi utama analisis framing yakni bagaimana peristiwa dimaknai (berhubungan dengan bagian yang diberitakan dan tidak diberitakan) dan bagaimana fakta itu ditulis (berhubungan dengan pemilihan kata dan gambar). Adapun analisis framing memiliki karakter berbeda dengan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif menekankan pada pesan/isi yang disampaikan oleh media. Untuk analisis framing menekankan pada penyajian pesan/isi yang disampaikan oleh media<sup>220</sup>.

Konsep framing yang digunakan sebagai menganalisis teks media merupakan teknik terbaru dari pendekatan analisis wacana. Konsep framing pertama kali dikemukakan oleh Beterson pada tahun 1955. Awalnya definisi framing adalah struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana<sup>221</sup>. *Framing* yang

---

<sup>219</sup> Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: LKiS Group, 2002), hal. 3

<sup>220</sup> *Ibid*, hal. 11

<sup>221</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 162

diartikan sebagai membingkai suatu peristiwa memiliki empat fungsi, yang pertama merumuskan suatu masalah, kedua menelusuri penyebab masalah itu terjadi, ketiga menganalisis dampak dari suatu masalah itu, keempat menganalisis solusi untuk mengatasi suatu masalah itu<sup>222</sup>. *Framing* berhubungan dengan fakta yang dibingkai dan ditampilkan kepada publik. Ketika fakta ditampilkan dalam berita, bisa menimbulkan fakta menjadi subyektif bukan obyektif lagi dan menimbulkan efek penafsiran berbeda-beda.

Adapun ciri-ciri framing adalah:

- Menekankan sudut pandang tertentu dan mengabaikan sudut pandang yang lain
- Menonjolkan tokoh/aktor tertentu dan mengabaikan tokoh lain<sup>223</sup>

Media *The Straits Times* merupakan salah satu media yang menulis tentang peristiwa pergolakan DI/TII Aceh tentunya menonjolkan tokoh/aktor tertentu. dalam membungkus berita, menonjolkan sudut pandang terdapat perbedaaan narasi dengan tulisan-tulisan sejarah lainnya. Adanya motif-motif tertentu dan perbedaan narasi akan dibahas dalm sub-bab berikutnya.

#### **B. Perbedaan narasi dalam isi berita *The Straits Times* dengan buku sejarah pergolakan DI/TII Aceh**

Narasi sejarah merupakan suatu teks yang berisi peristiwa dalam bentuk bacaan ataupun artikel dengan urut. Cara yang bisa dilihat untuk

---

<sup>222</sup> *Ibid*, hal. 182

<sup>223</sup> *Op.cit*, hal. 169

mengidentifikasi sudut pandang berita adalah membaca bentuk narasi pengantar yang ditulis.

Terdapat perbedaan dalam isi berita *The Straits Times* dengan buku pemberontakan DI/TII Aceh. Pada tanggal 25 September 1953<sup>224</sup>, laporan dari *The Straits Times* bahwa aktivitas perdagangan ekspor impor antara Aceh dengan Penang belum terganggu. Komoditas yang dikirim dari Aceh menuju Penang meliputi pinang, karet, dan kopra. Kemudian nilai ekspor Penang ke Aceh hanya \$1.000.000 per tahun 1953. Narasi nilai ekspor yang diberitakan *The Straits Times* berbeda dengan apa yang ditulis di salah satu buku pemberontakan DI/TII Aceh yang berjudul “Pemberontakan Kaum Republik”. Pada tahun 1953, nilai ekspor Penang ke Aceh hanya \$500.000. Padahal pada tahun 1951 mencapai \$3.300.000<sup>225</sup>. Kenapa menjadi penting membahas nilai ekspor karena tidak sedikit pengusaha dan masyarakat yang bekerja dalam lingkaran perdagangan ekspor impor terlibat pemberontakan.

Dalam peristiwa peristiwa berdarah dan huru-hara di Aceh, tidak sedikit warga yang terlibat dalam pemberontakan adalah pengusaha yang sehari-hari bergantung pada kegiatan ekonomi ekspor-impor. Awal mulanya ketika Jakarta memutuskan menghentikan sistem barter Aceh-Malaysia dan prosedur baru tentang ekspor-impor. Prosedur ekspor-impor yang baru ini jelas merugikan pengusaha lokal. Mengurus administrasi menjadi jauh yang

---

<sup>224</sup> <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19530925-1.2.98> diakses pada 27/7/2022

<sup>225</sup> Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1990) hal. 79

awalnya di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) pindah ke Medan. Kemudian kendali ekspor impor tidak lagi di tangan pejabat lokal Aceh tetapi para pejabat yang berada di Medan. Jarak yang jauh, hambatan di komunikasi, birokrasi, dan diskriminasi para pejabat di Medan terhadap pengusaha Aceh semakin memperburuk keadaan<sup>226</sup>.

Contoh perusahaan ekspor Aceh yang terkena dampak pembatasan barter seperti Petraco (Pesindo Trading Company), Indolco, Copra Fonds, dan PUSA Trading Company, Permai, dan Indocolim. Tiga perusahaan yang disebutkan terakhir merupakan milik PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Sementara Indolco milik Teuku Muhammad Amin, dan Petraco milik Pesindo yang dipegang oleh Ali Hasjmy. Sementara perusahaan Copra Fonds milik bupati Pidie Teuku Ahmad Hasan<sup>227</sup>. Dampaknya ialah PUSA tidak mampu lagi menanggung biaya operasional sehari-hari sekolah agama. Semenjak tahun 1952, Jakarta menghentikan program subsidi ratusan sekolah agama. Selain itu ulama yang memiliki usaha perdagangan praktis tidak memiliki lagi pemasukan/penghasilan utama. Selain pengusaha, rakyat kecil seperti buruh dan petani juga merasakan dampak ini.

Buruh pelabuhan menjadi pengangguran semenjak kegiatan bongkar muat komoditas ekspor impor digeser ke pelabuhan sekitar Medan yang

---

<sup>226</sup> *Ibid*, hal. 77

<sup>227</sup> Teuku Muhammad Hasan menjabat sebagai bupati pada tahun 1952-1953. “*Mantan Bupati Pidie M Diah Ibrahim Meninggal, Ini Daftar Orang No 1 di Pidie Sejak Indonesia Merdeka*”, Serambinews.com, Selasa/14/12/2021, <https://aceh.tribunnews.com/2021/12/14/mantan-bupati-pidie-m-diah-ibrahim-meninggal-ini-daftar-orang-no-1-di-pidie-sejak-indonesia-merdeka?page=all>, diakses pada Kamis, 6/10/2022

sebelumnya dilakukan di pelabuhan sepanjang pesisir Aceh pada tahun 1952. Salah satu contoh kasus pelayanan birokrasi yang tidak wajar yaitu ketika seorang pengusaha akan mengekspor 2000 ton kopra diminta membayar \$480 per ton untuk mengurus surat izin ekspor di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta. Padahal sebelumnya pengusaha itu ditawarkan seseorang yang mengaku sebagai pengusaha bisa menerbitkan surat izin ekspor hanya \$430 per ton<sup>228</sup>.

*The Straits Times* juga mewartakan kunjungan Sri Sultan Hamengkubuwono IX ke Singapura dan berkunjung sebentar di Medan. Saat itu bertepatan dengan event nasional PON (Pekan Olahraga Nasional) ke-II. Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan rapat pertemuan dengan panitia pelaksana PON<sup>229</sup> dan memberikan keterangan di depan awak media. Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengaku tidak melihat adanya kegaduhan karena penumpukan pengungsi di kota Medan yang berasal dari Aceh dan semua lapisan masyarakat menikmati dan merayakan event olahraga nasional. Karena Sri Sultan Hamengkubuwono IX seorang pejabat pusat bukan pejabat lokal yang mengetahui daerah tersebut jadi tidak melihat gelombang pengungsi. Berita tersebut tidak termuat dalam narasi sejarah tentang pergolakan DI/TII Aceh<sup>230</sup>.

---

<sup>228</sup> *Op.cit.*, Nazaruddin Sjamsuddin hal. 136

<sup>229</sup> "Sultan arrives from Medan" Koran Straits Times, 29 September 1953, <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19530929-1.2.68>, diakses pada 18 September 2022

<sup>230</sup> "The Sultan gives a conference", Koran The Straits Times, 30 September 1953, <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19530930-1.2.17>, diakses pada 18 September 2022

Perbedaan dalam menulis korban jiwa akibat pergolakan huru-hara DI/TII Aceh terdapat dalam koran *The Straits Times* dengan narasi sejarah DI/TII Aceh. Contohnya pada 7 Oktober 1953, *The Straits Times* melaporkan bahwa adanya korban tewas dari warga negara Jepang diantara ratusan korban jiwa warga lokal<sup>231</sup>. Kemudian narasi tentang “dukungan operasional kegiatan” DI/TII Aceh. *The Straits Times* mengutip laporan koran Patriot yang terbit di kota Medan bahwa Hasan Tiro menciptakan dan membuat mata uang sendiri yang dicetak di Amerika Serikat. Uang cetak tersebut sebelumnya ditemukan bersama sebuah parasut di Aceh<sup>232</sup>. Hal ini berbeda dengan narasi yang ditulis dalam buku “Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh” bahwa kampanye anti Jakarta yang dilakukan Hasan Tiro di Amerika Serikat akan didukung Daud Beureueh dan Kahar Muzakar. Tidak ada semacam rincian bentuk dukungan apa yang akan diambil<sup>233</sup>.

Terdapat narasi di *The Straits Times* bahwa aksi DI/TII Aceh mendapat dukungan Westerling. Juga diberitakan bahwa Westerling bertemu dengan para tokoh DI/TII Aceh yang digelar di Kota Kedah Malaysia. Selanjutnya Westerling bertemu dengan Hasan Tiro di Pulau Langkawi. Selain itu Westerling bersama Hasan Tiro menyeberang ke Sumatra dengan *speedboat*<sup>234</sup>. Perbedaan narasi berikutnya adalah usaha DI/TII yakni

---

<sup>231</sup> “*Japs Among Rebels*”, Koran The Straits Times, 7 Oktober 1953, <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19531007-1.2.6>

<sup>232</sup> “*Achin Rebels Set up Cell in Singapore*”, Koran The Straits Times, 17 Mei 1955, <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19550517-1.2.10>

<sup>233</sup> *Op. Cit*, Nazaruddin Sjamsuddin, hal. 257

<sup>234</sup> “*Is ‘TURKO’ Westerling back in Indonesia*”, Koran The Straits Times, 22 Januari 1956, <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19560122-1.2.29>

mencetak sebuah semacam buku “perjuangan” untuk kepentingan propaganda pergolakan DI/TII Aceh. Buku tersebut berjudul “Kisah perjuangan Aceh” yang dicetak di Singapura yang diwakili lima orang DI/TII Aceh yang dipimpin seorang pengusaha Teuku Haji Omar. Alasan mencetak buku di Singapura karena Jakarta sudah melarang peredaran buku tersebut. Buku tersebut dicetak sebanyak 5000 eksemplar<sup>235</sup>. Usaha mencetak buku ini tidak terdapat dalam narasi tulisan sejarah pergolakan DI/TII Aceh.

Berikutnya adalah narasi *The Straits Times* mengutip tiga laporan berita Antara bahwa terjadi konsentrasi massa di Kutaraja sebanyak 30.000 orang. Massa menyampaikan orasi perdamaian. Kemudian adanya perpecahan di internal Darul Islam Aceh pada bulan pertengahan bulan Maret 1959 dan salah satu kubu Darul Islam Aceh menyatakan akan berdamai dengan Jakarta. Terakhir gubernur Aceh, Dr. Ali Hasjmy menyebut perwakilan pemerintah sudah bertemu dengan perwakilan Darul Islam untuk melakukan perdamaian<sup>236</sup>. Narasi tentang perpecahan internal DI/TII dalam berita *The Straits Times* berlanjut pada 14 November 1960. Bentrokan antar anggota DI/TII yang terjadi pada bulan Oktober-November mengakibatkan 20 orang tewas<sup>237</sup>.

---

<sup>235</sup> “*Shopping List of Five Rebels: 5,000 Banned War Books*”, Koran The Straits Times, 30 Januari 1959 <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19590130-1.2.92>

<sup>236</sup> “*Darul Islam in 'peace bid'*” Koran The Straits Times, 24 Maret 1959 <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19590324-1.2.32>

<sup>237</sup> “*Rebels Battle Each Other Army*” Koran The Straits Times, 14 November 1960 <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19601114-1.2.34>



Dalam pemberitaan huru-hara DI/TII Aceh oleh The Straits Times, ada beberapa tokoh yang sering disebut. Hasan Ali dan Brigjend TNI GPH Djatikusumo merupakan tokoh yang sering disebut. Peran tokoh masing-masing dalam surat kabar The Straits Times akan dibahas berikut ini.. Hasan Ali merupakan pejabat Kepala Kejaksaan Daerah Aceh sebelum terjun dalam pergolakan DI/TII<sup>238</sup>. Sebelum pergolakan DI/TII Aceh meletus, pada pertengahan tahun 1952 terjadi mutasi jabatan besar-besaran di lingkungan seluruh Aceh. Mutasi besar-besaran ini terjadi karena status Aceh berubah menjadi karesidenan bagian dari provinsi Sumatra Utara yang sebelumnya adalah provinsi sendiri pada 23 Januari 1951 dan diumumkan langsung oleh Perdana Menteri M. Natsir lewat kantor RRI Kutaraja<sup>239</sup>. Pada awal tahun 1953, Hasan Ali dimutasi ke kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Hasan Ali menolak mutasi tersebut dengan cara memilih cuti<sup>240</sup>. Pembubaran provinsi Aceh disikapi oleh Hasan Ali, Daud Beureueh, Abdul Wahab bersama tokoh lainnya untuk membentuk panitia *ad hoc* mempersiapkan aksi pemberontakan<sup>241</sup>. Sebagai organisator pemberontak, pada bulan September 1955 Hasan Ali ditetapkan sebagai “Perdana Menteri” DI.TII Aceh dalam kongres Batee Kureng<sup>242</sup>. Posisi Hasan Ali sebagai “Perdana Menteri” DI/TII Aceh juga diliput secara intensif oleh surat kabar The Straits Times pada menjelang akhir bulan November 1958 ketika berkunjung ke Malaya dan

---

<sup>238</sup> *Op.cit*, Nazaruddin Sjamsuddin hal. 89

<sup>239</sup> Mawardi Umar & Al Chaidar, ‘*Serial Konflik Aceh dari Masa ke Masa’ Darul Islam Aceh: Pemberontak atau Pahlawan ?* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Prov. NAD, 2006) hal. 128

<sup>240</sup> *Ibid*, hal. 131

<sup>241</sup> *Op.cit*, Nazaruddin Sjamsuddin hal. 89

<sup>242</sup> *Op.cit*, Mawardi Umar & Al Chaidar hal. 201

Singapura. Hasan Ali mulai tiba di Malaysia pada 15 November 1958<sup>243</sup>. Hasan Ali ditetapkan sebagai “Perdana Menteri” diadakannya Konferensi Batee Kureng di Aceh Utara pada 23 September 1955<sup>244</sup>.

Diketahui Hasan Ali sedang menggalang dukungan pada anggota DI/TII Aceh yang tinggal di Singapura. Pada waktu yang sama, Hasan Ali diburu oleh polisi Malaysia karena kasus imigrasi ilegal. Penyebab Hasan Ali tersandung kasus imigrasi karena Indonesia melayangkan protes kepada Federasi Malaysia bahwa Hasan Ali telah dicekal keluar negeri tetapi bisa lolos dari urusan imigrasi<sup>245</sup> dan protes tentang DI/TII mendirikan basis markas untuk menggalang dukungan dari internasional<sup>246</sup>.

Brigjend TNI GPH. Djatikusumo merupakan seorang perwira tinggi TNI-AD yang bertugas sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Singapura, Sabah, dan Sarawak (1958-1960)<sup>247</sup>. Disebutkan di dalam surat kabar *The Straits Times* pada 20 November 1958, Brigjend TNI GPH Djatikusumo melakukan pertemuan dengan kepala menteri Singapura Lim Yew Hock. Pertemuan tersebut dalam rangka perkenalan Konsul Jenderal

---

<sup>243</sup> <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19581118-1.2.10> “*Riddle of Darul Islam Leader*”, Koran *The Straits Times*, 18 November 1958, diakses pada 29 Juli 2022

<sup>244</sup> M. Nur El Ibrahimy, *Tgk.M.Daud Beureueh: peranannya dalam pergolakan di Aceh* (Jakarta: Gunung Agung, 1982) hal. 167

<sup>245</sup> “*Riddle of Darul Islam Leader*”, Koran *The Straits Times*, 18 November 1958, <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19581118-1.2.10>, diakses pada 29 Juli 2022

<sup>246</sup> “*S'pore is base for rebels -Jakarta*”, Koran *The Straits Times*, 12 November 1957, <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19571112-1.2.75>, diakses pada 29 Juli 2022

<sup>247</sup> “*Ambassadors / Head of Foreign Mission*”, Embassy of the Republic of Indonesia Singapore, [https://web.archive.org/web/20120121131245/http://www.kbrisingapura.com/about\\_prevamb.php?lang=eng](https://web.archive.org/web/20120121131245/http://www.kbrisingapura.com/about_prevamb.php?lang=eng), diakses pada 13 November 2022

Indonesia yang baru. Hanya sebatas ramah-tamah saat pertemuan tersebut. Tidak ada pembicaraan serius seperti pergerakan DI/TII di Singapura antara kepala menteri dengan Djatikusumo. Menurutnya jika melakukan pembicaraan DI/TII Aceh akan menimbulkan hubungan diplomatik Indonesia – Singapura akan terjadi dampak yang serius<sup>248</sup>.

Dalam mewartakan huru-hara dan peristiwa berdarah di Aceh, *The Straits Times* menggunakan kata pemberontak, gangster, teroris, bandit untuk menyebut kelompok/golongan yang melakukan aksi pergolakan huru-hara. Pemberontak didalam KBBI artinya orang yang melawan atau menentang kekuasaan yang sah<sup>249</sup>. Hal tersebut terjadi karena tidak sedikit tentara dari Aceh melakukan perbuatan desersi melarikan diri dari markas dan membawa kabur berbagai persenjataan. Seperti yang dilakukan Kapten Hasan Saleh dan Letnan Ibrahim Saleh. Letnan Ibrahim Saleh bersama anak buahnya lari dari markas batalyon membawa berbagai persenjataan di Sidikalang<sup>250</sup>. Kapten Hasan Saleh lari dari markas suatu Pusat Pendidikan di Pematang Siantar<sup>251</sup>.

---

<sup>248</sup> “Indonesia’s new envoy sees Chief Minister”, Koran The Straits Times, 20 November 1958, <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19581120-1.2.28>, diakses pada 30 Juli 2022

<sup>249</sup> <https://kbbi.web.id/berontak> diakses pada 3 November 2022

<sup>250</sup> *Op. Cit*, Nazaruddin Sjamsuddin hal. 96

<sup>251</sup> *Ibid*, hal. 199

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 berkumandang, kabar kemerdekaan segera tersebar di berbagai daerah meskipun terlambat beberapa hari bahkan beberapa pekan. Kabar proklamasi terdengar mulai terdengar di Sumatra pada saat hari itu juga seperti di Bukittinggi pada malam hari, lalu di Aceh baru diterima pada 24 Agustus 1945. Residen Aceh Teuku Nyak Arif memasang bendera merah putih ukuran kecil di mobil pribadinya. Mobil tersebut dikendarai mengelilingi kota secara tidak langsung memberitahukan bahwa Indonesia sudah merdeka. Hal tersebut membuat masyarakat Aceh timbul keberanian dan tidak ragu-ragu untuk menyambut kemerdekaan. Masyarakat Aceh mulai mengibarkan bendera merah putih di rumah masing-masing. Selain itu juga terjadi pengambilan paksa berbagai asset milik kolonial Jepang seperti bangunan instalasi penting dan persenjataan.

Setelah pengumuman proklamasi kemerdekaan tersebar, unsur perangkat pemerintahan daerah Aceh mulai dibentuk. Tidak lupa para pemuda yang pernah mengikuti Pendidikan militer masa kolonial Belanda dan Jepang membentuk suatu organisasi atau perkumpulan bertujuan mempertahankan kemerdekaan. Ketika masyarakat Aceh masih dalam suasana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, mulai muncul ancaman dari luar. Tentara Sekutu tiba di Pulau Weh pada 25 Agustus 1945. Belanda membongceng pendaratan Sekutu dengan membawa para perangkat pemerintahan sipil dan sebagian tentara. Adapun Belanda kesulitan mendaratkan pasukan ke daratan Aceh

karena persenjataan peninggalan Jepang yang digunakan rakyat Aceh sangat lengkap dari persenjataan ringan hingga berat seperti meriam anti kapal dan artileri penangkis serangan udara. Selain ancaman dari luar, muncul pertikaian antar saudara di Aceh. Pertikaian tersebut melibatkan antara kaum uleebalang dengan kaum revolusioner. Kaum uleebalang menganggap kaum revolusioner ingin merebut kekuasaan yang sudah ditinggalkan oleh pemerintahan kolonial Jepang. Sebaliknya kaum revolusioner menganggap kaum uleebalang merupakan kaum feodalisme yang harus diberantas. Teuku Nyak Arief sebagai Residen Aceh tidak mampu menengahi konflik antar saudara atau yang dikenal sebagai perang Cumbok.

Kaum revolusioner berhasil merebut simpati rakyat Aceh dan berhasil menembus lingkaran lingkungan militer. Faktor keberhasilan kaum revolusioner dengan menggunakan simbol atribut keagamaan dan kemerdekaan dalam menyebarkan propaganda. Setelah berakhirnya perang Cumbok, rakyat Aceh menghadapi serbuan Belanda di Sumatra Utara. Jika Medan berhasil jatuh ke tangan Belanda, maka Belanda lebih mudah merangsek masuk daerah Aceh.

Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada 27 Desember 1949, status Aceh sebagai provinsi mulai terpinggirkan. Pemerintah mulai memasukkan Aceh dalam wilayah Provinsi Sumatra Utara. Hal ini mendapat tentangan mengingat Aceh berbeda dengan Sumatra Utara dari sisi sosial dan budaya. hukum adat Aceh (tanah, warisan, perkawinan dll) pasti berbeda dengan daerah yang lain di Sumatera Utara. Selain itu sejak

tahun 1948, Aceh menjadi provinsi sendiri yang dipimpin oleh gubernur militer Daud Beureueh. Selain itu semenjak kehadiran kolonialisme Belanda, Aceh didominasi oleh orang-orang dari Sumatera Timur yang notabene dulu dikuasai oleh para Sultan kerajaan Aceh.

Pada 21 September 1953, Daud Beureueh “memproklamasikan” Aceh bergabung dengan DI/TII. Huru-hara terjadi di seluruh daerah Aceh. Hal ini menyebabkan situasi keamanan Aceh kacau dan pemerintah pusat memutuskan mengirim pasukan keamanan untuk menertibkan kembali. Selain itu, pemerintah pusat juga menggunakan cara persuasif mengajak kembali para pengikut DI/TII kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Pada tahun 1960, keadaan mulai membaik. Banyak anggota DI/TII mulai kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Ketika masa pergolakan DI/TII Aceh berlangsung, media cetak asing dari Singapura memberitakan perkembangan kondisi Aceh. Selat Malaka dan aktivitas perdagangan Aceh dengan Singapura dan sebaliknya, The Straits Times media cetak Singapura memberitakan perkembangan kondisi Aceh saat pergolakan berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Koran

*The Straits Times*, 24 September 1953

*The Straits Times*, 26 September 1953

*The Straits Times*, 30 September 1953

*The Straits Times*, 2 Oktober 1953

*The Straits Times*, 9 November 1953

*The Straits Times*, 18 Desember 1953

*The Straits Times*, 27 Februari 1954

*The Straits Times*, 14 Maret 1955

*The Straits Times*, 17 Mei 1955

*The Straits Times*, 28 Agustus 1955

*The Straits Times*, 2 September 1955

*The Straits Times*, 11 November 1955

*The Straits Times*, 22 Januari 1956

*The Straits Times*, 13 Maret 1956

*The Straits Times*, 12 November 1957

*The Straits Times*, 18 November 1958

*The Straits Times*, 19 November 1958

*The Straits Times*, 20 November 1958

*The Straits Times*, 21 November 1958

*The Straits Times*, 30 Januari 1959

*The Straits Times*, 24 Maret 1959

*The Straits Times*, 16 April 1959

*The Straits Times*, 30 April 1959

*The Straits Times*, 25 Mei 1959

*The Straits Times*, 10 Agustus 1959

*The Straits Times*, 14 November 1960

*The Straits Times*, 31 Januari 1973

*The Straits Times*, 5 Oktober 1984

*The Straits Times*, 8 Juli 1995

### **Sumber Buku**

Ariwiadi, *Gerakan Operasi Militer VII: Penyelesaian Peristiwa Atjeh*, (Jakarta: Mega Bookstore & Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, 1959)

Dadek, Teuku & Hermansyah, *Meulaboh dalam lintas sejarah Aceh* (Meulaboh: Bappeda Aceh Barat, 2013)

Daud, Anwar & Husaini Husda, '*Serial Konflik Aceh dari Masa ke Masa*' *Aceh dari konflik ke damai: Peristiwa Cumbok di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Prov. NAD, 2006)

Dr. T. Ibrahim Alfian. M.A. dkk, *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945-1949)* (Banda Aceh: Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 1982)

Drs. Muhammad Ibrahim dkk, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta: Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 1983)

el-Ibrahimi, M. Noer, *Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Peranannya dalam Pergolakan di Aceh*, (Jakarta: Gunung Agung, 1981)

Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: LKiS Group, 2002)

Garekar, Bhagyashree, *Living History: 170 Years Of The Straits Times*, (Singapura: The Straits Times, 2015)

H. Badruzzaman Ismail, S.H dkk, *Delapan Puluh Tahun Melalui Jalan Raya Dunia: A. Hasjmy Aset Sejarah Masa Kini dan Masa Depan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994)

Kamajaya, *Lima putera puteri Aceh pahlawan nasional* (Yogyakarta: U.P. Indonesia, 1981)

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013)

*M. Panggabean: Jenderal dari Tano Batak*, (Jakarta: Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, 2011)



Meuraxa, Dada. *Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Medan: Pustaka Sedar, 1956)

Ricklefs, M. C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007)

*Sejarah Angkatan Udara Indonesia 1950-1959: Jilid II*, (Jakarta: Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, 2005)

*Sejarah TNI-AD 1945-1973 jilid 3: Peranan TNI-AD dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia*, (Bandung: Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, 1979)

Sjamsudin, Nazaruddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990)

Umar, Mawardi, & Al Chaidar, '*Serial Konflik Aceh dari Masa ke Masa*' *Darul Islam Aceh: Pemberontak atau Pahlawan?* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Prov. NAD, 2006)

Van Dijk, Cornelis, *Rebellion Under the Banner of Islam: The Darul Islam In Indonesia*, (Den Haag: Martinus Nijhoff Publishers, 1981)

Sobur, Alex, *Analisis Teks Media* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015)

### Artikel Online

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/12/173000869/kembali-ke-negara-kesatuan> Kembali ke Negara Kesatuan, diakses pada 28 Januari 2022

<https://www.kompas.com/stori/read/2022/07/16/161600379/biografi-tokoh-indonesia--maraden-panggabean?page=all> Biografi Tokoh Indonesia: Maraden Panggabean, diakses pada 10 November 2022

[https://web.archive.org/web/20160630052327/http://www.sph.com.sg/media\\_releases/2040](https://web.archive.org/web/20160630052327/http://www.sph.com.sg/media_releases/2040), Media Release: The Straits Times launches Myanmar edition, diakses pada 13 November 2022

[https://web.archive.org/web/20160630045615/http://www.sph.com.sg/media\\_releases/2266](https://web.archive.org/web/20160630045615/http://www.sph.com.sg/media_releases/2266), Media Release: The Straits Times launches Brunei edition, diakses pada 13 November 2022

<http://www.aviation-history.com/airmen/tigers.htm> The Flying Tigers, diakses pada 16 September 2022

[https://web.archive.org/web/20120121131245/http://www.kbrisingapura.com/about\\_prevamb.php?lang=eng](https://web.archive.org/web/20120121131245/http://www.kbrisingapura.com/about_prevamb.php?lang=eng) Ambassadors / Head of Foreign Mission, diakses pada 13 November 2022

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

24 September 1953

# Crush revolt, Army ordered

JAKARTA, Wed.

**T**HE Indonesian Cabinet today ordered the army and police to restore order in the Muslim fanatic revolt in the Atjeh area, North Sumatra.

The Premier, All Sastroamidjojo, had consultations with the acting Army Chief of Staff, the Defence Minister, Prosecutor General and police officials.

The army commander in Atjeh reported that 60 people were detained. One soldier was killed and one wounded in engagements in seven towns of North Sumatra.

He said all district capitals in Atjeh remained under government control. Some "leaders of the illegal movement" had been arrested.

In Kutaradja, capital of Atjeh, a curfew had been imposed from 8 p.m. to 6 a.m.

Trains were reported overdue with several incidents of looting of goods trains.

Pamphlets received by the army headquarters announced that Atjeh has been proclaimed part of "Negara Islam Indonesia"—Indonesian Islam State.—Reuter, U.P.

26 September 1963

# MALAYAN SHIPS ARE SENT TO BELAWAN

## *Diverted from Acheen*

**M**ALAYAN ships engaged in coastal trade with Indonesia have been diverted from Acheen to Belawan and other ports in northern Sumatra on the advice of the Governor, Dr. Abdul Hakim.

### Eight fires

Singapore Fire Brigade dealt with eight lallang fires in seven hours yesterday.

Two fires were at Wesser Estate in Ayer Rajah Road and Pasir Lebar off Jurong Road.

The others were at Shenton Way, Beach Road, Nee Soon, Depot Road, Guillemar Road and 17th milestone Jurong Road.

### Dump LID

7 Cu. Yds.

Captain T. F. Penney, Penang deputy Harbour Master, told the Straits Times yesterday that there had been no reports of trouble from ships operating in Indonesian waters.

When the revolt began, a tug belonging to Malayan Stevedoring and Transportation Company radioed to Penang that it was steaming to another port.

The tug gave the first news of trouble to Penang shipping circles.

The Straits Steamship Company said yesterday that its vessels would not operate in the affected area until further notice.

Four vessels engaged in evacuating refugees to ports outside the Lok Seumawe area have returned to Penang.

Many Penang traders with branches in North Sumatra reported they have had no news from staffs and families in Atjeh.

It is thought some of them may have been evacuated to Medan.

About 35,000 bags of arecanuts bound for Penang are reported stranded in North Sumatran godowns.

30 September 1953

## The Sultan gives a conference

**T**HE SULTAN of Jogjakarta, Hamengku Buwono IX, saw no sign of trouble in Medan, which is reported to be swarming with refugees from the Acheen rebellion in Northern Sumatra, he told a Press conference yesterday

"Revolts?", queried the Sultan. "I heard nothing of them. It was all very quiet

"People in Medan and the surrounding districts were too busy watching the sports festival to worry about riots.

"Even big businessmen were too interested in sport to care.

The Sultan arrived in Singapore on Monday by air from Penang. He leaves for home on Friday

In the Straits Times picture above he is seen (left) emphasizing a point at the conference.

27 Februari 1954

## 50 Atjeh rebels die

JAKARTA, Fri.—Indonesian troops fighting Atjeh rebels in North Sumatra killed 50 men in mopping up operations and captured large quantities of supplies, an Army communique from Medan said.

A gang of 80 rebels burned the Matang Kuli rail station.—Reuter.

## JAPS AMONG REBELS

THE HAGUE, Tues.

**I**NDONESIAN Government forces killed Japanese as well as local rebel forces in fighting the Acheen revolt in Sumatra, according to Jakarta messages today.

News agency reports said an army spokesman claimed that up to last Saturday, Government forces seeking to restore order in the mountainous jungle-covered region had killed 400 rebels, captured 601 and wounded 41. Japanese bodies were found among the dead.

7 Oktober 1953